

LKIP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2018



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2017


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Ciamis, 27 Maret 2018

INSPEKTUR
KABUPATEN CIAMIS



H. TATANG, S.Ag. M.Pd..
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640316 198412 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2017 dapat kami selesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2017, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu **"CIAMIS MAJU BERKUALITAS MENUJU KEMANDIRIAN TAHUN 2019"** sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras

semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Ciamis ke arah yang lebih baik.

Ciamis, 22 Maret 2018

Pjs. Bupati Ciamis,




Ir. DEDDI MULYADI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Ciamis telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Akuntabilitas merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian dan diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang terukur, dapat diuji dan diandalkan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan dan amanah demi mewujudkan Visi “Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019”.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik yang memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 25 Juli 2014.

Bertitik tolak dari Penyelarasan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017, LKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2017 berisi ikhtisar pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja serta perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian laporan ini memberikan gambaran dan menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada periode tahun ketiga perencanaan jangka menengah Kabupaten Ciamis. Secara umum pencapaian sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2017 telah ditetapkan 19 sasaran dengan 28 indikator sasaran, dengan hasil pengukuran pencapaian sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Hasil pengukuran dari 19 sasaran menunjukkan :
 - 13 sasaran atau 68,42% tercapai melebihi target dengan kategori sangat baik;
 - 4 sasaran atau 21,05 % tercapai sesuai target dengan kategori sangat baik;
 - 2 sasaran atau 10,53 % tidak mencapai target dengan kategori sangat baik;
- b. Dari kategori pencapaian sasaran di atas diketahui dari 19 sasaran strategis menunjukkan seluruh sasaran termasuk dalam kategori sangat baik.

- c. Hasil pengukuran dari 28 indikator sasaran menunjukkan secara keseluruhan kategori pencapaian indikator sasaran menunjukkan :
- 16 indikator sasaran atau 57,14% tercapai melebihi target dengan kategori sangat baik
 - 8 indikator sasaran atau 28,57% tercapai sesuai target dengan kategori sangat baik
 - 4 indikator sasaran atau 14,29% tidak mencapai target dengan kategori sangat baik.

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di Kabupaten Ciamis, dialokasikan anggaran sebesar Rp.962.765.507.516,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 913.141.077.434,- atau 94,85 % dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun 2017.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan indikator sasaran masih terlihat adanya beberapa sasaran dan indikator sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Ciamis dalam upaya memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kinerja di masa mendatang.

Ciamis, Maret 2018

Pjs. Bupati Ciamis,

Ir. DEDDI MULYADI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	xii
Daftar Gambar	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH	2
1.2.1 Kondisi Wilayah dan Geografis	3
1.2.2 Kondisi Demografis/Penduduk	6
1.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	10
1.2.4 Perekonomian	13
1.2.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	13
1.2.4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi	19
1.2.4.3 Inflasi	22
1.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	22
1.4 KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH.....	23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	28
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ..	28
2.1.1 Visi Pembangunan Daerah	28
2.1.2 Misi Pembangunan Daerah	30

2.1.3	Tujuan dan Sasaran	31
2.2	Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	36
2.2.1	Prioritas Pembangunan	36
2.2.2	Program Prioritas	45
2.3	INDIKATOR KINERJA UTAMA	57
2.4	PERJANJIAN KINERJA	59
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		63
3.1	KERANGKA PENGUKURAN KINERJA	64
3.2	PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN	66
3.3	AKUNTABILITAS KEUANGAN	174
3.4	PRESTASI DAN PENGHARGAAN	179
BAB IV PENUTUP		184
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Tabel Data Administratif dan Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017	4
1.2 Tabel Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017	7
1.3 Tabel Perkembangan IPM di Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tahun 2015-2017	11
1.4 Tabel PDRB AdHB Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah)	13
1.5 Tabel PDRB AdHK Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah)	17
1.6 Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017	19
2.1 Tabel Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 setelah di Reviu.....	31
2.2 Tabel Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2017	45
2.3 Tabel Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019	58
2.4 Tabel Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Setelah di Reviu	60
3.1 Tabel Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Setiap Sasaran Tahun 2017 Setelah di Reviu.....	68
3.2 Tabel Rekapitulasi Tingkat Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran pada Masing-Masing Misi Tahun 2017	70

3.3	Tabel Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2017 Setelah di Reviu	74
3.4	Tabel Rekapitulasi Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2017	77
3.5	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	78
3.6	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Tahun 2017 dengan Target RPJMD	79
3.7	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	85
3.8	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Tahun 2017 dengan Target RPJMD	86
3.9	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Mempertahankan Laju Pertumbuhan Penduduk	89
3.10	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Mempertahankan Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Target RPJMD	90
3.11	Tabel Perkembangan Jumlah Penduduk Lahir, Mati, Datang dan Pindah di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2017	91
3.12	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Perempuan dalam Berpolitik/Kemasyarakatan	92
3.13	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Perempuan dalam Berpolitik/Kemasyarakatan Tahun 2017 dengan Target RPJMD	92
3.14	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan	95
3.15	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan Tahun 2017 dengan Target RPJMD	96
3.16	Tabel Realisasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	99
3.17	Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan Target RPJMD	100
3.18	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	109

3.19	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2017 dengan Target RPJMD..	110
3.20	Tabel Nilai Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada SKPD/Unit Kerja Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017	111
3.21	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Mengembangkan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dan Dunia Usaha	113
3.22	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Mengembangkan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dan Dunia Usaha dengan Target RPJMD	114
3.23	Tabel Kerjasama Antar Daerah di Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan sampai dengan Tahun 2017	115
3.24	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	119
3.25	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2017 dengan Target RPJMD	120
3.26	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	122
3.27	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah Tahun 2017 dengan Target RPJMD	123
3.28	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Keselamatan dan Kelancaran Transportasi	129
3.29	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Keselamatan dan Kelancaran Transportasi Tahun 2017 dengan Target RPJMD	129
3.30	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	131
3.31	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017 dengan Target RPJMD	132
3.32	Tabel Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2015 sampai dengan 2017	133
3.33	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat	136

3.34	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Perekonomian	138
3.35	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Perekonomian Tahun 2017 dengan Target RPJMD	139
3.36	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	145
3.37	Tabel Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Tahun 2017 dengan Target RPJMD.....	146
3.38	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani	151
3.39	Tabel Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tahun 2017 dengan Target RPJMD	152
3.40	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Disparitas Pendapatan	155
3.41	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Menurunnya Disparitas Pendapatan Tahun 2017 dengan Target RPJMD	156
3.42	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi, Sistem Informasi dan Kelembagaan Pangan	158
3.43	Tabel Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Jumlah Desa Swasembada	170
3.44	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Desa Swasembada Tahun 2017 dengan Target RPJMD	171
3.46	Tabel Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017	174
3.47	Tabel Pagu Anggaran dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017	175
3.48	Tabel Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017	176
3.49	Tabel Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017	178
3.50	Tabel Prestasi yang Diraih Kabupaten Ciamis Tahun 2017	180

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1.1 Grafik Komposisi Penduduk Kabupaten Ciamis menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2017	6
1.2 Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2017	7
1.3 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis berdasarkan Kategori Pekerjaan Tahun 2015-2017	8
1.4 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015-2017	9
1.5 Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ciamis Tahun Berdasarkan Metode Baru Tahun 2015-2017	12
1.6 Grafik Distribusi Persentase PDRB AdHB Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017	15
1.7 Grafik Distribusi Persentase PDRB AdHK Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2016	18
1.8 Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2017	20
1.9 Grafik Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2017	21
3.1 Grafik Persentase Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran	71
3.2 Grafik Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 1	71
3.3 Grafik Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 2	72
3.4 Grafik Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 3	72
3.5 Grafik Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 4	73
3.6 Grafik Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 5	73

3.7	Grafik Perkembangan RLS di Kabupaten Ciamis Tahun 2014 s.d. Tahun 2017	81
3.8	Grafik Perkembangan HLS di Kabupaten Ciamis Tahun 2014 s.d Tahun 2017	83
3.9	Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2017	87
3.10	Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2017	90
3.11	Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2017	96
3.12	Grafik Persentase Capaian Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2014-2017	126
3.13	Grafik Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2017	128
3.14	Grafik Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2013-2017	130
3.15	Grafik Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2015 s.d 2017	133
3.16	Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2017	144
3.17	Grafik Perkembangan PDRB Perkapita AdHB Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017.....	148
3.18	Grafik Perkembangan Daya Beli Masyarakat Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017	150
3.19	Grafik Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2017	153
3.20	Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2017	157
3.21	Grafik Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017	162
3.22	Grafik Perkembangan Harga dan Pasokan Pangan Di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2017	166
3.23	Grafik Perkembangan Angka Kecukupan Energi (%) Tahun 2013-2017	168
3.24	Grafik Perkembangan Jumlah Desa Swasembada di Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017	171

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Peta Administratif Wilayah Kabupaten Ciamis	3
2.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa berdasarkan laporan kinerja tahunan SKPD, Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah

kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2017 disusun untuk memberikan gambaran atas realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran dan indikator kinerja sasaran melalui program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017.

1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH

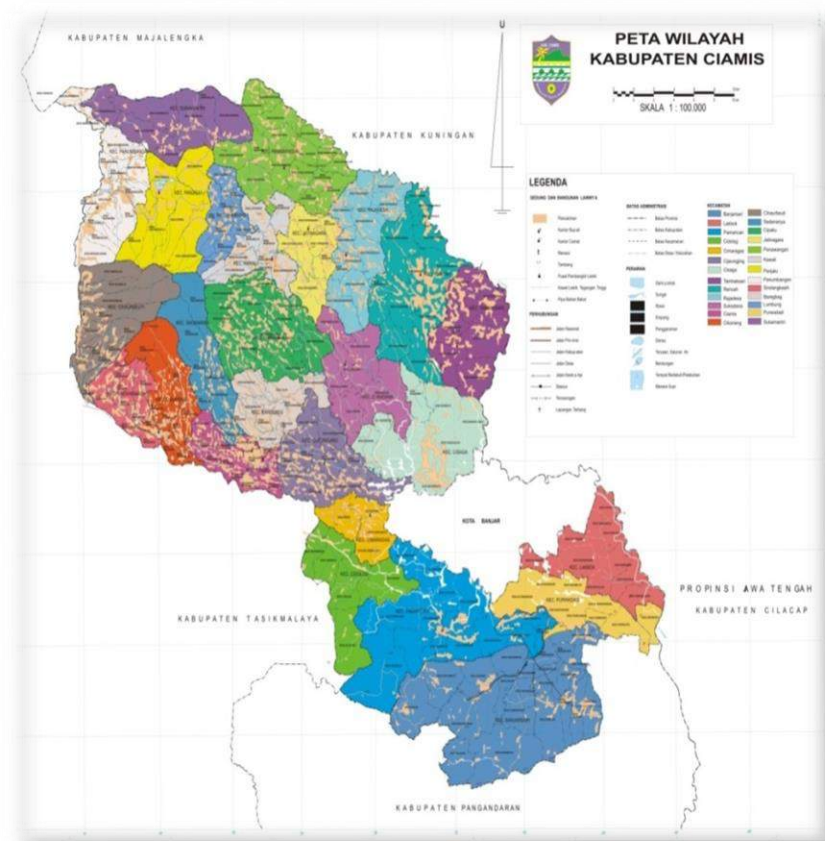
Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. Dalam perkembangannya, Kabupaten Ciamis telah 2 (dua) kali mengalami pemekaran daerah yaitu dibentuknya Kota Banjar pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat serta dibentuknya Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Hal ini membawa perubahan terhadap kondisi umum Kabupaten Ciamis dalam berbagai aspek terutama kondisi wilayah/geografis, penduduk/demografis dan perekonomian serta aspek-aspek lainnya. Secara umum gambaran mengenai kondisi Kabupaten Ciamis pada saat ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Kondisi Wilayah dan Geografis

Secara geografis letak wilayah Kabupaten Ciamis berada pada 108°19' sampai dengan 108°43' bujur timur dan 7°03'39" sampai dengan 7°39'36" lintang selatan, berada di ujung timur Provinsi Jawa Barat, yang berjarak sekitar 121 km dari ibukota Provinsi, serta mempunyai posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis – Cirebon – Jawa Tengah, dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan
- Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya
- Sebelah Timur : Provinsi Jawa Tengah dan Kota Banjar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pangandaran

Gambar 1.1
Peta Administratif Wilayah Kabupaten Ciamis



Kabupaten Ciamis memiliki luas wilayah 1.433,87 km² dan secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 7 kelurahan, 258 desa, 1.225 dusun, 2.918 RW dan 9.151 RT, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Administratif dan Luas Wilayah per-Kecamatan di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017

No	Kecamatan	Desa	Dusun	RW	RT	Luas (Km ²)	(%)
1	Lakbok	10	31	77	327	57,85	4,03
2	Pamarican	14	52	121	455	104,21	7,27
3	Cidolog	6	31	64	161	59,02	4,12
4	Cimaragas	5	22	48	140	27,09	1,89
5	Cijeungjing	11	58	162	415	58,25	4,06
6	Cisaga	11	43	123	343	60,40	4,21
7	Tambaksari	6	37	78	233	64,31	4,49
8	Rancah	13	67	194	496	73,03	5,09
9	Rajadesa	11	56	125	388	58,14	4,05
10	Sukadana	6	43	71	224	58,22	4,06
11	Ciamis	12	21	170	614	32,88	2,29
12	Cikoneng	9	52	117	340	36,03	2,51
13	Cihaurbeuti	11	67	114	343	36,16	2,52
14	Sadananya	8	26	55	222	43,50	3,03
15	Cipaku	13	64	179	431	65,69	4,58
16	Jatinagara	6	32	61	207	35,38	2,47
17	Panawangan	18	70	182	537	80,91	5,64
18	Kawali	11	49	124	367	33,31	2,32
19	Panjalu	8	68	132	317	67,08	4,68
20	Panumbangan	14	75	153	414	59,46	4,15
21	Sindangkasih	9	51	108	355	26,51	1,85
22	Baregbeg	9	32	96	370	24,48	1,71
23	Lumbung	8	41	99	292	24,84	1,73
24	Purwadadi	9	29	56	276	40,05	2,79
25	Sukamantri	5	30	61	167	44,45	3,10
26	Banjarsari	12	38	83	390	77,83	5,43
27	Banjaranyar	10	40	67	327	84,79	5,91
	JUMLAH	258	1.225	2.918	9.151	1,433.87	100

Sumber : Ciamis Dalam Angka Tahun 2017 dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2016 (diolah)

Wilayah Kabupaten Ciamis dialiri oleh sungai utama yaitu sungai Citanduy yang mengalir mulai dari Gunung Cakrabuana (hulu) di Kabupaten Tasikmalaya dan bermuara di Sagara Anakan Provinsi Jawa Tengah dengan anak-anak sungainya terdiri dari Sungai Cimuntur, Cijolang dan Ciseel.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai Citanduy dengan luas 173.529,51 Ha, Daerah Aliran Sungai Citanduy, terbagi kedalam Sub Daerah Aliran Sungai Citanduy Hulu seluas 22.279,38 Ha, Sub Daerah Aliran Sungai Ciseel seluas 77.421,08 Ha, Sub Daerah Aliran Sungai Cimuntur seluas 55.163,06 Ha dan Sub Daerah Aliran Sungai Cijolang seluas 18.665,99 Ha.

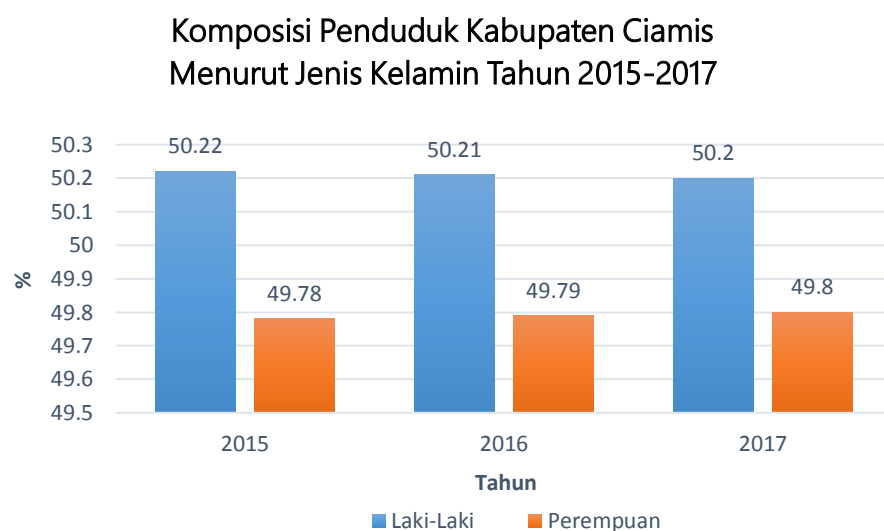
Daerah Aliran Sungai Citanduy secara nasional dikategorikan sebagai Daerah Aliran Sungai kritis dengan indikator kekritisannya antara lain fluktuasi debit sungai, tingkat erosi dan sedimentasi yang cukup tinggi (± 5 juta ton/tahun terbawa oleh Sungai Citanduy).

Dilihat dari aspek topografis Kabupaten Ciamis terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar bergelombang sampai pegunungan. Kemiringan lereng berkisar antara 0 - >40% dengan sebaran 0 - 2% terdapat di bagian tengah - timur laut ke selatan dan 2 - >40% tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan. Struktur daratan wilayah Kabupaten Ciamis secara garis besar terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Bagian utara merupakan pegunungan dengan ketinggian 500-1000 m dpl sekitar 19 %, Bagian tengah ke arah barat merupakan perbukitan dengan ketinggian 100-500 m dpl sekitar 49%, sedangkan Bagian tengah ke arah timur merupakan daerah dataran rendah dan rawa dengan ketinggian 25-100 m dpl sekitar 14%.

1.2.2 Kondisi Demografis/Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, jumlah penduduk Kabupaten Ciamis tahun 2017 tercatat sebanyak 1.401.423 orang yang terdiri dari 703.538 laki-laki (50,20 %) dan 697.885 perempuan (49,80 %) dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 977,37 jiwa/Km², sedangkan jumlah keluarga tercatat sebanyak 478.801 Kepala Keluarga.

Grafik 1.1



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2017

Berdasarkan data BPS Kabupaten Ciamis, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2017 diproyeksikan sebesar 0,47 % per tahun, sedikit meningkat dari tahun 2016 sebesar 0,46 % per tahun dan tahun 2015 sebesar 0,43 % per tahun. Sedangkan *Total Fertility Rate* (TFR) tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tetap yaitu sebesar 2,03 %. Penyebaran penduduk terkonsentrasi di wilayah yang relatif telah berkembang karena ketersediaan akses untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi terdapat di Kecamatan Ciamis, Sindangkasih, Baregbeg, Cikoneng dan Cihaurbeuti sedangkan untuk wilayah kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tambaksari dan Cidolog.

Tabel 1.2
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017

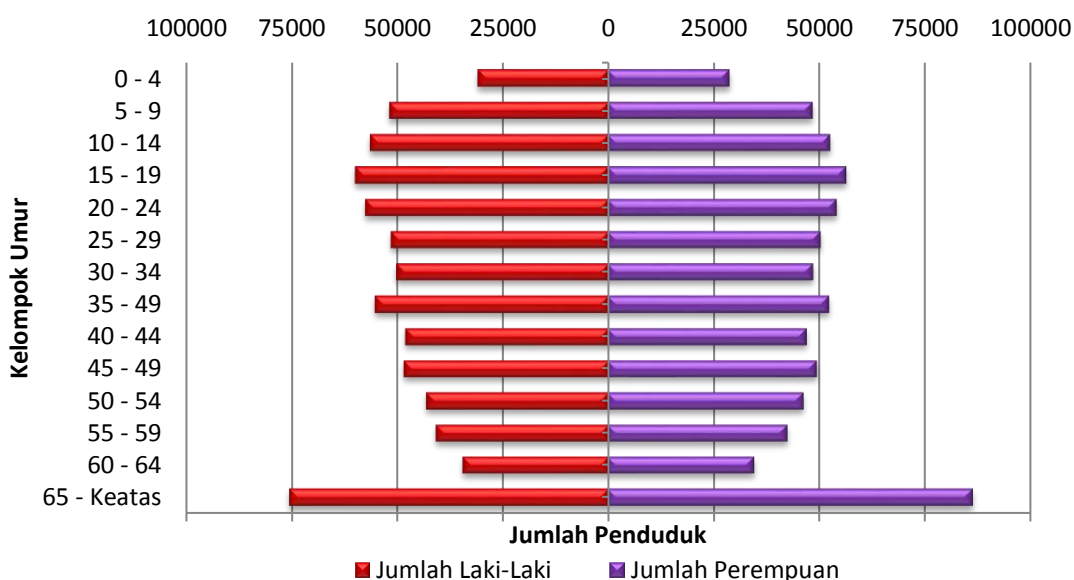
No	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk (orang) *)	1.389.414	1.398.346	1.401.423
2	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) *)	969	976	977
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) **)	0,43	0,46	0,47
4	Angka Beban Tanggungan *)	44,41	44,75	53,52
5	Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin (orang)			
-	Laki-laki *)	697.738	702.065	703.538
-	Perempuan *)	691.676	696.281	697.885

Sumber : *) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
**) BPS Kabupaten Ciamis

Menurut struktur umur penduduk Kabupaten Ciamis tahun 2016 didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 957.855 orang (68,35 %), kelompok usia muda (0-14 tahun), 292.44 orang (20,87 %) dan usia tua (65 tahun keatas) sebanyak 151.124 orang (10,78 %).

Piramida penduduk dapat menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada setiap kelompok umur berbeda. Piramida penduduk Kabupaten Ciamis tahun 2017 dapat diilustrasikan pada grafik di bawah ini :

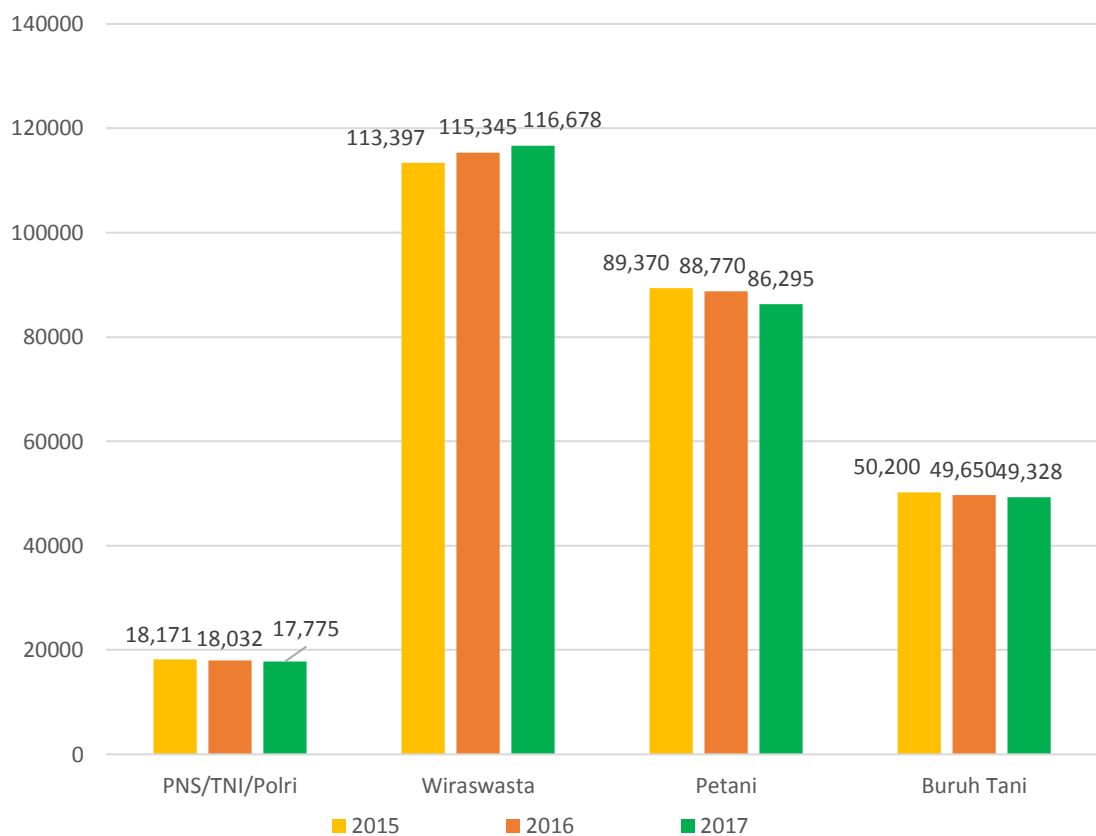
Grafik 1.2
Piramida Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2017



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017

Jumlah penduduk dari aspek pekerjaan pada tahun 2017 sesuai data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pada kategori pekerjaan buruh tani sebanyak 49.328 orang, petani sebanyak 86.295 orang, wiraswasta sebanyak 116.678 orang dan kategori PNS/TNI/Polri sebanyak 17.755 orang.

Grafik 1.3
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Kategori Pekerjaan Tahun 2015-2017

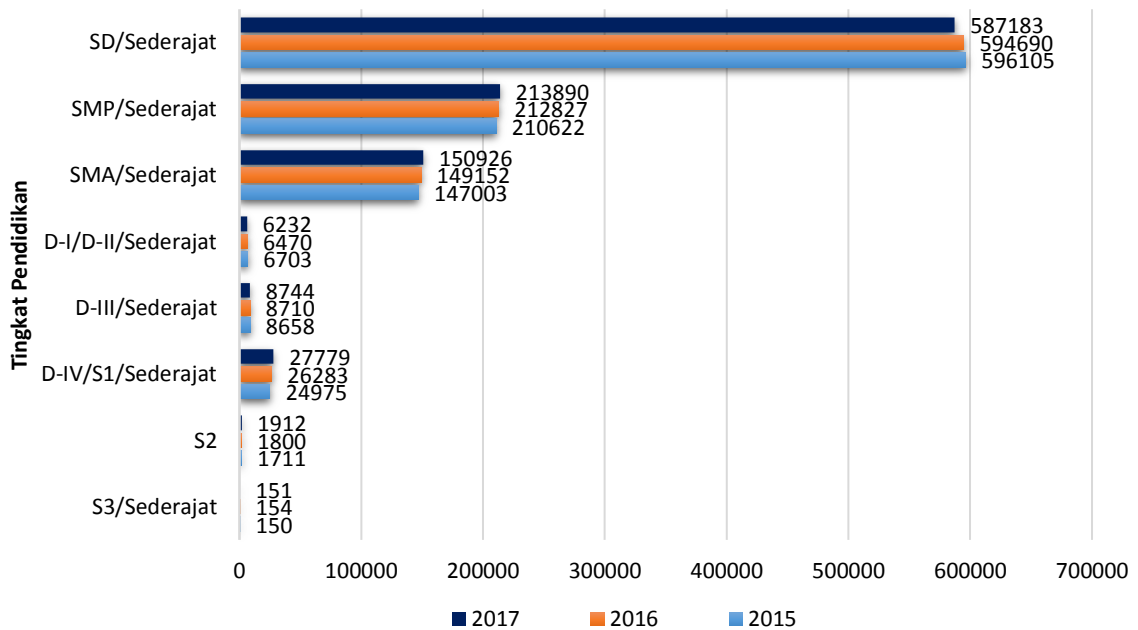


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2017

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa dari tahun 2015 ke tahun 2017 jumlah penduduk dengan kategori pekerjaan buruh tani, petani serta PNS/TNI/Polri mengalami penurunan, sedangkan penduduk dengan pekerjaan wiraswasta mengalami peningkatan dari 113.397 orang menjadi 116.678 orang.

Dari aspek kualitas tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 1.4
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015-2017



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2017

Dari grafik di atas diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat 41,90 % penduduk (587.183 orang) yang memiliki ijazah tertinggi SD/ sederajat, 15,26 % penduduk (213.890 orang) memiliki ijazah tertinggi SMP/ sederajat, 10,77 % penduduk (150.926 orang) memiliki ijazah tertinggi SMA/ sederajat, 0,44 % penduduk (6.232 orang) memiliki ijazah tertinggi DI/DII/ sederajat, 0,62 % penduduk (8.744 orang) memiliki ijazah tertinggi DIII/ sederajat, 1,98 % penduduk (27.779 orang) memiliki ijazah tertinggi DIV/ sederajat dan S-1, 0,14 % penduduk (1.912 orang) memiliki ijazah tertinggi S2, serta 0,01 % penduduk (151 orang) memiliki ijazah tertinggi S3.

Selama periode tahun 2015-2017, penduduk yang memiliki ijazah tertinggi SD/ sederajat dan D-I/D-II/ sederajat mengalami penurunan, sedangkan penduduk yang memiliki ijazah SMP, SMA, D-III, D-IV/S-1 dan S-2 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Ciamis terhadap pentingnya pendidikan semakin meningkat.

1.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu pengukuran yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, antara lain umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Oleh karena itu IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

IPM pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Dalam perkembangannya, pada tahun 2010, UNDP telah merubah metode perhitungan IPM yang kemudian direvisi kembali pada tahun 2011. Berikut ini alasan yang dijadikan dasar perubahan metode penghitungan IPM tersebut :

- a. Beberapa indikator sudah tidak tepat digunakan dalam penghitungan IPM.
 - Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
 - PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- b. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, berikut ini beberapa perubahan pada metode perhitungan IPM:

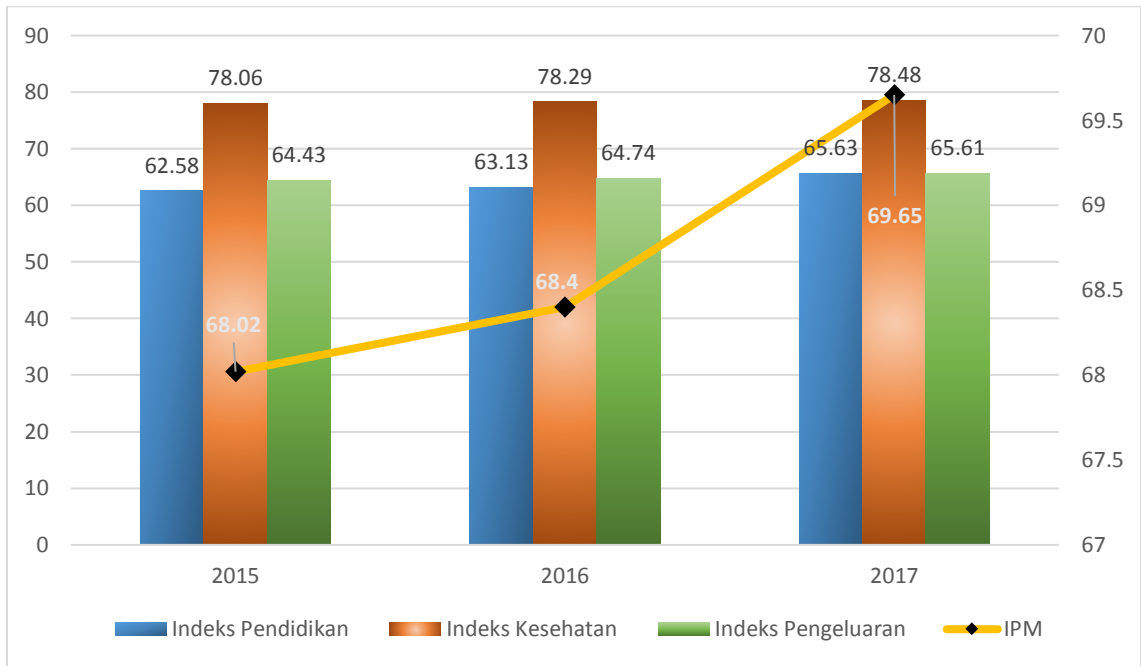
- a. Penggunaan Indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).
 - Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah dalam perhitungan Indeks Pendidikan, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
 - Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- b. Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Tabel 1.3
Perkembangan IPM Di Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017

Aspek IPM	Tahun		
	2015	2016	2017
Skor IPM	68,02	68,40	69,29
1. Indeks Pendidikan	62,58	63,13	65,48
a. Angka Harapan Lama Sekolah (th)	13,59	13,62	13,99
b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (th)	7,45	7,59	8,03
2. Indeks Kesehatan	78,06	78,29	78,48
• AHH(th)	70,74	70,89	71,01
3. Indeks Pengeluaran	64,43	64,74	64,39
• Daya Beli Masyarakat (Rp.)	8.295.757	8.382.032	8.622.597

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis (diolah)

Grafik 1.5
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Di Kabupaten Ciamis Berdasarkan Metode Baru Tahun 2015-2017



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

Grafik 1.5 memberikan gambaran bahwa IPM Kabupaten Ciamis, yang setiap tahun menunjukkan peningkatan kecuali pada aspek indeks pengeluaran (daya beli). Perhitungan IPM menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 meningkat 1,25 poin dibandingkan dengan tahun 2016 dan meningkat 1,63 poin dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan IPM ini didasari oleh peningkatan indeks parsial pembentuk IPM itu sendiri, yakni Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran.

Peningkatan Indeks Pendidikan di Kabupaten Ciamis ditunjang oleh upaya pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Kondisi ini ditunjukkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Demikian pula dengan peningkatan Indeks Kesehatan ditunjang oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk yakni dengan meningkatkan ketersediaan dan

keterjangkauan sarana dan fasilitas kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanannya. Kondisi ini juga didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat dan penggunaan fasilitas kesehatan secara optimal. Meningkatnya Indeks Kesehatan ini ditunjukkan dengan Angka Harapan Hidup (AHH).

1.2.4 Perekonomian

1.2.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan perekonomian daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB, baik PDRB Atas dasar Harga Berlaku (AdHB) maupun Atas dasar Harga Konstan (AdHK). PDRB AdHB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB AdHB menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian dari suatu daerah, sementara PDRB AdHK berguna untuk menunjukkan LPE secara keseluruhan maupun sektoral (lapangan usaha) dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar. Sedangkan kualitas perkembangan suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Nilai dan kontribusi berdasarkan lapangan usaha PDRB AdHB Tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 1.4
PDRB AdHB Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah)

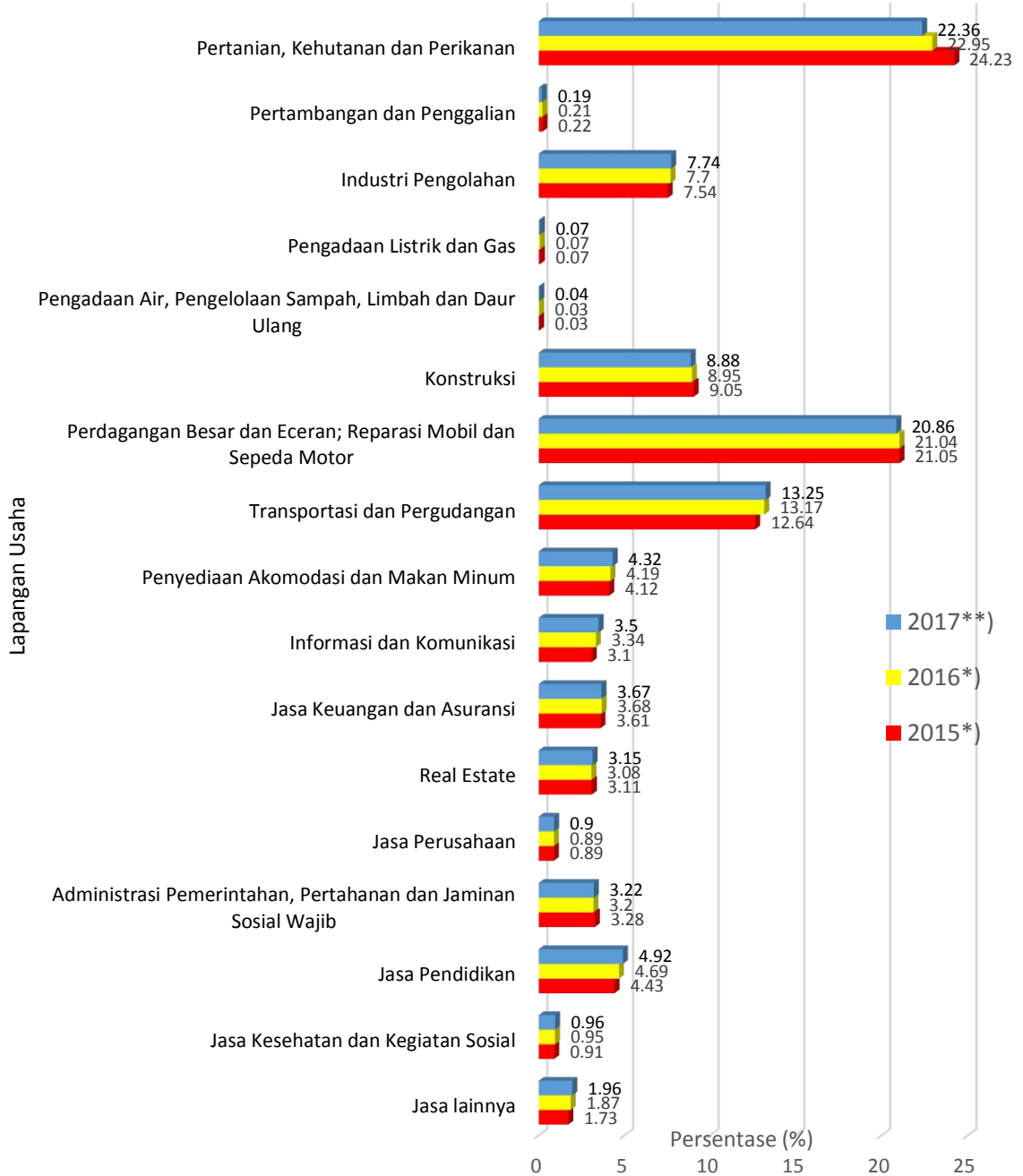
Kategori	Lapangan Usaha	PRDB AdHB (Juta Rp)		
		2015*)	2016*)	2017**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.414.283,9	5.502.719,2	5.714.186,6
B	Pertambangan dan Penggalian	48.574,0	49.376,9	49.662,2

Kategori	Lapangan Usaha	PRDB AdHB (Juta Rp)		
		2015*)	2016*)	2017**)
C	Industri Pengolahan	1.685.387,3	1.846.253,9	1.977.739,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.533,1	17.624,4	17.088,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.306,0	8.018,7	9.362,1
F	Konstruksi	2.022.627,0	2.145.389,6	2.270.256,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.702.826,3	5.045.888,2	5.332.722,9
H	Transportasi dan Pergudangan	2.824.079,9	3.159.023,5	3.386.752,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	920.532,9	1.005.183,6	1.104.802,0
J	Informasi dan Komunikasi	692.096,6	800.207,0	893.374,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	805.947,9	881.353,7	938.967,4
L	Real Estate	693.791,5	737.989,7	805.073,1
M,N	Jasa Perusahaan	198.277,5	214.600,1	230.930,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	733.859,6	767.791,8	824.003,5
P	Jasa Pendidikan	989.389,1	1.125.604,9	1.256.875,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	203.781,0	226.709,2	246.211,9
R,S,T,U	Jasa lainnya	385.575,2	448.304,3	501.368,7
PDRB AdHB		22.343.868,6	22.982.038,5	25.559.338,2

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2017

*) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Grafik 1.6
Distribusi Persentase PDRB AdHB
Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis (2017) , diolah
Keterangan :*) Angka Perbaikan , **) Angka Sementara

Berdasarkan data pada tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor unggulan Kabupaten Ciamis. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berdasarkan harga berlaku pada tahun 2017 terhadap perekonomian Kabupaten Ciamis, yaitu sebesar 22,36 %. Perkembangan sektor ini pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang berkontribusi sebesar 24,95 % dan 2015 yang berkontribusi sebesar 24,23 %. Kontribusi sektor perekonomian terbesar kedua berdasarkan harga berlaku pada tahun 2017 adalah sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor yang memberikan kontribusi sebesar 20,86 %. Perkembangan sektor ini pada tahun 2017 mengalami penurunan juga jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang berkontribusi sebesar 21,04 % dan tahun 2015 yang berkontribusi sebesar 21,05 %. Kontribusi sektor terbesar ketiga berdasarkan harga berlaku pada tahun 2017 adalah sektor transportasi dan pergudangan yang memberikan kontribusi sebesar 13,25 %. Perkembangan sektor ini pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yang berkontribusi sebesar 13,17 % dan tahun 2015 yang berkontribusi sebesar 12,64 %.

Dilihat dari strukturnya, perekonomian Kabupaten Ciamis pada dasarnya ditunjang oleh 3 (tiga) sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor transportasi dan pergudangan. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 56,47 % dari total PDRB Kabupaten Ciamis tahun 2017, sebesar 57,16 % pada tahun 2016 dan sebesar 57,92 % pada tahun 2015.

Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Konstan (PDRB AdHK) menunjukkan adanya peningkatan dari sebesar Rp. 17,6 trilyun pada tahun 2015, Rp. 18,5 trilyun pada tahun 2016 dan Rp. 19,5 trilyun pada tahun 2017. Gambaran PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan tahun 2015-2017 sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.5
PDRB AdHK Kabupaten Ciamis
Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah)

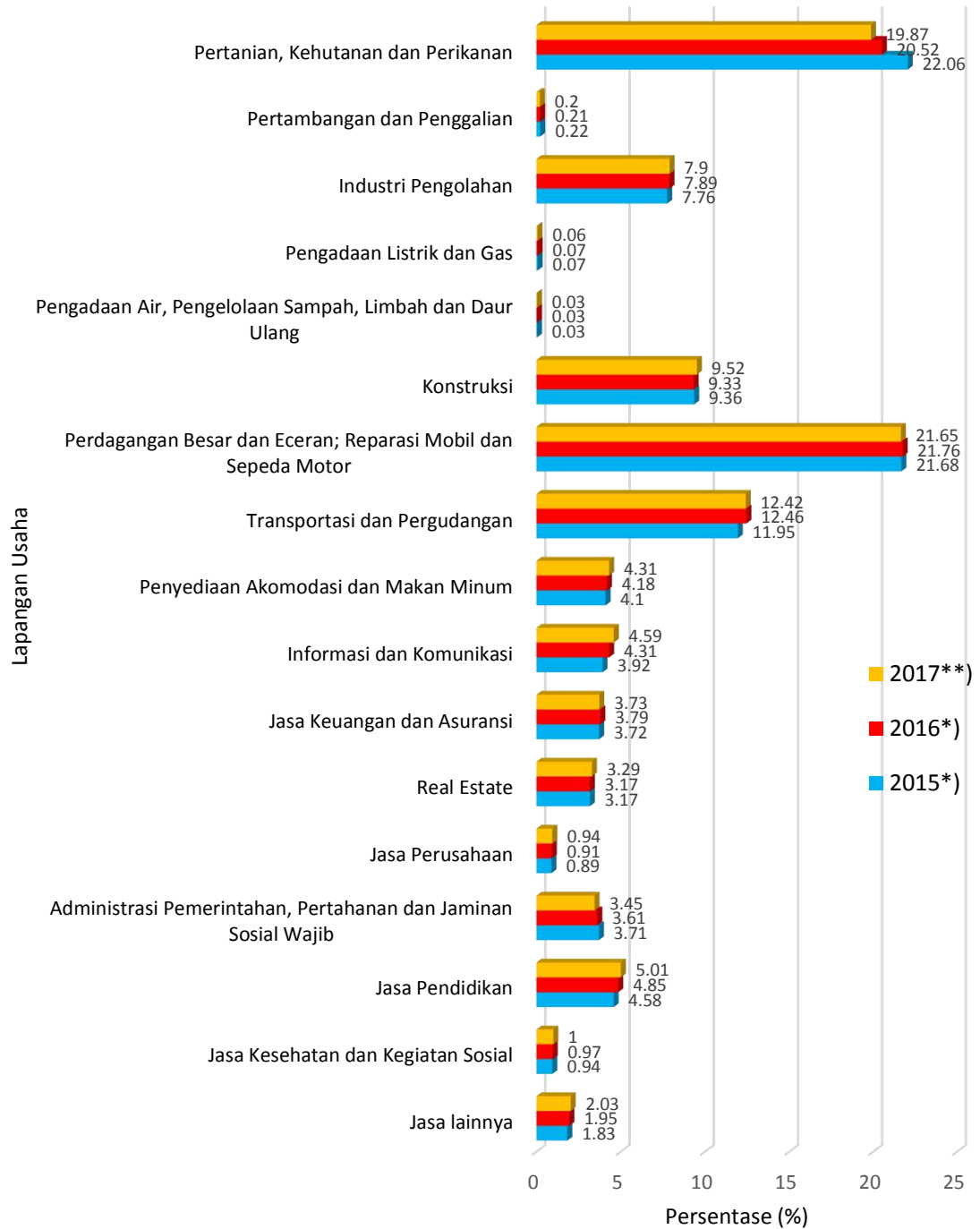
Kategori	Lapangan Usaha	PRDB AdHK (Juta Rp)		
		2015*)	2016*)	2017**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.901.247,7	3.811.031,9	3.876.042,1
B	Pertambangan dan Penggalian	38.449,1	38.777,1	38.145,6
C	Industri Pengolahan	1.372.131,8	1.465.644,6	1.540.949,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12.524,8	12.622,4	11.911,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.026,4	6.100,4	6.596,4
F	Konstruksi	1.656.144,2	1.732.544,2	1.857.811,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.834.490,4	4.042.219,3	4.225.006,1
H	Transportasi dan Pergudangan	2.113.382,8	2.313.542,4	2.422.831,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	725.629,6	775.937,8	840.786,6
J	Informasi dan Komunikasi	693.647,7	800.601,4	895.274,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	658.058,1	703.200,5	727.479,1
L	Real Estate	559.972,3	588.161,3	642.711,9
M,N	Jasa Perusahaan	157.842,1	169.078,9	183.301,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	656.479,7	671.195,2	672.297,4
P	Jasa Pendidikan	810.202,9	900.632,0	978.480,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166.058,3	180.636,4	195.624,2
R,S,T,U	Jasa lainnya	323.970,7	361.440,9	396.654,6
PDRB atas Dasar Harga Konstan		17.685.758,3	18.573.366,9	19.511.904,4

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2017

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

Grafik 1.7
Distribusi Persentase PDRB AdHK
Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis (2017) , diolah

Keterangan : *) Angka Perbaikan,

***) Angka Sementara

Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa distribusi PDRB AdHK Kabupaten Ciamis Tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar 53,94 %. Pada tahun 2017 cenderung menunjukkan penurunan jika dibandingkan kontribusi pada tahun 2016 sebesar 54,74 % dan tahun 2015 sebesar 55,69 %. Penurunan besarnya kontribusi ini diduga terjadi karena adanya peningkatan kontribusi di sektor lain dengan jumlah yang relatif lebih besar.

1.2.4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 diproyeksikan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan LPE tahun 2016. LPE tahun 2017 diproyeksikan sebesar 5,05 % sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 sebesar 5,02 % dan tahun 2015 sebesar 5,01 %. LPE Kabupaten Ciamis tahun 2015-2017 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.6
LPE Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017

Kategori	Lapangan Usaha	LPE (%)		
		2015*)	2016*)	2017**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,43	-2,31	1,71
B	Pertambangan dan Penggalian	0,55	0,85	-1,63
C	Industri Pengolahan	6,00	6,82	5,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,68	0,78	-5,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,21	1,23	8,13
F	Konstruksi	4,58	4,61	7,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,39	5,42	4,52
H	Transportasi dan Pergudangan	9,44	9,47	4,72

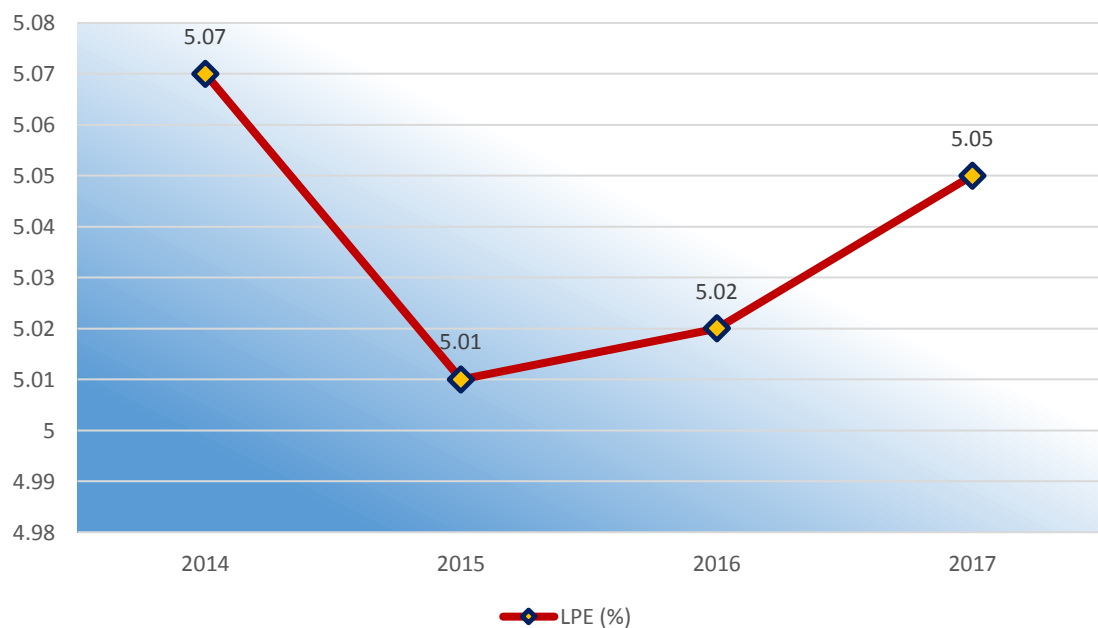
Kategori	Lapangan Usaha	LPE (%)		
		2015*)	2016*)	2017**)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,87	6,93	8,36
J	Informasi dan Komunikasi	15,43	15,47	11,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,85	6,86	3,45
L	Real Estate	5,01	5,03	9,27
M,N	Jasa Perusahaan	7,11	7,12	8,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,23	2,24	0,16
P	Jasa Pendidikan	11,62	11,16	8,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,17	8,78	8,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	11,61	11,63	9,74
Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,01	5,02	5,05

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis (2017)

Keterangan :*) Angka Perbaikan , **) Angka Sementara

Grafik 1.8

Perkembangan LPE Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2017



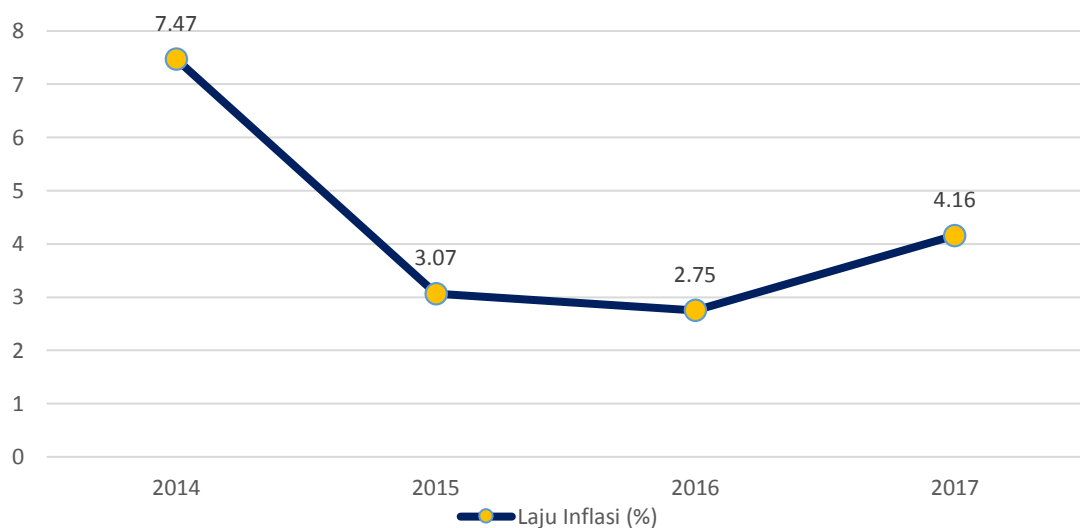
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis (2017)

Berdasarkan data pada tabel grafik tersebut, diketahui bahwa LPE Kabupaten Ciamis tahun 2017 merupakan LPE yang tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian, yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan dengan laju penurunan pada tahun 2015 sebesar -1,43 %, tahun 2016 sebesar -2,31 % dan tahun 2017 sebesar -1,71 %.

1.2.4.3 Inflasi

Laju Inflasi Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 diproyeksikan tergolong inflasi ringan atau inflasi merayap (*creeping inflation*) yang masih wajar dan belum mengganggu perekonomian secara menyeluruh, yaitu mencapai 4,16 %. Angka tersebut relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 2,75 % dan tahun 2015 yang mencapai 3,07 %. Pada tahap inflasi ringan diyakini dapat mendorong peningkatan pendapatan nasional. Perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Ciamis tahun 2014-2017 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Grafik 1.9
Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2017



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis (2017)

Pemicu tingginya nilai inflasi di Kabupaten Ciamis pada tahun 2017, dipengaruhi oleh kelompok bahan makanan sebesar 0,346% yang bersumber dari kelompok telur ayam ras, susu dan hasil olahannya serta tingginya konsumsi telur oleh masyarakat sehingga mendongkrak angka inflasi

1.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam kerangka penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Ciamis perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Perumusan permasalahan pembangunan pada penyelenggaraann urusan wajib dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah. Rumusan permasalahan pembangunan inilah yang menjadi dasar penyusunan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ciamis ke depan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

1. Kualitas dan kesempatan pendidikan;

2. Aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat;
3. Daya beli masyarakat;
4. Ketahanan pangan;
5. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan;
6. Kemitraan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan;
7. Iklim usaha;
8. Fasilitasi dan pembinaan pelaku UKM;
9. Pengembangan destinasi wisata;
10. Pemberdayaan masyarakat;
11. Penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
12. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dan perdesaan;
13. Kapasitas keuangan daerah;
14. Optimalisasi kinerja pemerintah daerah dan desa;
15. Kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Berbagai isu strategis tersebut dipertimbangkan dengan memperhatikan identifikasi permasalahan Kabupaten Ciamis, isu dunia internasional serta penelaahan kebijakan pembangunan nasional (Nawacita) dan daerah lain di sekitar Kabupaten Ciamis agar dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

1.4 KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Ciamis mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kewenangan Daerah kabupaten/kota meliputi 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan Wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan seluruh urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pada tahun 2017 pembentukan struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis. Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis terdiri dari:

1. Bupati dan Wakil Bupati Ciamis;
2. Sekretariat Daerah;
 - a. Asisten Pemerintahan:
 - 1) Bagian Pemerintahan Umum :
 - a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - c) Sub Bagian Kerjasama Daerah.
 - 2) Bagian Hukum dan HAM:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Perundang-undangan;

- b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
- 3) Bagian Organisasi :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah.
- b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat :
 - 1) Bagian Perekonomian :
 - a) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Bina Sarana Produksi;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan BUMD.
 - 2) Bagian Pembangunan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat :
 - a) Sub Bagian Pelayanan Sosial;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Sosial;
 - c) Sub Bagian Bina Kemasyarakatan.
- c. Asisten Administrasi Umum :
 - 1) Bagian Umum :
 - a) Sub Bagian Kesekretariatan;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 2) Bagian Keuangan :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3) Bagian Hubungan Masyarakat :
 - a) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi;
 - b) Sub Bagian Protokol;
 - c) Sub Bagian Layanan Informasi.

3. Sekretariat DPRD
4. Inspektorat
5. Dinas daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial,
 - d. Dinas Tenaga Kerja;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - h. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - i. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan;
 - j. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - k. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - l. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - o. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - p. Dinas Perhubungan;
 - q. Dinas Pariwisata;
 - r. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - s. Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Badan Daerah, terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
7. Perangkat Daerah Lain :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah.

8. Kecamatan
9. Staf Ahli, terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bidang Administrasi Dan Sumber Daya Manusia.

Secara fungsional landasan pemikiran pembentukan perangkat daerah didahului dengan kegiatan pengkajian dan analisis terhadap:

1. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki atau yang telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah;
2. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
3. Intensitas beban tiap-tiap urusan pemerintahan;
4. Kemampuan keuangan daerah;
5. Ketersediaan sumber daya aparatur;
6. Efektifitas dan Efisiensi.

Sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, dibentuk Tim Evaluasi Kelembagaan dan secara berkesinambungan diadakan evaluasi, baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pembangunan sistem. Melalui evaluasi tersebut diharapkan dapat terbentuk kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penyusunan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Nomor 53 Tahun 2014, serta mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yang diselaraskan dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017, serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017.

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

2.1.1 Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki serta mempertimbangkan kesinambungan pembangunan sesuai tahapan pembangunan jangka panjang daerah, maka Visi Pembangunan Daerah

Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 adalah "Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019". Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

- Maju Berkualitas : Bahwa pembangunan Kabupaten Ciamis yang saat ini telah memberikan perubahan ke tingkat kemajuan berdasarkan perkembangan indikator makro pembangunan, diperlukan penguatan agar tidak hanya sekedar kemajuan melainkan kemajuan yang lebih berkualitas. Oleh karenanya pembangunan daerah kedepan harus dirancang sedemikian rupa sehinggasecara efektif harus berdampak terhadap pertumbuhan yang tinggi, percepatan penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan berusaha dengan tetap menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup guna pembangunan berkelanjutan. Hasil-hasil pembangunanjuga tidak hanya sekedar kuantitatif tetapi ke depan lebih ditekankan pada kualitas.
- Kemandirian : Kabupaten Ciamis ke depan harus diarahkan untuk dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki guna terwujudnya kemandirian, baik kemandirian sosial, politik maupun ekonomi.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud, merupakan visi yang selaras dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yaitu "Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025". Kriteria capaian Visi Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, secara jelas direfleksikan pada Visi “Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

2.1.2 Misi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pembangunan yang menekankan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat agar lebih produktif serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera.
- Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat
Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Ciamis yang prima dan menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang profesional.
- Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- Misi 4 : Membangun perekonomian daerah yang tangguh
 Pembangun ekonomi daerah yang berbasiskanekonomi kerakyatan dengan seluruh kekuatan sumber daya daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari semua sektor dan meningkatkan daya saing daerah dengan tetap menjaga keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
- Misi 5 : Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan
 Meningkatkan kemampuan pemerintah desa melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada pemerintahan desa, sesuai dengan semangat otonomi desa, baik dalam menentukan nasibnya sendiri, maupun dalam pengambilankeputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan untuk menyusun dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang ingin diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Adapun tujuan dan sasaran setiap Misi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 Setelah di Reviu

Misi		Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1	Membangun sumber daya manusia yang terdidik	1.1.1	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas
				1.1.2	Meningkatnya budaya dan minat baca

Misi		Tujuan		Sasaran	
		1.2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1.2.1	Meningkatnya layanan kesehatan
				1.2.2	Meningkatnya kesehatan lingkungan
		1.3	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	1.3.1	Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk
		1.4	Meningkatkannya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	1.4.1	Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan
				1.4.2	Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan
		1.5	Meningkatkan prestasi olahraga serta pengembangan dan pelestarian seni & budaya daerah	1.5.1	Meningkatnya prestasi olahraga.
				1.5.2	Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat.
		1.6	Meningkatkan kerukunan hidup beragama	1.6.1	Pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari.
				1.6.2	mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama
		1.7	Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial	1.7.1	Menurunnya tingkat kemiskinan.
				1.7.2	Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan.
				1.7.3	Menurunnya PMKS.
		2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan	2.1	Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah

Misi		Tujuan		Sasaran	
yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat		2.2	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	2.1.2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
				2.2.1	Meningkatnya transparansi.
				2.2.2	Meningkatnya pelayanan masyarakat.
		2.3	Meningkatnya kesadaran politik dan demokrasi	2.2.3	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.
				2.3.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat & berpolitik
				2.4.1	Meningkatnya Kesadaran Hukum masyarakat.
		2.4	Meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta stabilitas keamanan dan ketertiban umum	2.4.2	Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM).
				2.4.3	Terkendalnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
				2.5.1	Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi
		2.5	Meningkatkan hubungan kerjasama kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha (perindustrian dan perdagangan) dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan pembangunan daerah		
3.	Meningkatkan ketersediaan & kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	3.1	Menyediakan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial & budaya serta meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	3.1.1	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi
				3.1.2	Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air

Misi		Tujuan		Sasaran	
				3.1.3	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
				3.1.4	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang
				3.1.5	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan
				3.1.6	Meningkatnya RTH yang dikelola Pemerintah
				3.1.7	Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat
				3.1.8	Meningkatnya kualitas penataan ruang
4	Membangun perekonomian daerah yang tangguh	4.1	Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah	4.1.1	Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat
				4.1.2	Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal
				4.1.3	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah
				4.1.4	Terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal
				4.1.5	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perekonomian masyarakat

Misi		Tujuan		Sasaran	
		4.2	Meningkatkan daya beli masyarakat	4.2.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan
		4.3	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan	4.3.1	Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan
				4.3.2	Meningkatkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian , peternakan, perikanan dan kehutanan
				4.3.3	Berkembangnya berbagai aktivitas <i>off farm</i> untuk meningkatkan penghasilan petani
4.4	Meningkatkan ketahanan pangan	4.4.1	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan		
5.	Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan	5.1	Meningkatkan layanan pemerintah desa kepada masyarakat	5.1.1	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD.
				5.1.2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.
				5.1.2	Menurunnya jumlah desa tertinggal.
		5.2	Mewujudkan kemandirian masyarakat desa	5.2.1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa.
				5.2.2	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.
					5.2.3

2.2 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

2.2.1 Prioritas Daerah

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada pencapaian target RPJMD tahap ketiga dalam RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025.

Prioritas pembangunan daerah merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2017 adalah:

1. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas;
 - b. Meningkatnya budaya dan minat baca.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatnya layanan kesehatan;
 - b. Meningkatnya kesehatan lingkungan.
3. Pengembangan pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan;
 - b. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
 - c. Berkembangnya berbagai aktifitas *off-farm* untuk meningkatkan penghasilan petani;
 - d. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sitem informasi dan kelembagaan pangan.

4. Pengembangan pariwisata dan dunia usaha, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat;
 - b. Meningkatnya peran Koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non-Perbankan termasuk lembaga syariah dalam pengembangan perekonomian masyarakat;
 - c. Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal;
 - d. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah;
 - e. Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal;
 - f. Terwujudnya sarana prasarana perekonomian masyarakat;
 - g. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan.
5. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan ketenagakerjaan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Menurunnya tingkat kemiskinan;
 - b. Menurunnya PMKS;
6. Pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender serta pemuda dan olahraga, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk;
 - b. Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan;
 - c. Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan;
 - d. Meningkatnya prestasi olahraga;
 - e. Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan.
7. Penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- b. Meningkatnya RTH yang dikelola pemerintah;
 - c. Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat;
 - d. Meningkatkan kualitas penataan ruang.
8. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi;
 - b. Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air;
 - c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman;
 - d. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistirikan dan pembinaan usaha tambang.
9. Meningkatkan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur;
 - b. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi;
 - c. Meningkatnya transparansi;
 - d. Meningkatnya pelayanan masyarakat;
 - e. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan;
 - f. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik.
 - g. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat;
 - h. Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - i. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - j. Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat, dunia usaha (perindustrian dan perdagangan) serta lembaga pendidikan.

10. Pembangunan Perdesaan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD;
 - b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - c. Menurunnya jumlah desa tertinggal;
 - d. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
 - e. Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa;
 - f. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

Prioritas pembangunan tahun 2017 tersebut disusun berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2016 serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2017. Dalam prioritas ini juga memperhatikan kebijakan dan isu pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis.

1. Kebijakan Nasional

- a. Nawacita

- (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
 - (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
 - (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa Dalam kerangka negara kesatuan;
 - (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
 - (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia;
 - (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

- (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi Domestik;
 - (8) Melakukan revolusi karakter bangsa;
 - (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia.
- b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan - *Sustainable Development Goals* (SDG's)
- (1) Tidak ada kemiskinan;
 - (2) Tidak ada kelaparan;
 - (3) Kesehatan yang baik;
 - (4) Pendidikan berkualitas;
 - (5) Kesenjangan gender;
 - (6) Air bersih dan sanitasi;
 - (7) Energi terbarukan;
 - (8) Pekerjaan yang baik dan pertumbuhan ekonomi;
 - (9) Inovasi dan infrastruktur;
 - (10) Berkurangnya ketidakesetaraan;
 - (11) Kota dan masyarakat berkelanjutan;
 - (12) Konsumsi yang bertanggungjawab;
 - (13) Aksi iklim;
 - (14) Kehidupan di bawah air;
 - (15) Kehidupan di darat;
 - (16) Perdamaian dan keadilan;
 - (17) Kemitraan untuk tujuan.
- c. Bentuk Kerjasama dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Peningkatan Kapasitas;
 - (2) Pengakuan Kualifikasi Profesional;

- (3) Konsultasi Lebih Dekat Pada Kebijakan Makro Ekonomi Dan Keuangan;
- (4) Langkah-Langkah Pembiayaan Perdagangan;
- (5) Meningkatkan Infrastruktur;
- (6) Pengembangan Transaksi Elektronik Melalui E-Asean;
- (7) Mengintegrasikan Industri Di Seluruh Wilayah Untuk Mempromosikan Sumber Daerah;
- (8) Meningkatkan Keterlibatan Sektor Swasta Untuk Membangun Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

d. Mendukung Empat Pilar Strategi Pembangunan Sosial Ekonomi

- (1) *Pro Poor*;
- (2) *Pro Job*;
- (3) *Pro Growth*;
- (4) *Pro Environment*.

2. Kebijakan Provinsi Jawa Barat

a. Janji Gubernur

- (1) Pendidikan Gratis SD, SLTP dan SLTA di Seluruh Jawa Barat;
- (2) Beasiswa pendidikan untuk Pemuda, Tenaga Medis, serta Keluarga Atlit Berprestasi dan Guru;
- (3) Revitaliasi posyandu dan dana Operasional Kader Posyandu;
- (4) Membuka 2 Juta Lapangan Kerja Baru dan Mencetak 100.000 Wirausahawan Baru Jawa Barat;
- (5) Alokasi 4 triliyun Untuk Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
- (6) Rehabilitasi 100.000 Rumah rakyat Miskin;
- (7) Pembangunan Pusat Seni Dan Budaya Jawa Barat Di Kabupaten/ Kota;
- (8) Pembangunan Gelanggang Olahraga di kabupaten/ Kota.

b. *Common Goal* (CG)

- (1) Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan;
- (2) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan;
- (3) Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku;
- (4) Ekonomi Pertanian;
- (5) Ekonomi Non Pertanian;
- (6) Pengelolaan Hidup dan Kebencanaan;
- (7) Pengelolaan Seni, Budaya, Wisata serta Kepemudaan;
- (8) Ketahanan Keluarga dan Kependudukan;
- (9) Kemiskinan, PMKS dan Keamanan;
- (10) Pemerintahan.

c. Tematik Kewilayahan

- (1) Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor;
- (2) Pengembangan Kluster Unggas, Perikanan Budidaya Air Tawar dan Tankap, Serta Ternak Sapi Perah, Sapi Potong, Domba Garut, Kambing dan Jejaringnya serta Pengembangan Sentra Produksi Pakan Ternak;
- (3) Pengembangan Produksi Tanaman Industri(Kopi, The, Kakao, Karet Dam Atsiri) dan Holtikultura (Sayuran, Buah-Buahan, Tanaman Hias) Yang Berorientasi Ekspor;
- (4) Pengembangan Jasa Perdagangan, Industri Kreatif dan Pariwisata;
- (5) Pembangunan Wilayah Desa dan Kecamatan Pebatasan antar Provinsi.

3. Kebijakan Kabupaten Ciamis

a. Janji Bupati

- (1) Revitalisasi pembangunan sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan;

- (2) Pengembangan wisata, kesenian dan olah raga. termasuk membangun gedung kesenian;
- (3) Anggaran sebesar Rp. 5 miliar bantuan rehab rumah tak layak huni;
- (4) Anggaran sebesar Rp. 50 miliar untuk pengaspalan (hot mix);
- (5) Anggaran sebesar Rp. 15 miliar pembangunan dan rehabilitasi irigasi;
- (6) Anggaran sebesar Rp. 28 miliar untuk bantuan aspal dan semen untuk perbaikan jalan desa;
- (7) Bantuan pemasangan listrik baru bagi keluarga tidak mampu;
- (8) Pengembangan dan pengendalian lingkungan hidup;
- (9) Penataan ibu kota kabupaten dan kota kecamatan;
- (10) Anggaran sebesar Rp. 15 miliar bantuan pemberdayaan usaha bagi warga tak mampu;
- (11) Penanggulangan pengangguran melalui pelatihan usaha, kerja dan peningkatan keterampilan;
- (12) Membangun unit pelayanan penanggulangan kemiskinan;
- (13) Anggaran sebesar Rp. 20 miliar bantuan pelayanan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas / Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) bagi masyarakat tidak mampu;
- (14) Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Ciamis;
- (15) Anggaran sebesar Rp. 12 miliar untuk pengembangan 10 puskesmas rawat inap;
- (16) Anggaran sebesar Rp. 9 miliar bantuan pendidikan ke SLTA (penuntasan wajib belajar 12 tahun);
- (17) Anggaran sebesar Rp. 1 miliar penanggulangan siswa drop out;
- (18) Perbaikan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, ketua Rukun Warga (RW) dan ketua Rukun Tetangga (RT);

- (19) Anggaran sebesar Rp. 15 miliar untuk peningkatan pendidikan keagamaan, bantuan kesejahteraan/ insentif guru madrasah, RA, TKA, TPA dan DKM, bantuan pesantren dan madrasah;
- (20) Revitalisasi posyandu Rp. 1 miliar;
- (21) Reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik;
- (22) Penyelesaian masalah pertanahan.

Secara umum dapat dicermati bahwa janji-janji tersebut sangat positif dan bermanfaat bagi kesejahteraan warga Ciamis. Ada keinginan yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Ciamis, terutama terkait dimensi pendidikan dan kesehatan serta persoalan infrastruktur. Selain itu, janji-janji tersebut juga secara implisit terkandung maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga Ciamis selanjutnya menjadi pembentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan selain ukuran-ukuran keberhasilan pendukung lainnya.

b. Pembangunan di Wilayah perbatasan

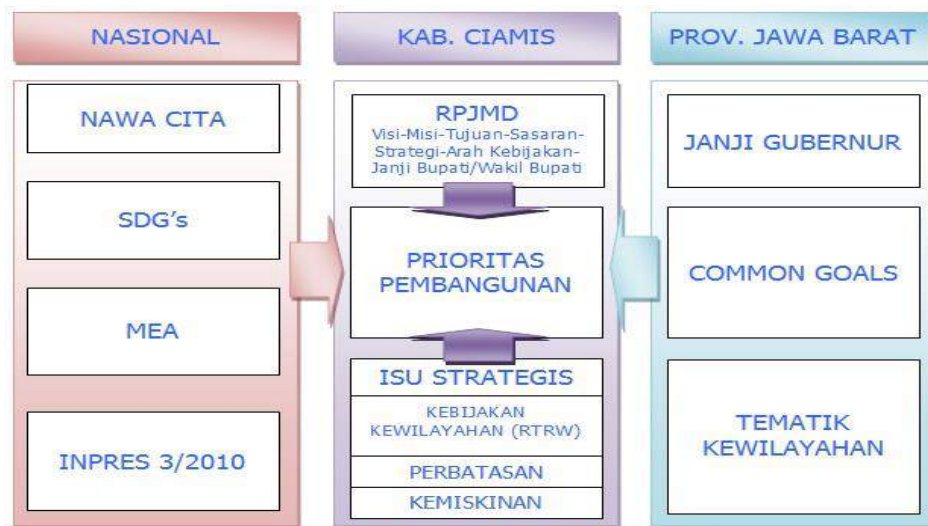
- (1) Pendidikan;
- (2) Kesehatan;
- (3) Perekonomian;
- (4) Infrastruktur;
- (5) Pemerintahan.

c. Pengentasan Kemiskinan

- (1) Pendidikan;
- (2) Kesehatan;
- (3) Ketenagakerjaan;
- (4) Perasarana Dasar;
- (5) ketahanan Pangan.

Keterkaitan kebijakan pembangunan Kabupaten Ciamis dengan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional



2.2.2 Program Prioritas

Prioritas pembangunan dan program pembangunan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017 adalah sebagaimana pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2017

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
1.	Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Non Formal dan Informal

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
			Program Pendidikan Menengah
		Meningkatnya budaya dan minat baca	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
2.	Peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan	Meningkatnya layanan kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat
			Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit
			Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Meningkatnya kesehatan lingkungan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
			Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3.	Pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender serta pemuda dan olahraga	Memertahankan laju pertumbuhan penduduk	Program Keluarga Berencana
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
			Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling
		Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan	Program Pembinaan Kepemudaan
			Pogram Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
		Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
Meningkatnya prestasi olahraga.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		
	Program Pembinaan Olahraga		
4.	Pengembangan pariwisata dan dunis usaha	Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
			Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
		Pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari.	Program koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan keagamaan
		mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
5.	Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan	Menurunnya tingkat kemiskinan.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
			Program Pengembangan kapasitas calon transmigran

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			Program Transmigrasi Regional
6.	Pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender serta pemuda dan olahraga	Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan.	<p>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</p> <p>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</p> <p>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</p>
7.	Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan	Menurunnya PMKS.	<p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya</p> <p>Program Layanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>Program Pembinaan Anak Terlantar</p> <p>Program Pembinaan Panti Asuhan atau Panti jompo</p> <p>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <p>program pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam</p>
8.	Meningkatkan kinerja aparatur dan tata kelola pemerintah daerah	<p>Meningkatnya kualitas SDM aparat</p> <p>Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi</p>	<p>Program Pendidikan Kedinasan</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS</p> <p>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (kearsipan)</p> <p>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</p>

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
			Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
			program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
			Program pengembangan data/informasi
			Program Kerjasama Pembanguna
			program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Penataan Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
			Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
			Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH
			Program Penataan Daerah Otonomi Baru
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
			Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			Program Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan
			program penataan daerah otonom
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
			Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
			Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian
			Program Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Daerah
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah
		Meningkatnya transparansi.	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
			Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
		Meningkatnya pelayanan masyarakat.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan perangkat daerah
		Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.	Program Penataan Administrasi Kependudukan
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik.	Program Pendidikan Politik Masyarakat
		Meningkatnya Kesadaran Hukum masyarakat.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan		
		Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM)	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		
		Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		
		Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat, dunia usaha (perindustrian dan perdagangan) dan lembaga pendidikan	Program peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		
			Program Kerjasama pembangunan		
		9.	Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi	Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			
		Program pembangunan turap/talud/ bronjong			
		Program pembangunan sistem informasi /Database jalan dan jembatan			
Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan					
Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh					
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas					
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan					
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ					

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
			Program peningkatan pelayanan angkutan
		Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
			Program pengendalian banjir
		Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
			Program Lingkungan sehat perumahan
			Program pengembangan sumber daya mineral dan air tanah
			Program pembangunan jalan lingkungan permukiman perkotaan
			Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
			Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
		Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
			Program pembinaan dan Pengembangan bidang energi
			Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
10.	Penanggulangan Bencana dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
			Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
			Program rehabilitasi hutan dan lahan
			Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
			Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
		Meningkatnya RTH yang dikelola Pemerintah	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
			Program Pengelolaan Areal Pemakaman
		Meningkatnya RTH yang dikelola Pemerintah	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
			Program Pengelolaan Areal Pemakaman
		Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat	Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
		Meningkatnya kualitas penataan ruang	Program perencanaan tata ruang
			Program pengendalian pemanfaatan ruang
			Program Pemanfaatan ruang
11.	Pengembangan pariwisata dan dunia usaha	Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan termasuk lembaga syariah dalam pengembangan perekonomian rakyat	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
		Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
		Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Program peningkatan kemampuan teknologi industri program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK Program pemanfaatan sumber daya hutan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
		Terwujudnya sarana prasarana perekonomian masyarakat	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program peningkatan kesempatan kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
12.	Pengembangan pertanian, kehutanan dan perikanan	Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
		Meningkatkannya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian/perkebunan Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan Program PSDS dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang aman, sehat, utuh dan halal Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan
		Berkembangnya berbagai aktivitas off farm untuk meningkatkan penghasilan petani	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perkebunan
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Peternakan dan perikanan
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
		Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
13.	Pembangunan Perdesaan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa
			Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintah Desa.
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pedesaan
		Menurunnya jumlah desa tertinggal.	
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pem-bangunan desa.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
		Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
		Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 – 2019.

Indikator Kinerja Utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja instansi yang bersangkutan yaitu :

1. Spesifik;
2. Relevan;
3. Dapat dikuantifikasi dan diukur;
4. Dapat dicapai;
5. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

Berikut adalah indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2017.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	1.1	RLS	Dinas Pendidikan/BPS
		1.2	HLS	Dinas Pendidikan/BPS
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	2.1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Dinas Kesehatan/BPS
3	Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk	3.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Dinas P2KBP3A/BPS
4	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Berpolitik/ Kemasyarakatan	4.1	Indeks Development Gender (IDG)	Dinas P2KBP3A/BPS
5	Menurunnya tingkat kemiskinan	5.1	Jumlah Penduduk Miskin	Dinas Sosial/BPS
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	6.1	Penilaian SAKIP	Bagian Organisasi Setda
		6.2	Predikat Penilaian LPPD	Bagian Pemerintahan Umum Setda
		6.3	Opini BPK	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi Setda
8	Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha	8.1	Jumlah Kerjasama	Bagian Pemerintahan Umum Setda
9	Terkendalnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	9.1	Jumlah Kriminalitas	Satuan Polisi Pamong Praja/Kepolisian Resort Ciamis
10	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	10.1	Kemantapan Jalan Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		10.2	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
11	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi	11.1	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Dinas Perhubungan/ Kepolisian Resort Ciamis
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	12.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
13	Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat	13.1	Persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	Meningkatnya kinerja perekonomian	14.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Dinas Komunikasi dan Informatika/BPS
		14.2	Inflasi	Dinas Komunikasi dan Informatika/BPS
		14.3	Tingkat Pengangguran	Dinas Komunikasi dan Informatika/BPS
15	Meningkatnya pendapatan masyarakat	15.1	PDRB Per Kapita (AdHB)	Dinas Komunikasi dan Informatika/BPS
		15.2	Daya Beli Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika/BPS
16	Meningkatnya kesejahteraan petani	16.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Dinas Komunikasi dan Informatika/BPS
17	Menurunnya disparitas pendapatan	17.1	Indeks Gini	Dinas Komunikasi dan Informatika/BPS
18	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan	18.1	Cadangan pangan daerah dan masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		18.2	Stabilitas harga dan pasokan pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		18.3	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19	Meningkatnya jumlah desa swasembada	19.1	Jumlah desa swasembada	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.4 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menyusun dokumen perencanaan tahunan yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017, serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam kurun periode 2017-2019 atau sisa masa RPJMD. Dalam pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya (anggaran) Pemerintah Kabupaten Ciamis, maka sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2017 ditetapkan dengan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja dan menilai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dan indikator kinerja utama yang diprioritaskan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2017, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian sasaran. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2017 seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Setelah di Reviu

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2017	
1	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	1.1	RLS	7,66	Tahun
		1.2	HLS	14,39	Tahun

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2017	
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	2.1	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,50	Tahun
3	Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk	3.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,47	%
4	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Berpolitik/ Kemasyarakatan	4.1	Indeks Development Gender (IDG)	85,20	Poin
5	Menurunnya tingkat kemiskinan	5.1	Jumlah Penduduk Miskin	90.416	Orang
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	6.1	Penilaian SAKIP	B	
		6.2	Predikat Penilaian LPPD	Sangat Tinggi	
		6.3	Opini BPK	WTP	
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	7,91	Poin
8	Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha	8.1	Jumlah Kerjasama	2	Buah
9	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	9.1	Jumlah Kriminalitas	495	Orang
10	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	10.1	Kemantapan Jalan Kabupaten	68,50	%
		10.2	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	29.750	m/ha
11	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi	11.1	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	340	Kasus
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	12.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	69,58	Poin
13	Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat	13.1	Persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material)	7,00	%
14	Meningkatnya kinerja perekonomian	14.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,03	%
		14.2	Inflasi	4,18	%
		14.3	Tingkat Pengangguran	5.26	%
15	Meningkatnya pendapatan masyarakat	15.1	PDRB Per Kapita (AdHB)	21.795.134	Rupiah
		15.2	Daya Beli Masyarakat	8.285.300	Rupiah
16	Meningkatnya kesejahteraan petani	16.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	106,11	Poin

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2017	
17	Menurunnya disparitas pendapatan	17.1	Indeks Gini	0,333	Poin
18	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan	18.1	Cadangan pangan daerah dan masyarakat	97,8	Unit
		18.2	Stabilitas harga dan pasokan pangan	90	%
		18.3	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	100	%
19	Meningkatnya jumlah desa swasembada	19.1	Jumlah desa swasembada	50	Desa

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam memberikan pertanggungjawaban kepada yang memberikan amanah dilaksanakan melalui media penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2017 disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja sasaran berdasarkan target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2016, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017.

Pengukuran kinerja dilakukan melalui tahapan proses pengumpulan data kinerja dari masing-masing SKPD sebagai penyedia data kinerja berdasarkan indikator sasaran serta dari instansi lainnya yang terkait dengan capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis dilakukan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).
2. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

No	Persentase	Predikat
1	< 100 %	Tidak Tercapai
2	= 100%	Tercapai/Sesuai Target
3	> 100 %	Melebihi Target

Adapun interpretasi terhadap predikat capaian kinerja, baik yang tercapai melebihi target (> 100 %), tercapai sesuai target (= 100 %) maupun yang tidak

tercapai (<100 %) dilakukan dengan menggunakan referensi pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan dengan kategori/kriteria sebagai berikut :

No	Persentase Capaian Kinerja	Kategori/Kriteria
1	$\geq 90,00\%$	Sangat Baik
2	75,00% - 89,99%	Baik
3	65,00% - 74,99%	Cukup
4	50,00% - 64,99%	Kurang
5	$\leq 49,99\%$	Sangat Kurang

3. Membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun lalu;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014 - 2019;
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2017 dengan standar nasional (jika ada, Misalnya SPM, target Provinsi, dan lain-lain);
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Analisis capaian kinerja sasaran juga dikaitkan dengan program pembangunan yang mendukung upaya pencapaian sasaran dengan sejumlah anggaran yang telah direalisasikan, beserta capain output dan outcome dari keseluruhan program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran tersebut, sehingga diketahui sejauhmana program yang dilaksanakan telah mendukung pencapaian sasaran secara optimal.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap capaian kinerja sasaran strategis, maka dilakukan pengungkapan, analisis dan penjelasan terhadap setiap indikator kinerja sasaran. Analisis terhadap setiap indikator sasaran diawali dengan penjelasan/definisi operasional serta rumus perhitungan dari masing-masing indikator sasaran guna mengukur realisasi dan capaian kinerja masing-masing indikator sasaran. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara realisasi (capaian nyata) dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta perbandingan dengan target RPJMD. Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja tersebut diungkapkan pula mengenai faktor-faktor yang mendukung/menghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sasaran yang ditetapkan.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan untuk masing-masing sasaran, dalam akuntabilitas keuangan dihitung anggaran per-sasaran sesuai jumlah program yang mendukung upaya pencapaian sasaran tersebut. Dengan adanya penjelasan program pendukung beserta besaran anggaran yang digunakan untuk masing-masing sasaran, akan lebih mudah untuk membuat akuntabilitas keuangan. Dalam akuntabilitas keuangan ini juga dilakukan analisa/penghitungan terhadap tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk setiap sasaran yang menunjukkan capaian kinerja mencapai dan melebihi target sasaran.

3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2017 tentang *Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019*. Penyusunan Indikator Kinerja Utama dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2017 telah ditetapkan sebanyak 19 (sembilan belas) sasaran dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja sasaran. Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten Ciamis memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran yang diukur dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen penyelarasan RPJMD 2014-2019, RKPD Tahun 2017, Indikator Kinerja Utama, maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian target sasaran strategis Tahun 2017. Adapun tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator setiap sasaran, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Tahun 2017
Setelah di Reviu

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melebihi Target (Capaian Kinerja >100%)		Sesuai Target (Capaian Kinerja = 100 %)		Belum Mencapai Target (Capaian Kinerja <100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Misi 1 :								
1.1	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	2	1	50	-	-	1	50
1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	1	100	-	-	-	-
1.3	Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk	1	-	-	1	100	-	-
1.4	Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/ kemasyarakatan	1	-	-	1	100	-	-
1.5	Menurunnya tingkat kemiskinan	1	-	-	-	-	1	100
Misi 2 :								
2.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	3	1	33,33	2	66,67	-	-
2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	-	-	1	100	-	-
2.3	Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha	1	-	-	1	100	-	-

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melebihi Target (Capaian Kinerja >100%)		Sesuai Target (Capaian Kinerja = 100 %)		Belum Mencapai Target (Capaian Kinerja <100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2.4	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	1	1	100	-	-	-	-
Misi 3 :								
3.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	2	-	-	-	-	1	100
3.2	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi	1	-	-	1	100	-	-
3.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	-	-	1	100	-	-
3.4	Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat	1	1	50	1	50	-	-
Misi 4 :								
4.1	Meningkatnya kinerja perekonomian	3	3	100	-	-	-	-
4.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat	2	1	50	-	-	1	50
4.3	Meningkatnya kesejahteraan petani	1	1	100	-	-	-	-
4.4	Menurunnya disparitas pendapatan	1	-	-	-	-	1	100
4.5	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan	3	1	33,33	2	66,67	-	-

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melebihi Target (Capaian Kinerja >100%)		Sesuai Target (Capaian Kinerja = 100 %)		Belum Mencapai Target (Capaian Kinerja <100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Misi 5 :								
5.1	Meningkatnya jumlah desa swasembada	1	1	100	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, maka rekapitulasi tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator setiap sasaran yang dikelompokan menurut misi adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Tingkat Pencapaian Target Sasaran
Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran pada Masing-Masing Misi Tahun 2017

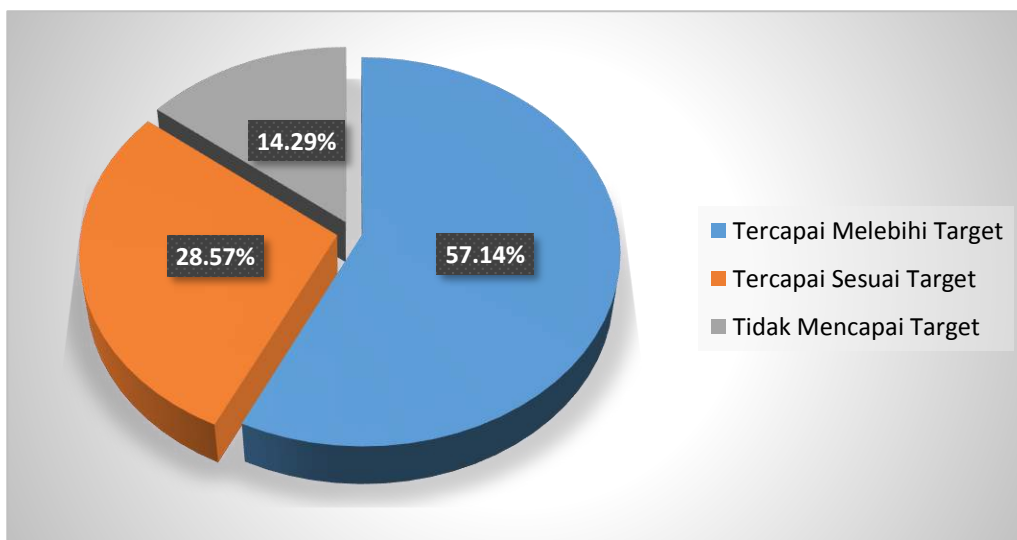
No	Misi	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi Target		Mencapai/ Sesuai Target		Tidak Mencapai Target	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	5	6	2	33,33	2	33,33	2	33,33
2	Misi 2	4	6	2	33,33	4	66,67	-	-
3	Misi 3	4	5	5	100	-	-	-	-
4	Misi 4	5	10	6	60	2	20	2	20
5	Misi 5	1	1	1	100	-	-	-	-
Jumlah		19	28	16	57,14	8	28,57	4	14,29

Dari tabel diatas, diketahui tingkat pencapaian target sasaran dari 28 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Sebanyak 16 indikator atau sebesar 57,14 % tercapai melebihi target (> 100 %);
- Sebanyak 8 indikator atau sebesar 28,57 % mencapai/sesuai target (= 100%);
- Sebanyak 4 indikator atau sebesar 14,29 % tidak mencapai target (< 100%).

Persentase tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 3.1
Persentase Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran

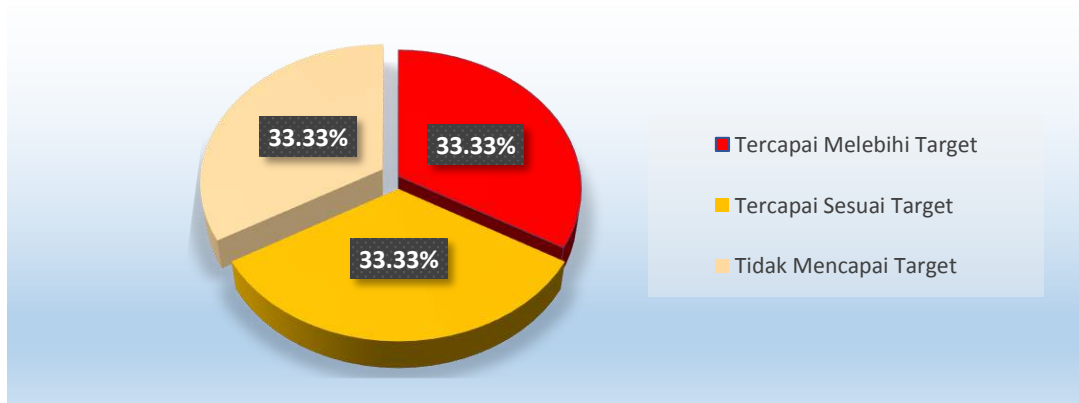


Rincian persentase tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator yang dikelompokkan menurut masing-masing misi adalah sebagai berikut :

a. Misi 1 (Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia)

Jumlah sasaran pada "Misi 1" sebanyak 5 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 6 indikator, dengan tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator yaitu sebanyak 2 indikator (33,33 %) tercapai melebihi target, 2 indikator (33,33 %) mencapai/sesuai target dan 2 indikator (33,33%) tidak mencapai target.

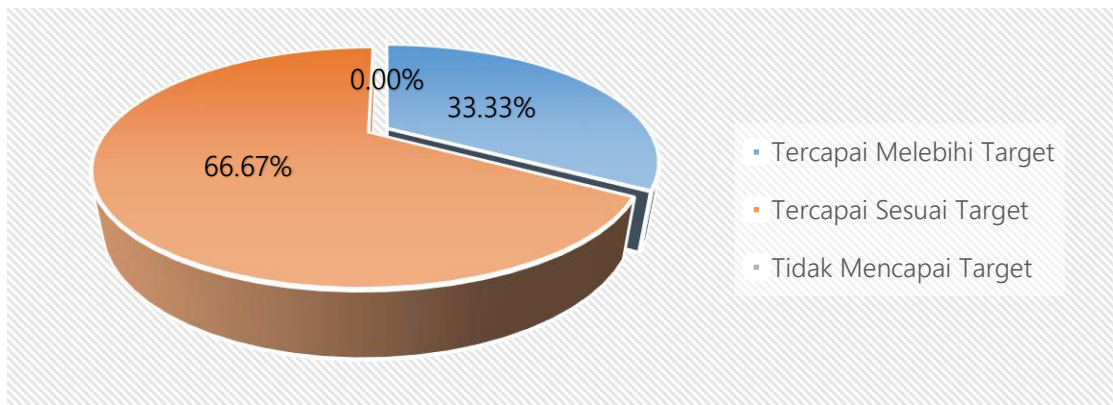
Grafik 3.2
Pencapaian Target Sasaran Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 1



- b. Misi 2 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efisien dan Efektif Serta Penguatan Kemitraan Pemerintah Dengan Dunia Usaha dan Masyarakat)

Jumlah sasaran pada "Misi 2" sebanyak 4 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 6 indikator, dengan tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator yaitu sebanyak 2 indikator (33,33 %) tercapai melebihi target dan 4 indikator (66,67 %) tercapai sesuai target.

Grafik 3.3
Pencapaian Target Sasaran
Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 2



- c. Misi 3 (Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan)

Jumlah sasaran pada "Misi 3" sebanyak 4 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 5 indikator, yang seluruhnya (100 %) tercapai melebihi target.

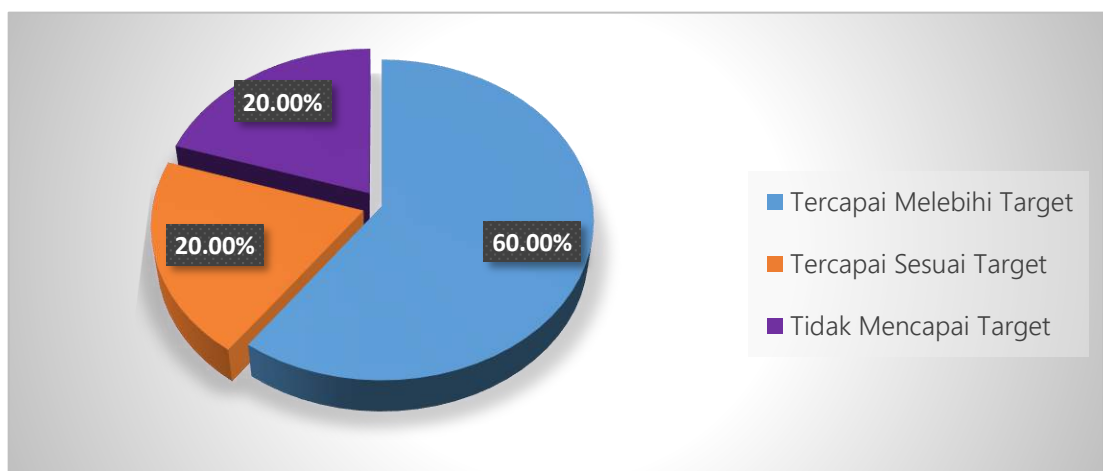
Grafik 3.4
Pencapaian Target Sasaran
Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 3



d. Misi 4 (Membangun Perekonomian Daerah Yang Tangguh)

Jumlah sasaran pada "Misi 4" sebanyak 5 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 10 indikator, dengan tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator yaitu sebanyak 6 indikator (60%) tercapai melebihi target, 2 indikator (20%) tercapai sesuai target dan 2 indikator (20%) tidak mencapai target.

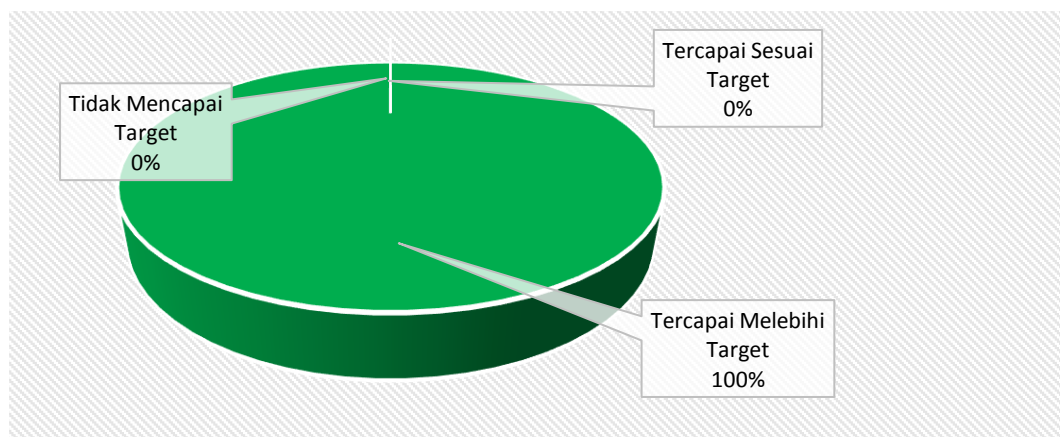
Grafik 3.5
Pencapaian Target Sasaran
Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 4



e. Misi 5 (Meningkatkan Percepatan Pembangunan Perdesaan)

Jumlah sasaran pada "Misi 5" sebanyak 1 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 1 indikator (100%) tercapai melebihi target.

Grafik 3.6
Pencapaian Target Sasaran
Berdasarkan Jumlah Indikator Sasaran Pada Misi 5



Berdasarkan tingkat pencapaian target sasaran dari 28 indikator kinerja tahun 2017, maka kategori indikator kinerja sesuai dengan persentase capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

- Sebanyak 16 indikator tercapai melebihi target (>100%) dengan kategori sangat baik
- Sebanyak 8 indikator tercapai sesuai target (=100%) dengan kategori sangat baik
- Sebanyak 4 indikator tidak mencapai target (<100%), dengan kategori seluruhnya termasuk sangat baik (>90%).

Secara keseluruhan pengkategorian dari semua indikator kinerja sasaran seluruhnya (100%) termasuk dalam kategori sangat baik.

Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2017 Setelah di Reviu

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Kategori Pencapaian Sasaran				
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
				≤49,99	50,00 – 64,99	65,00 – 74,99	75,00 – 89,99	≥90
Misi 1 :								
1.1	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	2	101,03					Sangat Baik
1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	100,72					Sangat Baik
1.3	Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk	1	100					Sangat Baik
1.4	Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan	1	100					Sangat Baik
1.5	Menurunnya tingkat kemiskinan	1	92,98					Sangat Baik

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Kategori Pencapaian Sasaran				
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
				≤49,99	50,00 – 64,99	65,00 – 74,99	75,00 – 89,99	≥90
Misi 2 :								
2.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	3	101,23					Sangat Baik
2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	100					Sangat Baik
2.3	Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha	1	100					Sangat Baik
2.4	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	1	124,24					Sangat Baik
Misi 3 :								
3.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	2	100,21					Sangat Baik
3.2	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi	1	105,29					Sangat Baik
3.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	100,64					Sangat Baik
3.4	Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat	1	102,77					Sangat Baik

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Kategori Pencapaian Sasaran				
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
				≤49,99	50,00 – 64,99	65,00 – 74,99	75,00 – 89,99	≥90
Misi 4 :								
4.1	Meningkatnya kinerja perekonomian	3	100,83					Sangat Baik
4.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat	2	101,64					Sangat Baik
4.3	Meningkatnya kesejahteraan petani	1	105,56					Sangat Baik
4.4	Menurunnya disparitas pendapatan	1	90,69					Sangat Baik
4.5	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan	3	100,97					Sangat Baik
Misi 5 :								
5.1	Meningkatnya Jumlah Desa Swasembada	1	118					Sangat Baik

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 19 sasaran menunjukkan sebanyak 13 sasaran tercapai melebihi target (>100%), 4 sasaran tercapai sesuai target (=100%) dan 2 sasaran tidak mencapai target (<100%). Berkaitan dengan kategori pencapaian sasaran, untuk 2 sasaran yang tidak mencapai target, seluruhnya termasuk dalam kategori sangat baik (≥90%)

Berdasarkan capaian kinerja dan kategori pencapaian sasaran di atas, diketahui bahwa dari 19 sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017, seluruhnya termasuk kategori sangat baik.

Rekapitulasi kategori pencapaian sasaran berdasarkan persentase capaian kinerja dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rekapitulasi Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran
Tahun 2017

No	Kategori	Persentase Capaian	Jumlah Sasaran
1	Sangat Baik	≥ 90	19
2	Baik	75,00 – 89,99	0
3	Cukup	65,00 – 74,99	0
4	Kurang	50,00 – 64,99	0
5	Sangat Kurang	$\leq 49,99$	0
Jumlah			19

Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 setelah direviu adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga dan memberikan dampak positif dalam berbagai aspek pembangunan. Oleh karenanya, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menjadi salah satu sasaran strategis yang ingin diwujudkan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis.

Salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam bidang pendidikan yaitu program "CIAMIS CALAKAN" yang berarti Ciamis Pintar. Kebijakan ini ditujukan untuk melindungi pendidikan masyarakat miskin dengan bantuan pendidikan untuk siswa SMP yang Drop Out (DO) dan rawan Drop Out. Sasaran penerima program ini yaitu siswa SMP dari keluarga miskin (pemegang

KKS/KPS, PKH, Anak Panti Asuhan dan Anak Yatim Piatu) diluar siswa yang menerima BSM/KIP).



Melalui kebijakan program "CIAMIS CALAKAN", pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Ciamis telah memberikan bantuan pendidikan kepada 1.000 siswa SMP berupa bantuan uang sebesar Rp.

750.000,- per siswa per tahun. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk terus bersekolah dan tidak melakukan drop out, sehingga angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis juga meningkat.

Pengukuran terhadap pencapaian sasaran meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2	RLS	Tahun	7,45	99,20	7,59	100,13	7,66	8,03	104,83
3	HLS	Tahun	13,59	98,19	13,62	96,46	14,39	13,99	97,22
Rata-rata Capaian Kinerja		%		98,69		98,29			101,03

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas menunjukkan bahwa :

- a. Pada tahun 2017 capaian kinerja sasaran meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas adalah sebesar 101,03 % dan termasuk dalam kategori sangat baik.
- b. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur, terdapat satu indikator melampaui target dan satu indikator tidak mencapai target.
- c. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran tahun 2017 dengan tahun 2016 dan tahun 2015, secara keseluruhan capaian kinerja sasaran tahun 2017 (101,03 %), lebih tinggi atau mengalami peningkatan sebesar 2,74 % dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 (98,29 %), jika dibandingkan dengan tahun 2015, capaian kinerja sasaran tidak dapat dihitung karena pada perjanjian kinerja tahun 2015 menggunakan perhitungan metode lama. Akan tetapi, terdapat peningkatan jika dilihat dari capaian realisasi nyata dari masing-masing indikator selama tahun 2015 sampai dengan 2017.
- d. Perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2017 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga RPJMD 2014-2019 menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan tercapai melebihi target RPJMD Tahun 2017 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Tahun 2017 Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja (%)
1.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,66	8,03	104,83
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,99	14,39	97,22
Rata-rata Capaian Kinerja		%			101,03

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, dilaksanakan melalui 6 (enam) program yaitu :

- (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- (2) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- (3) Program pendidikan non formal;
- (4) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- (5) Program manajemen pelayanan pendidikan;
- (6) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Penyerapan realisasi anggaran program secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 143.738.911.148,- atau sebesar 89,91 % dari total pagu anggaran Rp. 159.876.634.375,- dengan capaian output sebesar 105,31 % dan capaian outcome sebesar 98,19 %.

Analisa capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Perhitungan rumus RLS adalah sebagai berikut :

$$RLS/MYS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

RLS : Rata-rata Lama Sekolah di Suatu Wilayah

Lama Sekolah penduduk_i : Lama Sekolah Penduduk ke-*i* di suatu wilayah

n : Jumlah Penduduk (*i* = 1, 2, 3,, n)

berdasarkan metode perhitungan tersebut diatas diperoleh nilai RLS sebesar 8,03 Tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 sebesar 7,66 Tahun dengan capaian kinerja sebesar 104,83 % atau dengan kategori sangat baik.

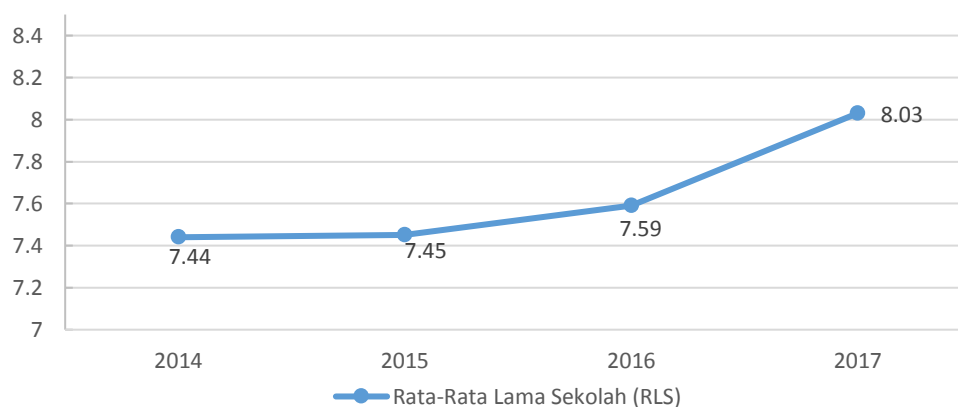
Dalam rangka mencapai atau meningkatkan Angka RLS di Kabupaten Ciamis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan sehingga Angka RLS dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Namun demikian dalam pelaksanaannya ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan walaupun angka RLS Kabupaten Ciamis melampaui target yang telah ditetapkan. Kendala/hambatan tersebut antara lain kondisi ekonomi masyarakat kabupaten Ciamis yang tidak merata.

Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu atau miskin yang dicanangkan oleh Bupati Ciamis melalui kebijakan program *Ciamis Calakan*, serta pemberian Bantuan Operasional Sekolah, sehingga dapat meringankan beban orang tua siswa.

Perkembangan pencapaian RLS di Kabupaten Ciamis selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.7
Perkembangan RLS di Kabupaten Ciamis Tahun 2014 s.d. Tahun 2017



Untuk mencapai indikator sasaran RLS dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan realisasi anggaran sebesar Rp 140.135.486.923,- atau 95,19 % dari total anggaran

yang disediakan sebesar Rp.147.218.625.000,- dengan capaian output sebesar 100% dan capaian outcome sebesar 100 %.

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa datang. HLS dihitung pada usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu Program Wajib Belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di Pesantren. Munculnya dimensi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Untuk menghitung HLS berdasarkan perhitungan rumus BPS adalah sebagai berikut :

- HLS (Harapan Lamanya Sekolah) :

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^t \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

HLS : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t : Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

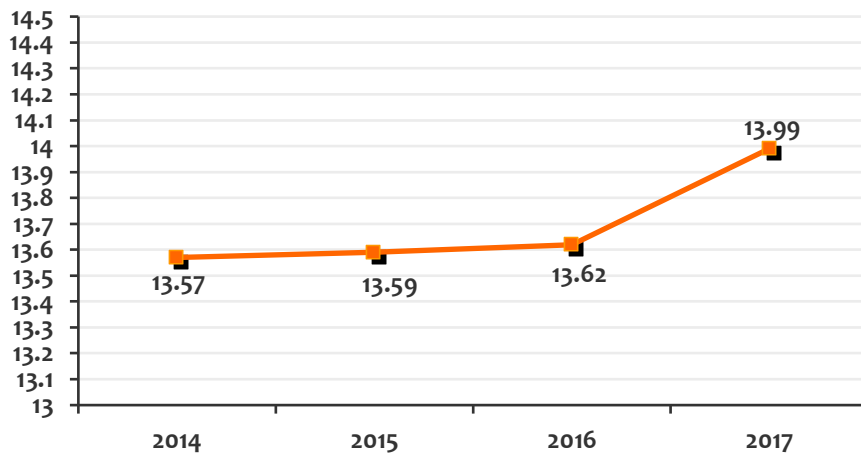
P_i^t : Jumlah Penduduk usia i pada tahun t

i : Usia ($a, a+1, \dots, n$)

FK : Faktor Koreksi Pesantren

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas diperoleh nilai HLS sebesar 13,99 Tahun, lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 sebesar 14,39 tahun dengan capaian kinerja sebesar 97,22 % atau dengan kategori sangat baik. Akan tetapi, indikator Harapan Lama Sekolah terdapat peningkatan capaian realisasi nyata tiap tahunnya seperti grafik di bawah ini :

Grafik 3.8
Perkembangan HLS Di Kabupaten Ciamis
Tahun 2014 s.d Tahun 2017



Untuk mencapai indikator sasaran HLS dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan realisasi anggaran sebesar Rp 140.135.486.923,- atau 95,19 % dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp.147.218.625.000,- dengan capaian output sebesar 100% dan capaian outcome sebesar 100 %.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat



Pembangunan bidang kesehatan khususnya peningkatan layanan kesehatan dilaksanakan melalui tiga pilar utama yaitu (1) Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi

pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; (2) Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan

dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis resiko kesehatan; dan (3) Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan khususnya pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan kebijakan dibidang kesehatan yaitu:

1. **"CIAMIS WALUYA"**. Waluya dalam bahasa sunda berarti sehat sepanjang masa. Program **"CIAMIS WALUYA"** merupakan program perlindungan/jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Nasional Jamkesmas/KIS. Sasaran penerima program ini yaitu masyarakat kurang mampu diluar penerima program jamkesmas/KIS, kelompok PMKS dan bayi baru lahir. Alokasi dana yang disediakan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 4.938.776.200,-. Pada tahun 2017 jumlah masyarakat miskin yang menerima manfaat program Ciamis Waluya adalah sebanyak 23.702 jiwa dengan total realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 4.720.037.000,-.
2. Program-program lain yang tidak kalah pentingnya yaitu Pengembangan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, pembangunan Rumah Sakit Tipe C Kawali, peningkatan kapasitas puskesmas dan Akreditasi terhadap fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Ciamis diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Melalui kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Ciamis bertekad meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, sehingga berdampak pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ciamis.

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dilakukan melalui 1 (satu) indikator dengan hasil pengukuran kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,74	100	70,89	100,62	70,50	71,01	100,72

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa :

- a. Pada tahun 2017 capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat adalah sebesar 100,72%, dengan kategori sangat baik.
- b. Capaian kinerja dari indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari indikator kinerja yang diukur, capaian kerjanya telah melebihi target yang direncanakan.
- c. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator sasaran tahun 2017 dengan tahun 2016 dan tahun 2015 menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran tahun 2017 (100,72 %) lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 (100,62 %) atau mengalami peningkatan sebesar 0,10%, sedangkan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 (100 %) atau mengalami peningkatan sebesar 0,72 %.
- d. Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2017 dengan rencana/target RPJMD tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga RPJMD 2014-2019 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,72 %, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja (%)
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,50	71,01	100,72

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur atau rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penyebab panjangnya umur manusia, diluar soal takdir tentunya, tergantung dari penyakit bawaan dari lahir. Mereka yang diberi berkah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalani hidup lebih panjang adalah orang-orang yang terkait dengan rendahnya penyakit degeneratif. Yaitu penyakit-penyakit yang mengancam kehidupan manusia, seperti penyakit kanker, jantung koroner, diabetes dan stroke. Lingkungan tempat tinggal Stress atau tekanan.

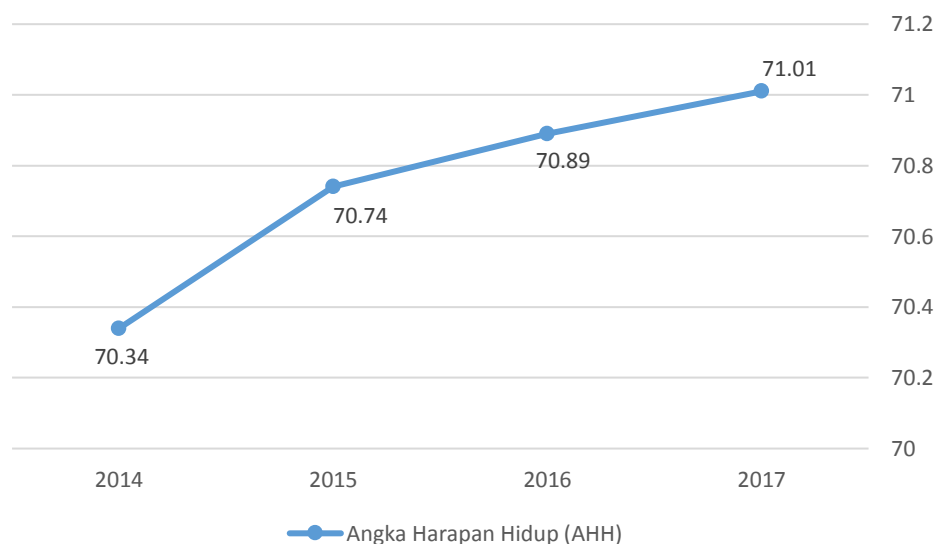
Pada dasarnya Angka Harapan Hidup manusia saat lahir didefinisikan sama, yaitu rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung berdasarkan hasil Proyeksi SP2010 dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)* atau *Mortpack*. AHH negara berkembang, khususnya di negara Indonesia cenderung lebih rendah dibandingkan AHH negara-negara maju karena AHH dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi.

Pada tahun 2017, Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Ciamis sebesar 71,01 tahun melampaui target yang ditetapkan yaitu 70,50 tahun, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,72 % yang berarti termasuk dalam kategori sangat baik. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, dimana AHH

Kabupaten Ciamis adalah 70,89 maka pada tahun 2017 AHH mengalami peningkatan sebanyak 0,12 tahun. Apabila dibandingkan dengan AHH tahun 2015 yang menunjukkan angka sebesar 70,74 tahun maka terdapat kenaikan AHH sebanyak 0,27 tahun.

Angka Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH Kabupaten Ciamis sepanjang tahun 2010-2017 mengalami peningkatan 4,01 tahun, yaitu dari sebesar 67 tahun pada tahun 2009 menjadi sebesar 71,01 tahun pada tahun 2017. Peningkatan capaian AHH ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat serta semakin meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Grafik 3.9
Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ciamis
Tahun 2014-2017



Faktor-faktor yang mempengaruhi AHH diantaranya adalah faktor lingkungan, pelayanan kesehatan, keturunan dan perilaku masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk mempertahankan target Angka Harapan Hidup yaitu melalui pemahaman/edukasi mengenai PHBS yang menjadi pangkal utama pencegahan penyakit, mengatur kebutuhan gizi makanan dan kesehatan lingkungan.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui 15 (lima belas) program, yaitu :

- (1) Program obat dan perbekalan kesehatan;
- (2) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;
- (3) Program standarisasi pelayanan kesehatan;
- (4) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- (5) Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD;
- (6) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;
- (7) Program upaya kesehatan masyarakat;
- (8) Program pelayanan kesehatan;
- (9) Program perbaikan gizi masyarakat;
- (10) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
- (11) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- (12) Program pengembangan lingkungan sehat;
- (13) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;
- (14) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
- (15) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Penyerapan/realisasi anggaran dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya layanan kesehatan sebesar Rp 276.767.539.407,- atau sebesar 95,64 % dari total pagu anggaran Rp 289.388.600.441,- dengan capaian output sebesar 97,58 % dan capaian outcome sebesar 97,20 %.

Sasaran 3 : Mempertahankan Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah Angka perbandingan perubahan jumlah penduduk Kabupaten Ciamis tahun ini (Pt) dikurangi penduduk Kabupaten Ciamis tahun lalu (Pt-1) dibagi oleh Jumlah Penduduk Tahun Lalu (Pt-1), dengan rumus perhitungan :

$$LPP = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100$$

Jumlah penduduk Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2017 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis adalah sebanyak 1.401.423 orang, sedangkan tahun 2016 berjumlah 1.398.346 orang. Berdasarkan rumus perhitungan di atas, dapat diketahui LPP di Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 adalah sebesar 0,47 %. Sedangkan target LPP yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah sebesar 0,47 %, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 %.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Mempertahankan Laju Pertumbuhan Penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

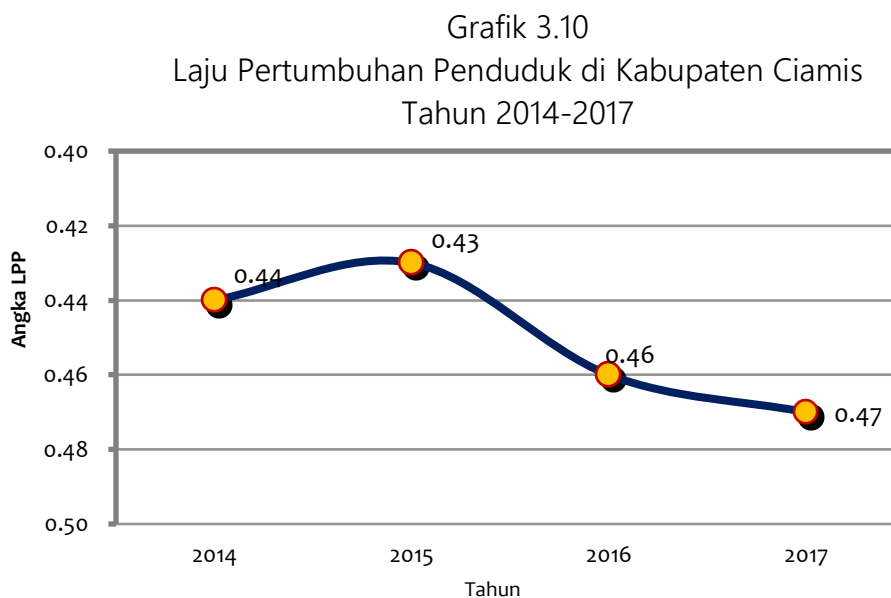
Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran
Mempertahankan Laju Pertumbuhan Penduduk

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	LPP	%	0,43	106,52	0,46	100	0,47	0,47	100

Dari tabel di atas diketahui bahwa LPP Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 adalah sebesar 0,47 % dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 0,47 %, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Pada tahun 2017 LPP Kabupaten Ciamis adalah sebesar 0,47 % dengan capaian kinerja sebesar 100 %, sedangkan pada tahun 2016 LPP Kabupaten Ciamis sebesar 0,46 % dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, maka LPP tahun 2017 mengalami penurunan capaian nyata sebesar 0,01 %. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, maka LPP mengalami penurunan capaian nyata sebesar 0,04 %.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja sasaran LPP tahun 2017 dibandingkan dengan rencana/target dalam RPJMD tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 93,18%. Capaian kinerja ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja pada Perjanjian Kinerja karena target pada RPJMD tahun 2017 lebih tinggi dari pada yang tercantum dalam perjanjian kinerja.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Mempertahankan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja (%)
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,47	0,44	93,18

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis bukan karena pertumbuhan alami tetapi dipengaruhi oleh adanya faktor migrasi penduduk dari

luar daerah. Pertumbuhan alami adalah merupakan selisih jumlah lahir dikurangi jumlah mati, sedangkan migrasi dilihat dari jumlah orang yang datang dan pergi.

Perkembangan Jumlah Penduduk Lahir, Mati, Datang dan Pindah di Kabupaten Ciamis selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Perkembangan Jumlah Penduduk Lahir, Mati, Datang dan Pindah
Di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Penduduk lahir	32.067	19.931	19.095	18.430	18.492
2	Penduduk mati	3.229	6.451	6.194	4.724	13.367
3	Penduduk datang	5.094	20.936	22.025	20.270	7.709
4	Penduduk pergi	7.219	9.741	25.044	15.249	13.529

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2017

Dalam rangka mempertahankan LPP di Kabupaten Ciamis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis antara lain adalah dengan meningkatkan jumlah peserta KB aktif dan peserta KB baru, baik perempuan maupun laki – laki, sehingga LPP dapat stabil setiap tahunnya. Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain masih rendahnya keikutsertaan Pasangan Usia Subur pada program KB. Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu optimalisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat baik yang melalui multimedia ataupun melalui petugas lini lapangan.

Upaya pencapaian sasaran mempertahankan laju pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu : (1) Program Keluarga Berencana; (2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja; dan (3) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.639.661.255,- atau 95,13 % dari total anggaran yang disediakan Rp. 4.876.523.050,- dengan capaian output sebesar 100,73 % dan outcome sebesar 100,57%..

Sasaran 4 : Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Berpolitik/ Masyarakat

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan dilakukan melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Development Gender, dengan hasil pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12
 Capaian Kinerja Sasaran
 Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Berpolitik/Kemasyarakatan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Development Gender	Poin	N/a	N/a	N/a	N/a	85,20	85,20	100

Keterangan : N/a (Not Available) : Indikator Kinerja Sasaran tersebut baru diperjanjikan pada tahun 2017

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas diketahui bahwa :

- Capaian kinerja sasaran meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan tahun 2017 adalah sebesar 100 % dalam kategori sangat baik dan menunjukkan bahwa capaian kerjanya sesuai dengan target.
- Capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena indikator kinerja sasarannya baru tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2017.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2017 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
 Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Berpolitik/ Masyarakat Tahun 2017 Dibandingkan dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Development Gender	Poin	85,20	85,20	100

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga perencanaan menunjukkan bahwa indikator tersebut tercapai sesuai target dengan capaian kinerja sebesar 100 %.

Pada dasarnya pembangunan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan semua penduduk, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan maupun jenis kelamin. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran sederhana yang dapat menggambarkan pembangunan manusia. IPM mampu menangkap kemajuan pembangunan dalam tiga kemampuan dasar manusia yaitu umur panjang dan sehat, pendidikan, serta untuk menikmati standar kehidupan yang layak. IPM membantu menjawab beberapa pertanyaan dasar tentang kemajuan pembangunan manusia, seperti daerah mana yang pembangunan manusianya lebih baik dan lebih cepat.

Walaupun IPM memberikan gambaran yang jelas tentang pembangunan manusia dan mempertimbangkan kemajuan manusia yang lebih luas, tetapi IPM belum dapat menjelaskan kesenjangan capaian pembangunan perempuan dibanding laki-laki. Selama ini pembangunan yang telah dicapai dianggap masih belum berpihak kepada perempuan dimana diduga masih terjadi ketidaksetaraan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu cara untuk mengetahui kesetaraan tersebut adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Nilai IPG dihitung dengan mempertimbangkan capaian laki-laki dan perempuan, sehingga selisih antara keduanya akan menggambarkan tingkat kesetaraan gender. Jika nilai IPM sama dengan nilai IPG menunjukkan bahwa tidak terjadi ketimpangan pencapaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Sebaliknya jika nilai IPG di bawah nilai IPM berarti terjadi ketimpangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebagai berikut :

$$IPG = 1/3 [(X_{\text{ed}}(1) + X_{\text{ed}}(2) + I_{\text{inc-dis}})]$$

Ket : $X_{\text{ed}}(1)$: angka harapan hidup, $X_{\text{ed}}(2)$: rata-rata lama sekolah, $I_{\text{inc-dis}}$: indeks distribusi pendapatan

Berdasarkan data diketahui bahwa pada tahun 2017 angka harapan hidup laki-laki adalah sebesar 68,75 tahun dan perempuan sebesar 72,61 tahun, angka rata-rata lama sekolah laki-laki sebesar 7,81 tahun dan angka rata-rata lama sekolah perempuan sebesar 7,12 tahun dan angka pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp. 12.824,- dan angka pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp. 5.727,- sehingga dengan perhitungan rumus di atas maka angka indeks pembangunan gender (IPG) Kabupaten Ciamis tahun 2017 adalah sebesar 85,2 poin.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan dilaksanakan melalui 6 (enam) program, yaitu :

1. Program peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan;
2. Program kepemudaan dan olahraga;
3. Program pendidikan politik masyarakat;
4. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
5. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
6. Program koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan keagamaan.

Penyerapan/realisasi anggaran dalam upaya pencapaian sasaran adalah sebesar Rp.5.509.905.759,- atau sebesar 97,28 % dari total pagu anggaran Rp.5.664.231.100,- dengan capaian output sebesar 98,61 % dan capaian outcome sebesar 93,67 %.

Sasaran 5 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat

(Bappenas, 2004). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) definisi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pengukuran terhadap pencapaian sasaran menurunnya tingkat kemiskinan diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu jumlah penduduk miskin. Indikator jumlah penduduk miskin dihitung dari jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

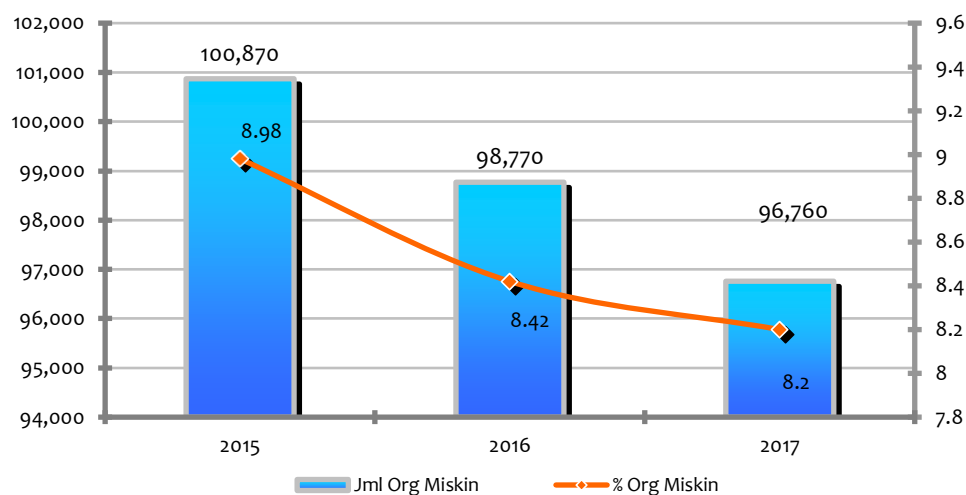
Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah penduduk miskin	Orang (%)	100.870 (8,98)	101,22	98.770 (8,42)	100	90.416	96.760 (8,20)	92,98

Pada tahun 2017 target jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis adalah 90.416 orang. Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk miskin Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 adalah sebanyak 96.760 orang atau 8,20 %, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 92,98 % dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin adalah sebesar 98.770 orang, sedangkan tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebanyak 100.870 orang. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka jumlah penduduk miskin senantiasa mengalami penurunan secara kuantitas. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin berkurang/mengalami penurunan sejumlah 2.010 orang dibandingkan dengan tahun 2016, dan menurun sejumlah 4.110 orang dibandingkan dengan tahun 2015.

Grafik 3.11
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2017



Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2017 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga perencanaan juga menunjukkan capaian kinerja sebesar 90,61 % atau lebih rendah dari capaian kinerja pada perjanjian kinerja, dikarenakan target pada RPJMD tahun 2017 lebih tinggi dari pada target yang direncanakan pada perjanjian kinerja.

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Menurunnya Tingkat Kemiskinan Tahun 2017 Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah penduduk miskin	Orang	96.758	88.456	90,61

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja diantaranya adalah :

- 1) Terjadinya bencana alam di beberapa wilayah menyebabkan rusaknya beberapa fasilitas termasuk rumah penduduk sehingga menyebabkan penduduk menjadi miskin;

- 2) Bertambahnya jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH hasil verifikasi dan validasi;
- 3) Intervensi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan belum berjalan optimal.

Penanggulangan kemiskinan merupakan program utama pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten bahkan merupakan salah satu janji politik bupati sehingga menjadi program prioritas. Program penanggulangan kemiskinan yang sudah diluncurkan antara lain program Pendidikan untuk siswa miskin, bantuan layanan kesehatan masyarakat miskin, PKH, BLT, Rastra, Kube perkotaan dan pedesaan dan bantuan untuk Rumah tidak layak huni.

Dalam rangka penanganan dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan akselerasi dalam penanggulangan kemiskinan yaitu dengan membentuk lembaga layanan terpadu penanggulangan kemiskinan yang disebut dengan LTPKD (Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang merupakan wadah pelayanan terpadu lintas sektoral dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka percepatan dan penguatan secara terpadu dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelaksanaan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis.

Pembentukan LTPKD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2014. Keberadaan LTPKD saat ini sudah berjalan selama 3 (dua) tahun dan telah dilakukan perbaikan/pembenahan baik berupa restrukturisasi organisasi maupun penguatan regulasi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu mengenai keberadaan LTPKD. Dengan adanya perbaikan/pembenahan ini diharapkan keberadaan lembaga LTPKD dapat berjalan lebih optimal, sehingga program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Hambatan yang dihadapi dalam penanganan masalah kemiskinan yaitu berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan penanggulangan kemiskinan serta berkaitan dengan data base kemiskinan, misalnya validasi data keluarga miskin penerima program kartu KIS data tersebut masih banyak terdapat penerima yang tidak tepat sasaran.

Strategi/upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut yaitu: (1) Menggunakan data yang berasal dari Kementerian Sosial yang diverifikasi dan divalidasi oleh pendamping PKH dan TKSK; (2) Senantiasa melakukan validasi dan kartu yang salah dikembalikan ke Pemerintah Pusat dan diusulkan untuk dilakukan penggantian.

Upaya pencapaian sasaran menurunnya tingkat kemiskinan dilaksanakan melalui 8 (delapan) program, yaitu :

- (1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
- (2) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
- (3) Program Transmigrasi Regional;
- (4) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;
- (5) Program Layanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- (6) Program Pembinaan Anak Terlantar;
- (7) Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo;
- (8) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Penyerapan realisasi anggaran dalam upaya pencapaian sasaran menurunnya tingkat kemiskinan adalah sebesar Rp. 1.983.524.650,- atau sebesar 96,53 % dari total pagu anggaran Rp. 2.054.805.500,- dengan capaian output sebesar 86,13 % dan capaian outcome sebesar 83,82 %.

Sasaran 6 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Evaluasi penilaian terhadap tingkat pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dilakukan melalui 3 (tiga) indikator kinerja, dengan rincian hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Realisasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penilaian SAKIP		CC	89,43	CC (54,49)	90,81	B (60,01)	B (62,23)	103,70
2	Predikat penilaian LPPD		Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100
3	Opini BPK		WTP	100	WTP	100	WTP	WTP*)	100
Rata-rata Capaian Kinerja				96,48		96,94			101,23

Keterangan : *) Asumsi akhir sementara

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas, diketahui beberapa hal sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi tahun 2017 adalah sebesar 101,23 %, dan termasuk dalam kategori sangat baik.
- Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari masing-masing indikator menunjukkan sebanyak 1 (satu) indikator tercapai melampaui target dan 2 (dua) indikator tercapai sesuai target.
- Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun yang lalu menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2017 sebesar 101,23%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja

tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 96,94 % dan tahun 2015 sebesar 96,48 %.

Sedangkan perbandingan realisasi pencapaian sasaran sampai dengan Tahun 2017 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dibandingkan Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja (%)
1	Penilaian SAKIP		B (62,23)	B (60,01)	103,70
2	Predikat penilaian LPPD		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100
3	Opini BPK		WTP	WTP	100
Rata-rata Capaian Kinerja		%			101,23

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga perencanaan menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,23 % atau sama dengan capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi dilaksanakan melalui 33 (tiga puluh tiga) program, yaitu :

- (1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
- (2) Program Pengembangan data/informasi;
- (3) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
- (4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi;
- (5) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;
- (6) Program perencanaan pembangunan daerah;
- (7) Program perencanaan pembangunan ekonomi;
- (8) Program perencanaan sosial budaya;
- (9) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;

- (10) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- (11) Program Fasilitas Koordinasi Pembangunan Daerah;
- (12) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ WKDH;
- (13) Program Fasilitas Kegiatan Keprotokolan;
- (14) Program Penataan Daerah Otonom;
- (15) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
- (16) Program Pelayanan Fasilitas KDH/WKDH;
- (17) Program Pembinaan Arsip Statis;
- (18) Program Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
- (19) Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
- (20) Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
- (21) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
- (22) Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- (23) Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
- (24) Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
- (25) Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan;
- (26) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
- (27) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- (28) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (29) Program Peningkatan disiplin aparaturnya;
- (30) Program Peningkatan sarana dan prasarana pemerintah;
- (31) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- (32) Program Pendidikan Kedinasan;
- (33) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penyerapan realisasi anggaran dalam upaya meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi sebesar Rp 128.475.291.453,- atau sebesar 95,65 % dari total pagu anggaran Rp 134.322.362.728,- dengan capaian output sebesar 100,10 % dan capaian outcome sebesar 97,97 %.

Analisa penjelasan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Penilaian SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Ciamis senantiasa melaksanakan perbaikan-perbaikan yang mendasar dan penguatan dari berbagai aspek terkait dengan pembenahan dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Yang dimaksud dengan indikator prestasi Penilaian SAKIP adalah evaluasi/penilaian atas implementasi SAKIP berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPANRB.

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Ciamis mendapatkan nilai angka sebesar 62,23 atau kategori B (Baik). Sedangkan untuk evaluasi dan penilaian SAKIP tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Ciamis mendapatkan nilai angka

sebesar 54,49 atau kategori CC (Cukup) dan sebesar 53,66 atau kategori CC (Cukup) pada tahun 2015.

Meningkatnya nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Ciamis tentunya melalui penguatan beberapa aspek/komponen SAKIP seperti perencanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi internal di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, mulai munculnya komitmen dari pimpinan daerah maupun pimpinan SKPD untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja menjadi motivasi tersendiri dan geliat untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan.

Untuk mencapai indikator sasaran penilaian SAKIP dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program yaitu :

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 3) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;
- 4) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA;
- 5) Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah;
- 6) Program pengembangan data/informasi
- 7) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;

Dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 9.183.569.479,- atau 99,80% dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp 9.202.057.350 dengan capaian output sebesar 99,96 % dan outcome sebesar 100 %

2. Predikat Penilaian LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota adalah Laporan Wajib Kepala Daerah kabupaten/kota yang disusun setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan

sebagaimana dimaksud Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun metode penyusunan LPPD Tahun 2016 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat sedangkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Capaian kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan atau hasil EKPPD oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap LPPD Kabupaten Ciamis Tahun 2017 memperoleh skor 3,1721 atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi (ST). Tercapainya sasaran predikat penilaian terhadap LPPD dimaksud merupakan sebuah gambaran bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ciamis telah berjalan dengan lancar serta kerjasama dan koordinasi antar susunan pemerintahan di Kabupaten Ciamis telah terjalin dengan baik. Selain itu dukungan, kebersamaan dan kekompakan seluruh SKPD dalam pengumpulan dan kelengkapan data pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tataran pengambil kebijakan, pelaksanaan kebijakan maupun pelaksanaan 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan dapat difasilitasi dan tersedia dengan lengkap sesuai capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mencapai indikator sasaran Predikat penilaian LPPD dilaksanakan melalui 16 (enam belas) program yaitu :

- 1) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- 2) Program Pendidikan Kedinasan
- 3) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah;

- 4) Program Pelayanan Fasilitas KDH/WKDH
- 5) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
- 6) Program Pembinaan Arsip Statis
- 7) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 8) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 9) Program Fasilitas dan Koordinasi Pembangunan Daerah
- 10) Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
- 11) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 12) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 13) Program Penataan Daerah Otonom
- 14) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 15) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah
- 16) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 37.507.293.743,- atau 94,16% dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp 39.833.859.000 dengan capaian output sebesar 94,16 % dan outcome sebesar 97,27 %

3. Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ciamis tahun 2017, belum mendapat penilaian/opini dari BPK, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan atas LKPD tahun 2017. Sedangkan pada LKPD tahun 2016 dan LKPD tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Ciamis mendapatkan opini WTP. WTP menyatakan bahwa laporan keuangan dengan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian opini WTP adalah pengelolaan keuangan daerahnya semakin akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Dengan kata lain, semua pencatatan keuangan daerahnya dilakukan secara wajar, termasuk didalamnya penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah/aset tetap. Sehingga laporan keuangan itu bisa menjadi alat pengambilan keputusan yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik.

Untuk mencapai indikator sasaran tersebut, telah dilaksanakan kegiatan melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan pendataan/inventarisasi barang-barang kekayaan daerah, Pelatihan SDM aparatur pengelola keuangan, pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan terintegrasi.

Hambatan/masalah yang ditemui adalah sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jumlah aset tetap yang dimiliki Kabupaten Ciamis sangatlah banyak dan tersebar di setiap unit kerja. Penatausahaan barang milik daerah sangatlah kompleks karena menyangkut pengelolaan barang daerah mulai dari pendataan sampai dengan mutasi, penyusutan, dan penghapusan aset tetap. Dalam penatausahaan dan pelaporan aset tetap ini disadari masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi dan dilengkapi yang diakibatkan karena masih terdapatnya pengurus barang yang kurang memahami penatausahaan aset tetap yang benar dan komprehensif.

Strategi dan upaya pemecahan masalah terkait dengan penatausahaan aset tetap yang belum optimal, Pemerintah Kabupaten Ciamis berupaya terus meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset tetap dan segera menertibkan penatausahaan aset tetap pada masing-masing SKPD sesuai tanggungjawab setiap SKPD dengan melakukan inventarisasi, penilaian, dan kodefikasi aset tetap yang melibatkan seluruh unit kerja dan pengurus barang. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan rekonsiliasi barang daerah terhadap seluruh SKPD setiap bulan dan pengembangan serta pendampingan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA-BMD) dengan dilaksanakannya pelatihan penatausahaan aset tetap terhadap para pengurus barang seluruh SKPD.

Untuk mencapai indikator sasaran tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan melalui 10 (sepuluh) program yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
- 2) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
- 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4) Program Penataan penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- 5) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
- 6) Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 7) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- 8) Program Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan
- 9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 10) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 81.784.428.231,- atau 95,89 % dari total anggaran yang disediakan Rp. 85.286.446.378,- dengan capaian output sebesar 101% dan outcome sebesar 97.76 %.

Sasaran 7 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik/masyarakat adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan



publik. Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik / masyarakat telah mampu memenuhi harapan masyarakat maka diperlukan upaya-upaya untuk selalu

memperbaiki dan meningkatkan pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan zaman dan harapan masyarakat pada saat ini.

Salah satu bentuk upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik/masyarakat adalah melakukan survei kepuasan masyarakat, sehingga diketahui tingkat/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ciamis, tahun 2017 telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat pada SKPD/Unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik langsung ke masyarakat sesuai dengan bidang urusannya masing-masing. Nilai IKM tahun

2017 adalah sebesar 7,91 atau tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 7,67 atau terjadi peningkatan sebanyak 2,4 poin, dan tahun 2015 sebesar 7,41 atau meningkat 5 poin.

Penilaian atau survey IKM ini dilaksanakan secara komprehensif pada berbagai bidang urusan pemerintahan, sehingga seluruh SKPD pelaksana urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik/produk layanannya masing-masing.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	7,41	-	7,67	-	7,91	7,91	100

Berdasarkan tabel pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan masyarakat tahun 2017 yang diukur dari indikator nilai indeks kepuasan masyarakat menunjukkan realisasi sebesar 7,91 poin dan capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori sangat baik. Dibandingkan dengan capaian realisasi nyata tahun 2016 sebesar 7,67 poin, menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2017 lebih tinggi dan mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 7,41 juga terjadi peningkatan capaian realisasi nyata.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2017 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga perencanaan juga menunjukkan capaian kinerja sebesar 122,19 %, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2017
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	7,91 (87,89%)	72 %	122,19

Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat mencapai 122,19% atau lebih tinggi dari pada capaian kinerja Perjanjian Kinerja tahun 2017. Hal ini dikarenakan target yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2017 lebih kecil dari pada yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2017, sehingga capaiannya melampaui target yang direncanakan pada RPJMD.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dilaksanakan melalui 6 (enam) program, yaitu :

1. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa;
2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;
3. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.289.727.142,- atau sebesar 95,69 % dari total pagu anggaran Rp. 68.228.169.606,- dengan capaian output sebesar 99,87 % dan capaian outcome sebesar 98,86 %.

Nilai tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survei IKM yang dilaksanakan sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah di Kabupaten Ciamis adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.20
 Nilai Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada SKPD/Unit Kerja
 Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017

No	Bidang Urusan	Nilai IKM	Konversi IKM (%)	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	Pendidikan	7.84	87.11	A	Sangat Puas
2	Kesehatan	7.68	85.33	A	Sangat Puas
3	Pekerjaan Umum	7.15	79.44	A	Sangat Puas
4	Penataan Ruang	8.37	93	A	Sangat Puas
5	Perumahan Rakyat	7.75	86.11	A	Sangat Puas
6	Sosial	7.15	79.44	A	Sangat Puas
7	Tenaga Kerja	7.48	83.11	A	Sangat Puas
8	Lingkungan Hidup	7.91	87.89	A	Sangat Puas
9	Penanaman Modal	7.65	85	A	Sangat Puas
10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.73	97	A	Sangat Puas
11	Komunikasi & Informatika	7.69	85.44	A	Sangat Puas
12	Statistik	7.56	84	A	Sangat Puas
13	Pertanian	8.07	89.67	A	Sangat Puas
14	Ketahanan Pangan	7.52	83.56	A	Sangat Puas
15	Kelautan & Perikanan	8.27	91.89	A	Sangat Puas
16	Kehutanan	8.08	89.78	A	Sangat Puas
17	Perpustakaan	8.25	91.67	A	Sangat Puas
18	Kearsipan	7.85	87.22	A	Sangat Puas
19	Koperasi dan UKM	8.18	90.89	A	Sangat Puas
20	Perdagangan	7.62	84.67	A	Sangat Puas
21	Perindustrian	7.71	85.67	A	Sangat Puas
22	Pariwisata	6.91	76.78	A	Sangat Puas
23	Perhubungan	8.01	89	A	Sangat Puas
24	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.10	90	A	Sangat Puas
25	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	8.58	95.33	A	Sangat Puas

No	Bidang Urusan	Nilai IKM	Konversi IKM (%)	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
26	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7,64	84.89	A	Sangat Puas
27	ESDM	6.80	75.56	A	Sangat Puas
28	Pertanahan	7.76	86.22	A	Sangat Puas
29	Transmigrasi	7.15	79.44	A	Sangat Puas
30	Kepemudaan & Olahraga	7.64	84.89	A	Sangat Puas
31	Kebudayaan	8.38	93.11	A	Sangat Puas
32	Kecamatan	7.65	85	A	Sangat Puas
33	Perencanaan	7.57	84.11	A	Sangat Puas
34	Kesbangpol	8.57	95.22	A	Sangat Puas
35	Kepegawaian	8.30	92.22	A	Sangat Puas
36	Keuangan	8.75	97.22	A	Sangat Puas
JUMLAH		7.91	87.89	A	Sangat Puas

Sumber : Bagian Organisasi Setda kabupaten Ciamis Tahun 2017

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan IKM adalah banyaknya unsur-unsur pelayanan yang memperoleh skor diatas nilai rata-rata. Hal ini turut dipengaruhi dengan adanya langkah dan upaya nyata untuk memperbaiki dan meningkatkan unsur-unsur pelayanan yang mempunyai nilai rendah pada tahun-tahun sebelumnya.

Hambatan/masalah yang ditemui adalah masih terdapatnya unsur-unsur pelayanan yang mempunyai skor rendah. Strategi/upaya pemecahan masalah dimaksud dilakukan melalui upaya nyata untuk memperbaiki dan meningkatkan unsur-unsur pelayanan yang mempunyai nilai rendah yaitu dengan mengintervensi beberapa unsur-unsur pelayanan yang dapat dilakukan secara swakelola seperti pembakuan sistem dan tahapan pelayanan melalui penetapan ukuran/tahapan/standar yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan seperti standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) dan diumumkan/disosialisasikan secara jelas, penyediaan ruang tunggu yang memadai

dan representatif ditinjau dari aspek ukuran (ketersediaan ruangan) maupun aspek K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) dan mengupayakan terdapat prasarana penunjang lain di ruang tunggu seperti ketersediaan kursi, nomor antrian dan sarana informasi seperti papan informasi/televisi/surat kabar/majalah/pamflet/brosur dan sejenisnya sepanjang dimungkinkan.

Sasaran 8 : Mengembangkan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dan Dunia Usaha

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah bahwa yang dimaksud dengan kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 22 Tahun 2009, kerjasama daerah meliputi 2 (dua) kerjasama yaitu kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Dalam rangka pengukuran capaian kinerja sasaran Mengembangkan kerja-sama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha dilakukan melalui 1 (satu) indikator yaitu Jumlah kerjasama, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Sasaran Mengembangkan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dan Dunia Usaha

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah kerjasama	Buah	4	100	4	200	2	2	100

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas diketahui bahwa pada tahun 2017 capaian kinerja sasaran mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi, yang diukur dari perbandingan antara target dan realisasi indikator jumlah kerjasama dengan target sebanyak 2 (dua) buah dan realisasi sebanyak 2 (dua) buah menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 %, dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Perbandingan antara realisasi (capaian nyata) tahun 2017 dengan tahun sebelumnya menunjukkan realisasi (capaian nyata) tahun 2017 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2016 maupun tahun 2015.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2017 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 200 % atau lebih tinggi dari capaian kinerja pada perjanjian tahun 2017, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.22

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Mengembangkan Kerjasama Pemerintah Daerah
Dengan Masyarakat dan Dunia Usaha Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Kerjasama	Buah	2	1	200

Target jumlah kerjasama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 maupun dalam RPJMD 2014-2019 adalah jumlah Kerjasama antar daerah. Dalam perkembangannya Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak hanya melaksanakan Kerjasama Antar Daerah saja tetapi juga Kerjasama dengan Pihak Ketiga. Sampai dengan tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah

melaksanakan kerjasama Antar Daerah yang meliputi 10 (sepuluh) buah kerjasama, serta kerjasama dengan Pihak Ketiga sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah kerjasama, baik dengan Perguruan Tinggi, BUMN, Pemerintah Pusat, Instansi Vertikal, Swasta dan Masyarakat/perorangan. Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik yang dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.

Kerjasama Antar Daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.23
Kerjasama Antar Daerah di Kabupaten Ciamis
Yang Dilaksanakan sampai dengan Tahun 2017

No	Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama	Daerah yang Diajak Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama	Jangka Waktu Kerjasama	Hasil Kerjasama
1	No. 595/1212/2013 No. 181/20-Huk/2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi SP 2 Amohola Desa Wawondengi Kec. Moramo	Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara	Transmigrasi	sampai dengan berakhirnya masa pembinaan (5 tahun)	Mendapatkan target penempatan transmigrasi untuk Kab. Konawe Selatan
2	No. 595/Nakertrans/III/2013 No. 181/21-Huk/2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Ayumoligo Kec. Pulubala	Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo	Transmigrasi	sampai dengan berakhirnya masa pembinaan (5 tahun)	Mendapatkan target penempatan transmigrasi untuk Kab. Gorontalo sebanyak 5 KK
3	No. 595/DTKT/IV/2013 No. 181/5.B-Huk/2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi	Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo	Transmigrasi	sampai dengan berakhirnya masa pembinaan (5 tahun)	Mendapatkan target penempatan transmigrasi untuk Kab. Boalemo
4	Peraturan Bersama: No. 073/1140/Otdaksm No. 6 Tahun 2013 No. 31 A Tahun 2012 No. 07 A Tahun 2012 No. 01 Tahun 2012 No. 58 Tahun 2012	Kerjasama kawasan perbatasan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Provinsi	- Bidang Sosial dan Pemerintahan - Bidang Ekonomi - Bidang Infrastruktur		Sinergitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan

No	Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama	Daerah yang Diajak Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama	Jangka Waktu Kerjasama	Hasil Kerjasama
	No. 030 AB Tahun 2012 No. 3 A Tahun 2012 Keputusan Bersama No. 073/1137/Otdaksm No. 019.6/4 Tahun 2013 No. 01 Tahun 2012 No. 01 Tahun 2012 No. 134/01-Huk/2012 No. 100/221/03/2012 No. 134/Kpts.69a-Huk/2012 No. 173 A Tahun 2012	Jawa Tengah, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Ciamis, Kab. Cilacap, Kota Banjar, Kab. Brebes dan Kab. Majalengka (Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) Kunci Bersama)	dan Lingkungan Hidup		Porsenitas perbatasan anggota BKAD (Badan Kerjasama Antar Daerah)
5	Perjanjian Kerjasama : No. 181/18-Huk/2015 tentang Sinergitas Penanganan Permasalahan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT) dan Psikotik Jalanan secara Terpadu di Wilayah Perbatasan Jawa Barat Bagian Timur dan Jawa Tengah Bagian Barat.	Gubernur Jabar dan Jateng, 15 Kabupaten dan 4 Kota	Penanganan permasalahan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT)	1 tahun	Tertanganinya permasalahan PGOT di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah
6	Kesepakatan Bersama : No. 119/927/2017 No. 119/3473-Bag.KS	Pemkot Bandung	1. Pengembangan Smart City 2. Pengembangan Kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Pengembangan SDM 4. Promosi pengembangan UMKM, Industri, perdagangan dan Investasi 5. Penataan Ruang dan Infrastruktur 6. Perencanaan Daerah 7. Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 tahun	Terlaksananya perencanaan percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya yang ada

No	Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama	Daerah yang Diajak Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama	Jangka Waktu Kerjasama	Hasil Kerjasama
7	Kesepakatan Bersama No. 510.6/Mou.09-BanhukKD/2017 No. 075/16/pem/VI/2017 No. 510.3/1784/indagpas No, 119/538/2017 No. 130.3/18-Huk/2017 No. 073/Kjs15-Huk/2017 tentang Pelayanan Tera Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal	Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kota Banjar, Kab. Pangandaran	Pelayanan tera ulang dan pengawasan metrologi legal	1 Tahun	Terlaksananya pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal di Kabupaten Ciamis
8	Kesepakatan Bersama : No. 181/15-Huk/2015	Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya	Kesepakatan bersama meliputi 1. Bidang Sosial dan pemerintahan 2. Bidang Infrastruktur 3. Bidang Ekonomi	1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergitas pembangunan di wilayah perbatasan • Terkoordinasi-kannya perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan
9.	No. 800/1238/UMPEG-BPBD/XII/2016 No. 019.6/7688/2016 No. PKS/38/2016 No. 360/Kpts.692-Huk/2016 No. 360/74/39/2016 No. 360/PKS.11-KPBD/2016 No. 19 Tahun 2016 No. 360/02857/2016 No. 073/Kjs.23a-Huk/2016 No. 11 Tahun 2016 No.380/1420.N/Umum/2016	BPBD Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, BPBD Kabupaten Kuningan, Ciamis, Cilacap, Brebes, Majalengka, Pangandaran dan Kota Banjar, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Cirebon serta Dinas Sosial Pemkab Cirebon	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah	5 tahun	Terseleenggaranya sinergitas penanggulangan bencana secara terpadu, sistematis, cepat, tepat, akurat, terkoordinatif, berkesinambungan dan akuntabel pada tahapan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana

No	Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama	Daerah yang Diajak Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama	Jangka Waktu Kerjasama	Hasil Kerjasama
10.	Keputusan Bersama No. 551/kpts.408-huk/2002 Tgl 26/10/2002 Kesepakatan Bersama No. 181/Kpts.13-Huk/ 2003 Tgl. 10/11/2003 Kesepakatan Bersama No. 362 Tahun 2004 Tgl. 16/12/2004	Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kab. Tasikmalaya	Bidang Perhubungan (Trayek Angkutan Perbatasan)	Sejak Tahun 2004 s.d tidak berlakunya SKB tersebut	Kelancaran Transportasi antar wilayah di daerah perbatasan Kabupaten Ciamis

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Ciamis, Tahun 2017

Memperhatikan capaian kerjasama yang telah dilakukan, baik kerjasama antar daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Salah satu faktor pendukung tercapainya kinerja ini antara lain keberadaan Tim yang terhimpun dalam TKKSD senantiasa melakukan koordinasi dan melaksanakan rapat-rapat dengan SKPD teknis terkait serta konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, demikian pula SKPD yang terlibat dalam lingkup Kerjasama secara teknis, senantiasa proaktif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kerjasama daerah.

Upaya pencapaian sasaran mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi dilaksanakan melalui 4 (empat) program, yaitu (1) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; (2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; (3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya; dan (4) Program Pengembangan Kemitraan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.262.323.759,- atau sebesar 99,09 % dari total pagu anggaran Rp. 2.283.154.450,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Sasaran 9 : Terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pengukuran terhadap realisasi dan capaian kinerja sasaran Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Kriminalitas, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.24

Capaian Kinerja Sasaran
Terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Kriminalitas	Orang	429	91,94	495	84,61	375	495	124,24

Berdasarkan hasil pengukuran capaian sasaran tersebut di atas, diketahui bahwa :

- Capaian kinerja sasaran terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 124,24 % dan termasuk dalam kategori sangat baik dan capaian kerjanya menunjukkan melebihi target yang direncanakan.
- Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2017 (124,24 %) lebih tinggi atau meningkat sebesar 39,63 % jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2016 (84,61 %) dan meningkat sebesar 32,3 % dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 (91,94 %).
- Perbandingan capaian realisasi nyata pada tahun 2017 atau sebesar 375 orang mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 495 orang, dan tahun 2015 sebesar 429 orang.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2017 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga perencanaan juga menunjukkan capaian kinerja sebesar 124,24 % sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Terkendalnya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2017
Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Kriminalitas	Orang	495	375	124,24

Dari sudut sosiologi, kriminalitas atau kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius yang mendorong disorganisasi sosial karena para pelaku kriminal itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum serta dapat merugikan berbagai kepentingan umum.

Jumlah kriminalitas di Kabupaten Ciamis tergolong rendah, selama kurun waktu satu tahun tingkat kriminalitas/kejahatan hanya mencapai 375 kasus/orang jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Ciamis sendiri masih termasuk wilayah kondusif karena jika dilihat dari berbagai aspek yang mempengaruhi tingkat kriminalitas dapat diminimalisir dan dilakukan berbagai kegiatan preventif seperti melakukan pembinaan dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya menjaga keamanan lingkungan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban untuk mendukung suasana yang aman di lingkungan masyarakat.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi dilaksanakan melalui 4 (empat) program, yaitu :

- (1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

- (2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- (3) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban;
- (4) Program pengembangan wawasan kebangsaan.

Penyerapan realisasi anggaran program secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 5.500.669.150,- atau sebesar 99,68% dari total pagu anggaran Rp.5.518.381.650,- dengan capaian output sebesar 100,73 % dan capaian outcome sebesar 100,72 %.

Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Pengukuran terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi dilakukan melalui 2 (dua) indikator yaitu : (1) Kemantapan jalan kabupaten; dan (2) Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik, dengan hasil pengukuran sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Kemantapan jalan kabupaten	%	63,09	101,44	66,78	100,42	68,50	68,72	100,32
2	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	m/ha	28,598	134,02	29,554	100,11	29.750	29.780	100,10
Rata-rata Capaian Kinerja				117,73		100,26			100,21

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui bahwa :

- a. Capaian kinerja sasaran meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi tahun 2017 adalah sebesar 100,21 %, termasuk dalam kategori sangat baik.
- b. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur, keduanya tercapai melampaui target yang direncanakan.
- c. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran tahun 2017 (100,21 %) lebih

rendah/mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 (100,26 %) dan Tahun 2015 (117,73 %), akan tetapi jika dilihat dari capaian realisasi nyata terjadi peningkatan dari tahun ke tahunnya.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2017 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 121,7 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah Tahun 2017 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja (%)
1	Kemantapan jalan kabupaten	%	68,72	64,25	106,96
2	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	m/ha	29.780	21.828	136,43
Rata-rata Capaian Kinerja		%			121,7

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dilaksanakan melalui 11 (sebelas) program, yaitu :

- (1) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- (2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- (3) Program Pembangunan turap/talud/brojong;
- (4) Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;
- (5) Program Sarana dan Prasarana kebinamargaan;
- (6) Program Perencanaan Tata Ruang;
- (7) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- (8) Program Pemanfaatan Ruang;

- (9) Program Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman Perkotaan/Perdesaan;
- (10) Program Pengendalian Banjir;
- (11) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.

Penyerapan realisasi anggaran program secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 219.198.874.575,- atau sebesar 95,78 % dari total pagu anggaran Rp.228.862.379.853,- dengan capaian output sebesar 99,66 % dan capaian outcome sebesar 99,66 %.

Analisa/penjelasan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kemantapan Jalan Kabupaten

Kemantapan jalan kabupaten adalah perbandingan antara panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan kabupaten secara keseluruhan. Pada tahun 2017, panjang jalan Kabupaten Ciamis dalam kondisi baik adalah 582,940 km, sedangkan panjang jalan kabupaten secara keseluruhan berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 620/KPTS.588–Huk/2014 tentang Jalan Kabupaten, yang ditetapkan pada tanggal 11 Nopember 2014, adalah sepanjang 848,296 km.

Berdasarkan data dan perhitungan di atas, maka realisasi (capaian nyata) kemantapan jalan pada tahun 2017 adalah sebesar 68,72 % dari target perjanjian kinerja sebesar 68,50 %, dengan capaian kinerja sebesar 100,32 %. Dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 64,25 %, maka capaian kinerja menunjukkan angka sebesar 106,95 %.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka capaian indikator kemantapan jalan kabupaten mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 panjang jalan kabupaten ketika Kabupaten Pangandaran belum berpisah dengan Kabupaten Ciamis adalah sepanjang 772,31 km, dengan panjang jalan dalam kondisi

baik dan sedang sepanjang 308,03 km, sehingga proporsinya adalah sebesar 39,88%. Tetapi setelah Kabupaten Pangandaran berpisah pada akhir tahun 2013, panjang jalan Kabupaten Ciamis adalah sepanjang 478,11 km, dengan panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 211,55 sehingga proporsinya adalah sebesar 44,25%.

Kemudian pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis, panjang jalan kabupaten keseluruhan adalah 848,29 km, dengan panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang sepanjang 493,59 km sehingga proporsinya sebesar 58,19%. Dan pada tahun 2015 kemantapan jalan kabupaten adalah sebesar 63,09%, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 66,78% maka kenaikan nilai kemantapan jalan kabupaten adalah sebesar 3,69%.

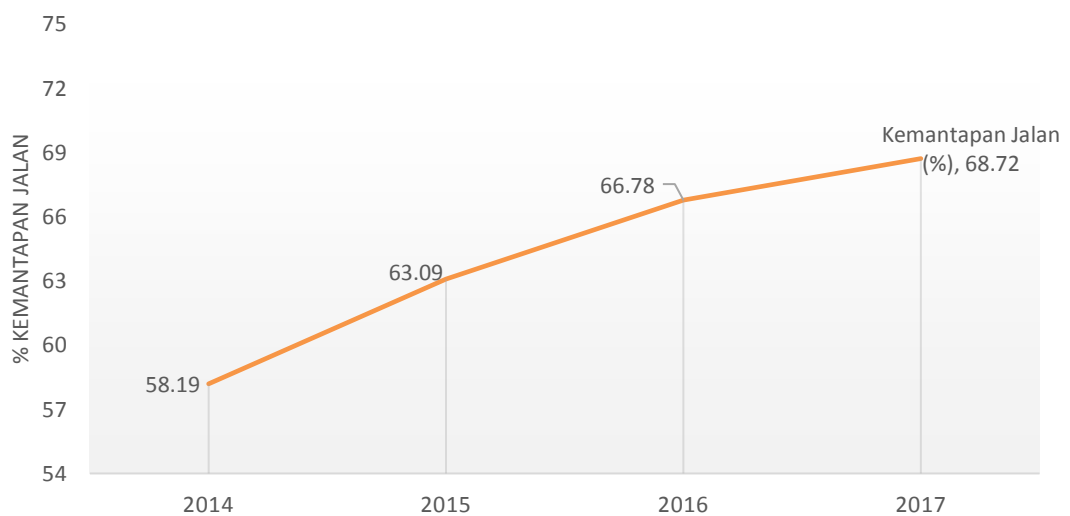


Faktor yang mendukung peningkatan kemantapan jalan kabupaten selain dipengaruhi oleh besarnya kenaikan anggaran yang cukup signifikan setiap tahunnya, juga dipengaruhi oleh terjadinya perubahan status jalan kabupaten yang semula sepanjang 772,31 km, kemudian menjadi sepanjang 478,11 km dan akhirnya menjadi sepanjang 848,296 km, disamping itu juga karena pada tahun 2014 sampai dengan 2017 banyak pekerjaan penanganan jalan yang menggunakan konstruksi

aspal *hotmix* dan *rigid* (beton), sehingga umur dan kekuatan jalan menjadi semakin meningkat.

Grafik capaian kemantapan jalan kabupaten di Kabupaten Ciamis selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.12
 Persentase Capaian Kemantapan Jalan Kabupaten
 Tahun 2014-2017



Untuk mencapai indikator kemantapan jalan kabupaten dilaksanakan melalui 8 (delapan) program yaitu : (1) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan; (2) Program pembangunan jalan dan jembatan; (3) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; (4) Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan; (5) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; (6) Program Perencanaan Tata Ruang; (7) Program Pemanfaatan Ruang; dan (8) Program Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman Perkotaan/Perdesaan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.175.673.901.975,- atau 95,37 % dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 184.198.589.403,- dengan capaian output sebesar 99,54 % dan outcome sebesar 99,54 %.

2. Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan antara panjang saluran irigasi dengan luas areal pertanian untuk irigasi teknis, sedangkan Rasio Jaringan Dalam Kondisi Baik adalah perbandingan antara panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dengan luas area pertanian. Pada tahun 2017, panjang saluran irigasi teknis dalam kondisi baik adalah 44,46 % dari total panjang saluran sepanjang 343.896 m, sedangkan luas areal pertanian irigasi teknis adalah 5.134,813 Ha.

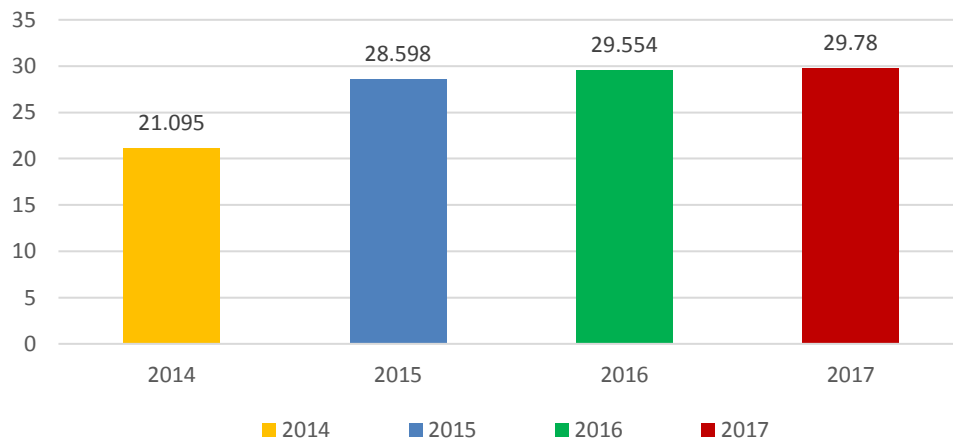
Berdasarkan data dan rumus perhitungan di atas, maka Capaian kinerja Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2017 adalah sebesar 29,780 m/Ha, apabila dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 29,750 m/ha, maka capaian realisasinya adalah sebesar 100,10%, secara perhitungan realisasi nyata, rasio jaringan irigasi mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena area jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami peningkatan, walaupun area jaringan irigasi dalam kondisi rusak ringan banyak yang mengalami kerusakan karena bencana alam, tetapi karena yang dihitung hanya area dalam kondisi baik, maka capaian rasio nyata mengalami peningkatan.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang menunjang pada indikator ini, dengan kenaikan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2015 luas irigasi teknis setelah dipisahkan dari Kabupaten Pangandaran seluas 5.134,813 Ha dengan panjang saluran sepanjang 343.896 m dan persentase irigasi teknis kondisi baik sebesar 42,69% sehingga capaiannya sebesar 28,598 m/Ha.

Sedangkan pada tahun 2016 luas irigasi teknis masih tetap seluas 5.134,813 Ha dengan panjang saluran juga masih tetap sepanjang 343.896 m dan prosentase saluran irigasi teknis kondisi baik sebesar 44,46 % sehingga capaiannya sebesar 29,780 m/Ha

Grafik Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Ciamis selama tiga tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.13
Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2017



Untuk mencapai indikator sasaran Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu (1) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; (2) Program Pengendalian Banjir; dan (3) Program Pembangunan Turap/talud/bronjong dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.524.972.600,- atau 97,45 % dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 44.663.790.450, dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100 %.

Sasaran 11 : Meningkatkan Keselamatan dan Kelancaran Transportasi

Sasaran ini menggambarkan/mendefinisikan tentang jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas selama satu tahun. Bahwa keselamatan lalu lintas merupakan prioritas pembangunan di bidang lalu lintas. Hal ini didasarkan pada angka kecelakaan lalu lintas masih pada tingkat yang memprihatinkan.

Pengukuran terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Meningkatkan keselamatan dan kelancaran transportasi dilakukan melalui 1 (satu) indikator yaitu menurunnya angka kecelakaan lalu lintas, dengan hasil pengukuran sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Transportasi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	324	90,17	340	95,06	340	322	105,29

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui bahwa :

- a. Capaian kinerja sasaran meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi tahun 2017 adalah sebesar 105,29 termasuk dalam kategori Sangat Baik.
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2017 (105,29%) lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 95,06% dan Tahun 2015 sebesar 90,17 %. Sedangkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 322 kasus, jika dibandingkan tahun 2016 mengalami penurunan sejumlah 18 kasus dan mengalami penurunan juga sejumlah 2 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2015.
- c. Perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2017 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 105,29 %.

Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Transportasi
Tahun 2017 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja (%)
1	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	322	340	105,29

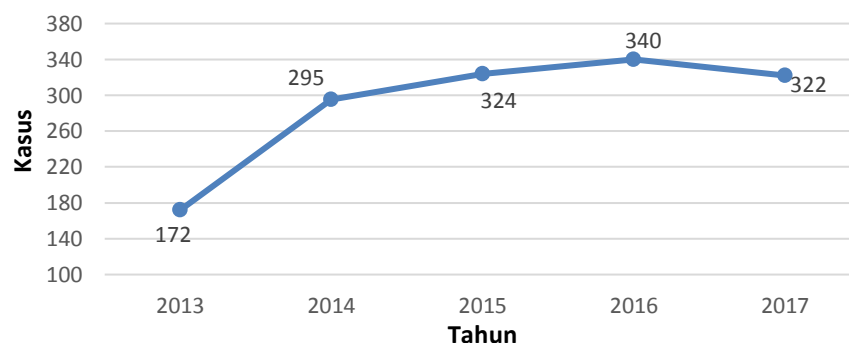
Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas merupakan indikasi dari keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sekarang ini penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu isu nasional yang perwujudannya perlu didukung oleh penyelenggara pemerintah di daerah.

Peningkatan capaian kinerja sasaran meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan tingkat kesadaran para pengguna jalan semakin tinggi dalam mematuhi peraturan berlalu lintas serta didukung oleh program dan kegiatan aksi keselamatan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan pihak Kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas.

Salah satu faktor yang menjadi pendukung keberhasilan yaitu komitmen dari Kepala Daerah dan masyarakat Kabupaten Ciamis untuk mewujudkan Kabupaten Ciamis sebagai Kabupaten yang berkeselamatan sudah dicanangkan sejak tahun 2013. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan yang mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan keselamatan transportasi bukan menjadi kewajiban Kepolisian dan Dinas Perhubungan saja, akan tetapi seluruh pengguna transportasi wajib menjaga keselamatan selama berkendara. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu perilaku (*human error*) pengguna jalan yang kadang lupa memprioritaskan keselamatan lalu lintas sebagai sesuatu yang utama dan prioritas.

Grafik angka kecelakaan lalu lintas selama tiga tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.14
Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2013-2017



Upaya pencapaian sasaran meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi melalui 5 (lima) program, yaitu :

1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
3. Program peningkatan pelayanan angkutan;
4. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas;
5. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

Penyerapan realisasi anggaran program secara keseluruhan adalah sebesar Rp.4.660.971.204,- atau sebesar 99,02 % dari total pagu anggaran Rp.4.707.124.300,- dengan capaian output sebesar 103,87 % dan capaian outcome sebesar 103,87 %.

Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan adalah keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi ke langsung hidup manusia pada suatu wilayah.

Pengukuran terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Poin	-	N/a	-	N/a	69,58	70,02	100,64

Keterangan : (N/A, Not Available) Capaian Kinerja tidak diketahui (tidak bisa diukur) karena indikator kinerja yang digunakan pada tahun tersebut baru diperjanjikan pada tahun 2017

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui bahwa :

- a. Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2017 adalah sebesar 100,64 %, termasuk dalam kategori sangat baik.
- b. Capaian kinerja sasaran tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena indikator kinerja sasaran IKLH baru diperjanjikan pada tahun 2017.
- c. Perbandingan capaian kinerja sasaran Tahun 2017 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga perencanaan menunjukkan capaian kinerja 100 % termasuk kategori sangat baik.

Tabel 3.31
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	%	70,02	70,02	100

Perhitungan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dilakukan melalui 3 (tiga) variabel yaitu :

1. Indeks Pencemaran Air (IPA)
2. Indeks Pencemaran Udara (IPU) dan;
3. Indeks Tutupan Hutan/atau Indeks Tutupan Vegetasi (ITV).

Rumus Perhitungan IKLH

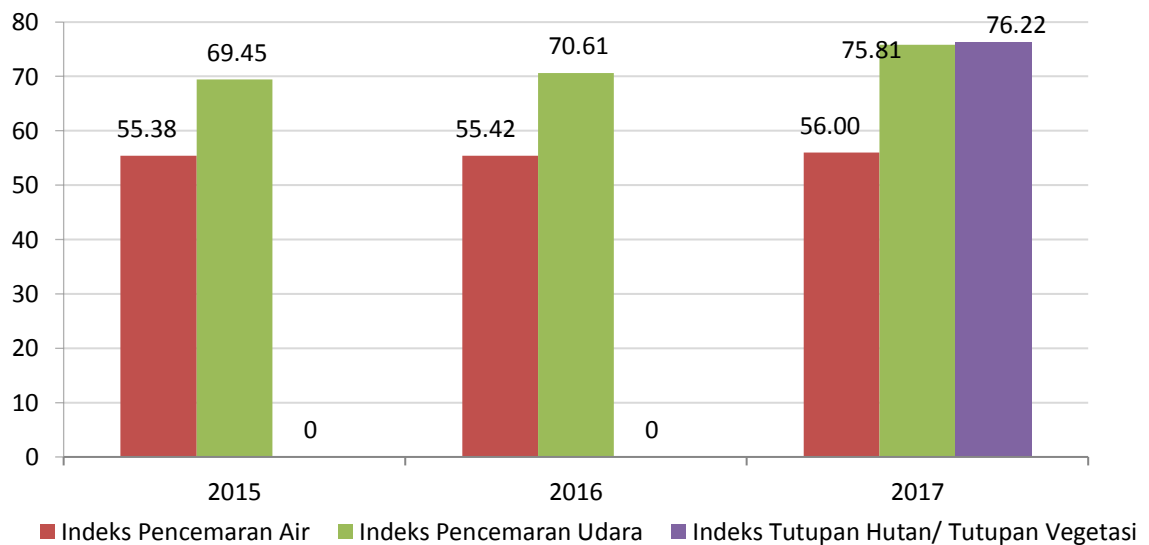
$$\text{IKLH} = 30\% \text{ Indeks Pencemaran Air} + 30\% \text{ Indeks Pencemaran Udara} + 40\% \text{ Indeks Tutupan Hutan/Lahan}$$

Berikut adalah capaian masing-masing variabel indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

Tabel 3.32
Peningkatan IKLH Tahun 2015 s.d. 2017

Variabel IKLH	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Indeks Pencemaran Air	55,38	55,42	56,00
Indeks Pencemaran Udara	69,45	70,61	75,81
Indeks Tutupan Hutan/ Tutupan Vegetasi	n/a	n/a	76,22
IKLH	-	-	70,02

Grafik 3.15
Perkembangan IKLH Kabupaten Ciamis Tahun 2015 - 2017



Faktor yang menjadi pendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang diukur pada aspek kualitas air, udara dan lahan/hutan mencakup :

1. Kelembagaan;
2. Sumber daya manusia;
3. Sarana dan Prasarana;
4. Penegakan hukum lingkungan, dan
5. Kesadaran masyarakat.

Beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup antara lain masih banyaknya kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, pencemaran lingkungan akibat ulah manusia, ketidakpatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan dalam kerangka pengendalian lingkungan hidup serta bencana alam yang dapat merusak lingkungan kapan saja.

Adapun strategi dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengurangi hambatan-hambatan yang ada diantaranya adalah:

1. Peningkatan kualitas air melalui :
 - a. Pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan;
 - b. Pembinaan pengendalian pencemaran terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan;
 - d. Penetapan baku mutu air;
 - e. Penyediaan Tindak Lanjut/Laporan Pengaduan Masyarakat Akibat Dugaan Pencemaran atau Perusakan Lingkungan;
 - f. Penurunan beban pencemaran dari limbah domestic pembangunan Saluran Pengolahan Air Limbah (SPAL) Domestik;
 - g. Inventarisasi dan Identifikasi sumber-sumber pencemaran;
 - h. Pemulihan badan air (danau, sungai, situ, waduk).
2. Peningkatan kualitas udara melalui:
 - a. Pengendalian pencemaran udara dari sector industri, transportasi dan pertambangan;
 - b. Peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca;
 - c. Pemantauan kualitas udara ambien;
3. Peningkatan tutupan lahan/hutan melalui:
 - a. Penguapan upaya rehabilitasi hutan;
 - b. Peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan;
 - c. Rehabilitasi lahan kritis dan terlantar;
 - d. Pengendalian kerusakan ekosistem;

- e. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan melalui : 1). Penetapan Hutan Kota, 2). Penetapan/Penunjukan Tempat-tempat Kawasan Tertentu sebagai Kawasan Konservasi Ekosistem Esensial;
- f. Pembinaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Upaya pencapaian sasaran meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman dilaksanakan melalui 11 (sebelas) program, yaitu :

- (1) Program Pengembangan Perumahan;
- (2) Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- (3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- (4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
- (5) Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;
- (6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- (7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- (8) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- (9) Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
- (10) Program Kawasan Kumuh Perkotaan;
- (11) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup.

Realisasi penyerapan anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp.18.376.044.545,- atau sebesar 98,36 % dari total pagu anggaran Rp.18.681.988.950,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 99,39 %.

Sasaran 13 : Meningkatkan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat

Pengukuran terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dilakukan

melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material) dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatkan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2017			RPJMD		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD Tahun 2017	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material)	%	N/a	N/a	7	7,19	102,77	22,63	7,19	31,79

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui bahwa :

- Capaian kinerja sasaran meningkatnya penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat tahun 2017 adalah sebesar 102,77%, dalam kategori sangat baik.
- Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran tercapai melampaui target yang direncanakan
- Capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator kinerja sasaran baru diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 dan target RPJMD tahun 2017.
- perbandingan realisasi kinerja Tahun 2017 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 31,79 % atau lebih rendah dari pada

capaian kinerja pada perjanjian kinerja tahun 2017. Hal ini disebabkan bahwa target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2017 lebih tinggi dari pada yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2017.

Persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material) sendiri bukan diartikan bahwa tidak ada korban jiwa dan kerugian sebagai dampak dari terjadinya suatu kejadian bencana. Akan tetapi merupakan salah satu alat ukur sejauh mana masyarakat mampu dan mandiri dalam upaya penanggulangan sekiranya terjadi bencana.

Berdasarkan data dan perhitungan di atas, maka capaian indikator kinerja Persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material) tahun 2017 adalah sebesar 7,19 % dari target perjanjian kinerja sebesar 7 %, dengan capaian kinerja sebesar 102,71% yang berarti sangat baik. Hal tersebut terjadi karena pihak-pihak terkait dalam upaya penanganan bencana berupa kegiatan lebih fokus dan mengarah kepada upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan bencana. Dimana paradigma program kegiatan penanggulangan bencana mengalami perubahan dari sebelumnya menitik beratkan pada aspek tanggap darurat (responsive) menjadi preventif (manajemen risiko bencana)

Berdasarkan data hasil rekapitulasi pelaporan dari masyarakat/kecamatan/desa yang diterima, tercatat total taksiran kerugian yang dilaporkan akibat bencana di Kabupaten Ciamis sepanjang Tahun 2017 periode Januari sampai dengan Desember senilai Rp.51.578.925.000,- dengan rumah rusak terdampak sebanyak 6.566 unit pada kriteria rusak ringan, sedang dan berat.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu (1) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dan (2) Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.741.217.435,- atau sebesar 99,86 % dari total pagu anggaran Rp. 1.743.643.713,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Sasaran 14 : Meningkatkan Kinerja Perekonomian

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatkan kinerja perekonomian dilakukan melalui 3 (tiga) indikator yaitu : (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi; (2) Inflasi; dan (3) Tingkat Pengangguran, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kinerja Perekonomian

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	LPE	%	5,04	100	5,02	100	5,03	5,05	100,40
2	Inflasi	%	3,07	150,14	2,75	137,07	4,18	4,16	100,38
3	Pengangguran	%	6,99	73,83	6,95	100	5,26	5,17	101,71
Rata-rata Capaian Kinerja		%		107,99		112,36			100,83

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui bahwa :

- a. Capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja perekonomian tahun 2017 adalah sebesar 100,83 %, dalam kategori sangat baik.
- b. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja yang diukur, seluruhnya tercapai melampaui target.
- c. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2017 (100,83 %), mengalami penurunan sebesar 11,53% tetapi mengalami peningkatan capaian realisasi nyata dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 (112,36 %) juga

mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 7,16 % dibanding capaian kinerja tahun 2015 (107,99 %) tetapi meningkat jika dilihat pada capaian realisasi nyata.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2017 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.35

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kinerja Perekonomian Tahun 2017 Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja (%)
1	LPE	%	5,05	5,03	100,40
2	Inflasi	%	4,16	7,07	141,16
3	Pengangguran	%	5,17	5,40	104,26
Rata-rata Capaian Kinerja					115,27

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 115,27 % atau lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2017 karena target yang direncanakan pada RJPMD tahun 2017 relatif lebih rendah. Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kinerja perekonomian dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program, yaitu :

- (1) Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian;
- (2) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah;
- (3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- (4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- (5) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
- (6) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
- (7) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan;

- (8) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
- (9) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- (10) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Dengan penyerapan/realisasi anggaran sebesar Rp. 6.565.613.442,- atau sebesar 95,18 % dari total pagu anggaran Rp. 6.898.084.950,- dengan capaian output sebesar 98,47 % dan capaian outcome sebesar 99,49 %.

Adapun penjelasan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, yang digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan. Diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/daerah. LPE dapat dihitung dengan rumus :

$$R = \frac{\text{PDRBAdHKt} - \text{PDRBAdHKt1}}{\text{PDRBAdHKt1}} \times 100$$

Keterangan :

r = pertumbuhan ekonomi tahunan pada tahun t terhadap tahun t-1

PDRBAdHKt = Produk Domestik Regional Brutto atas dasar Harga Konstan tahun t

PDRBAdHKt1 = Produk Domestik Regional Brutto atas dasar Harga Konstan tahun t-1

Pada tahun 2017, PDRBAdHKt sebesar (Juta Rp.) 19.610.841,5 dan PDRBAdHKt1 sebesar (Juta Rp.) 18.672.176,4 sehingga realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,05 % dari target sebesar 5,03 % dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,40 % dengan predikat Sangat Baik.

Capaian kinerja tahun 2017 bila dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2016 terlihat meningkat tetapi tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan realisasi kinerja indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

tahun 2017 sebesar 5,05% menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2016 sebesar 5,02% dan tahun 2015 sebesar 5,04%.

Percepatan laju pertumbuhan ini disebabkan oleh meningkatnya beberapa indikator produksi yang memberikan kontribusi cukup berpengaruh bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis seperti sektor Industri Pengolahan, Bangunan, Perdagangan Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta sektor Jasa-jasa.

Upaya pencapaian indikator sasaran LPE dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu (1) Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian; dan (2) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.522.250.742,- atau 98,73% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp.528.964.150, dengan capaian output sebesar 95% dan outcome sebesar 97,44%.

2. Inflasi

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu, sehingga tingkat inflasi adalah tingkat perubahan harga secara umum yang pengukurannya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rate of inflation (year } t) = \frac{\text{Price level (year } t) - \text{Price level (year } t-1)}{\text{Price level (year } t-1)}$$

Pada tahun 2017, realisasi laju inflasi di Kabupaten Ciamis adalah sebesar 4,16% dari target 4,18% sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,38 % termasuk dalam kategori sangat baik. Capaian kinerja tahun 2017 (100,38 %) mengalami penurunan capaian kinerja bila dibandingkan dengan tahun 2016 (137,07 %) dan tahun 2015 (150,14 %). Apabila realisasi kinerja laju inflasi tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2017 menunjukkan capaian

kinerja sebesar 100,38 % sehingga capaian kinerja RPJMD sama dengan capaian kinerja sasaran dikarenakan tidak ada perbedaan target dari keduanya.

Capaian nyata (realisasi) Laju inflasi pada tahun 2017 apabila dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2016 (2,75 %) maka laju inflasi tahun 2017 meningkat/mengalami percepatan sebesar 1,41 %, artinya pengendalian laju inflasi di Kabupaten Ciamis tahun 2017 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2016.

Faktor - faktor yang mempengaruhi Inflasi, antara lain :

a. *DemandPull Inflation*

Timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian, menarik harga ke atas untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan agregat, juga dapat dipengaruhi oleh :

1) *Domestic Inflation*

Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barang secara umum di dalam negeri.

2) *Imported Inflation*

Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang import secara umum.

b. *Cost Push Inflation or Supply Shock Inflation*

Inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi dan penggunaan sumber daya yang kurang efektif.

Upaya pencapaian indikator sasaran Inflasi dilaksanakan melalui 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.853.124.000,- atau 99,39% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp.858.328.250, dengan capaian output sebesar 100% dan outcome sebesar 100%.

3. Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Jadi, apabila ada orang yang tidak bekerja, tetapi dia tidak aktif mencari pekerjaan, dia tidak bisa dikatakan pengangguran.

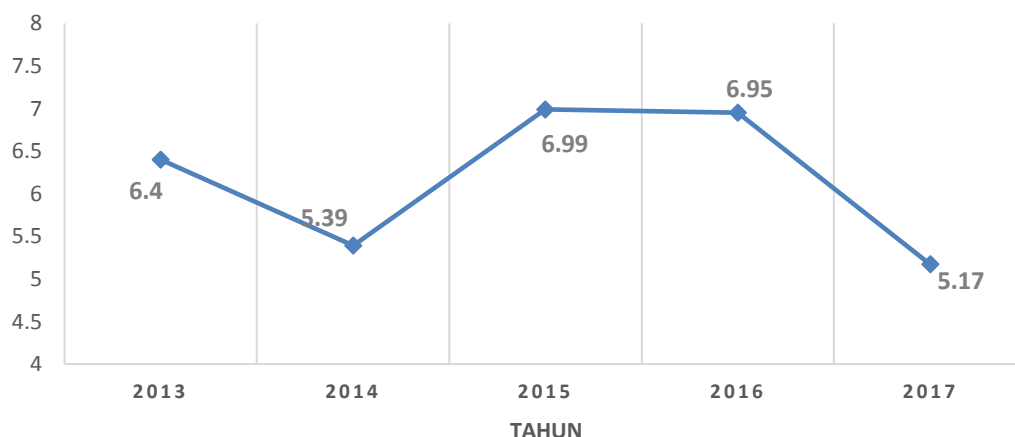
Pengangguran merupakan salah satu turunan dari angka PDRB yang dijadikan indikator kesejahteraan suatu wilayah (daerah), menunjukkan rasio antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Tingkat pengangguran} = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2017, realisasi jumlah angka pengangguran mencapai 29.511 orang sedangkan jumlah angkatan kerja mencapai 634.932 orang, sehingga realisasi tingkat pengangguran pada tahun 2017 sebesar 5,17 % dari target sebesar 5,26 % dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,71%, termasuk dalam kategori sangat baik.

Realisasi (capaian nyata) jumlah pengangguran di Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 (5,17 %) lebih kecil dibanding dengan tahun 2016 (6,95 %) artinya jumlah pengangguran di Kabupaten Ciamis dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi yang mana apabila membandingkan tahun 2016 dengan tahun 2017 tingkat pengangguran di Kabupaten Ciamis menurun sebesar 1,78%. Sedangkan apabila membandingkan dengan tahun 2015 sebesar 6,99%, tingkat pengangguran berkurang sebesar 1,82 %.

Grafik 3.16
Perkembangan Tingkat Pengangguran Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2017



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan menurunnya tingkat pengangguran adalah :

1. Meningkatnya kewirausahaan mandiri
2. Program padat karya yang hampir menyeluruh terhadap sasaran penerima
3. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri
4. Meningkatnya Akal (antar kerja lokal), Akad (antar kerja antar daerah) dan Akan (antar kerja antar negara)

Upaya yang terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran serta memfasilitasi para pencari kerja, antara lain yaitu :

- a. Berbagai Pelatihan keterampilan baik yang diperuntukan bagi pencari kerja maupun bagi masyarakat;
- b. Pemberian kerja sementara untuk mengatasi pengangguran dalam bentuk kegiatan Perluasan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran melalui padat karya infrastruktur pedesaan;
- c. Berbagai pelatihan keterampilan kepada para pencari kerja

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kinerja perekonomian dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program, yaitu :

- (1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;

- (3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
- (4) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan;
- (5) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
- (6) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- (7) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Dengan penyerapan/realisasi anggaran sebesar Rp. 5.190.238.700,- atau sebesar 94,18 % dari total pagu anggaran Rp. 5.510.792.550,- dengan capaian output sebesar 99,24 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Sasaran 15 : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan dilakukan melalui 2 (dua) indikator yaitu :

- (1) PDRB Per kapita (AdHB);
- (2) Paritas daya beli (PPP) (x1000);

dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.36
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	PDRB Per kapita (AdHB)	Rupiah	19.118.860,89	100	20.403.490,70	100	21.795.134,18	21.624.153,17	99,22
2	Daya Beli Masyarakat	Rupiah	8.295.757	-	8.382.032	101,67	8.285.300	8.622.597	104,07
Rata-rata Capaian Kinerja		%		-		100,83			101,64

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui bahwa :

- a. Capaian kinerja sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat tahun 2017 adalah sebesar 101,64 %, dalam kategori sangat baik.
- b. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 1 (satu) indikator tercapai melampaui target dan 1 (satu) indikator tercapai tidak sesuai target.
- c. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2017 (101,64 %), mengalami peningkatan sebesar 0,81 %, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 (100,83 %). Jika dibandingkan dengan tahun 2015 maka capaian kinerja tidak dapat dihitung karena pada tahun 2015 target yang dicantumkan masih menggunakan rumus perhitungan versi lama.
- d. Jika dilihat dari kedua indikator sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 senantiasa mengalami peningkatan capaian realisasi nyata yang cukup signifikan.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2017 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.37

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Tahun 2017 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja (%)
1	PDRB Per kapita (AdHB)	Rupiah	21.624.153,17	21.795.134,18	99,22
2	Daya Beli Masyarakat)	Rupiah	8.622.597	8.285.300	104,07
Rata-rata Capaian Kinerja					101,64

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 101,64 % atau sama dengan capaian kinerja pada Perjanjian Kinerja tahun 2017.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu :

- (1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- (2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM;
- (3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Dengan penyerapan/realisasi anggaran sebesar Rp. 1.010.796.650,- atau sebesar 99,90 % dari total pagu anggaran Rp. 1.011.804.150,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

Adapun penjelasan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. PDRB Per Kapita (AdHB)

PDRB Per Kapita AdHB berlaku adalah salah satu turunan dari angka PDRB yang dijadikan indikator kesejahteraan suatu wilayah (daerah), menunjukkan jumlah rata-rata nilai tambah yang bisa dinikmati oleh setiap penduduk dan dapat dihitung dengan rumus :

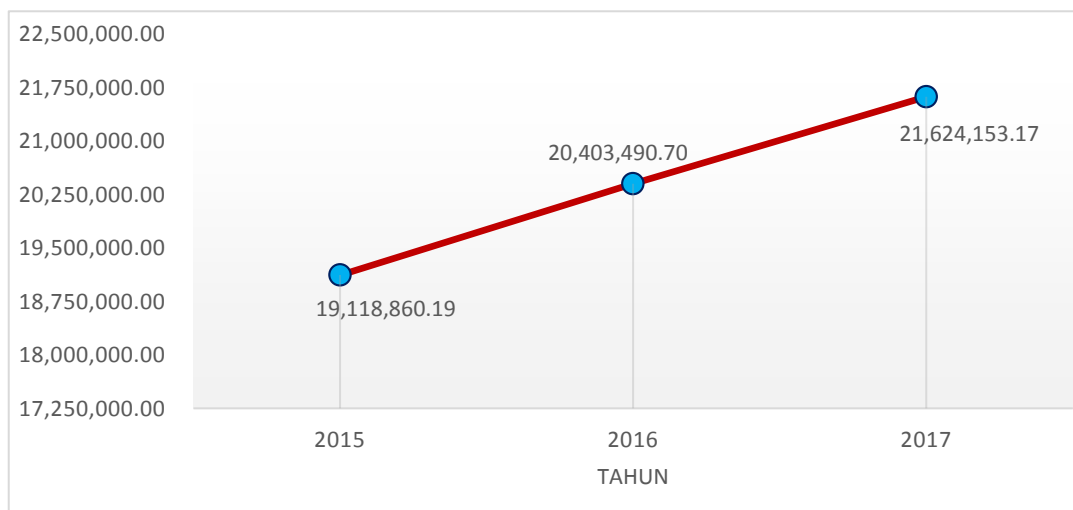
$$\begin{aligned} \text{PDRB per kapita AdHB, t} &= \frac{\text{PDRBAdHB}}{\text{Jumlah Penduduk Tengah Tahun, t}} \\ \text{Jumlah Penduduk Tengah Tahun, t} &= \frac{\text{Jml Pnddk Akhir Thn,t} - \text{Jml Pnddk Awal Thn, t}}{2} \end{aligned}$$

Pada tahun 2017, realisasi PDRB per kapita Atas dasar Harga Berlaku adalah sebesar (Juta Rp.) 25.559.338,2 dan jumlah penduduk tengah tahun sebanyak 1.181.981 jiwa, sehingga realisasi PDRB per kapita AdHB sebesar Rp. 21.624.153,18

dari target sebesar Rp. 21.795.134,18 dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,22 %, dengan predikat Sangat Baik.

Capaian kinerja tahun 2017 lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar 100 %. Sedangkan realisasi kinerja indikator PDRB per kapita Atas dasar Harga Berlaku tahun 2017 sebesar Rp. 21.624.153,18 senantiasa menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2016 sebesar Rp. 20.721.066,- dan tahun 2015 sebesar Rp. 18.713.332,86.

Grafik 3.17
Perkembangan PDRB Perkapita AdHB Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017



Apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2017, maka realisasi kinerja indikator PDRB per kapita Atas dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 21.624.153,- dari target sebesar Rp. 21.795.134,- dengan persentase capaian kinerja RPJMD Tahun 2017 sebesar 99,22 % dengan predikat Sangat Baik atau sama dengan capaian kinerja yang ditargetkan pada perjanjian kinerja tahun 2017.

Upaya pencapaian indikator sasaran PRDB Perkapita AdHB dilaksanakan melalui 1 (satu) program, yaitu Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.295.792.100,- atau 99,66% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp.296.799.600, dengan capaian output sebesar 100% dan outcome sebesar 100%.

2. Daya Beli Masyarakat

Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Manfaatnya adalah untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

Daya beli masyarakat dihitung berdasarkan :

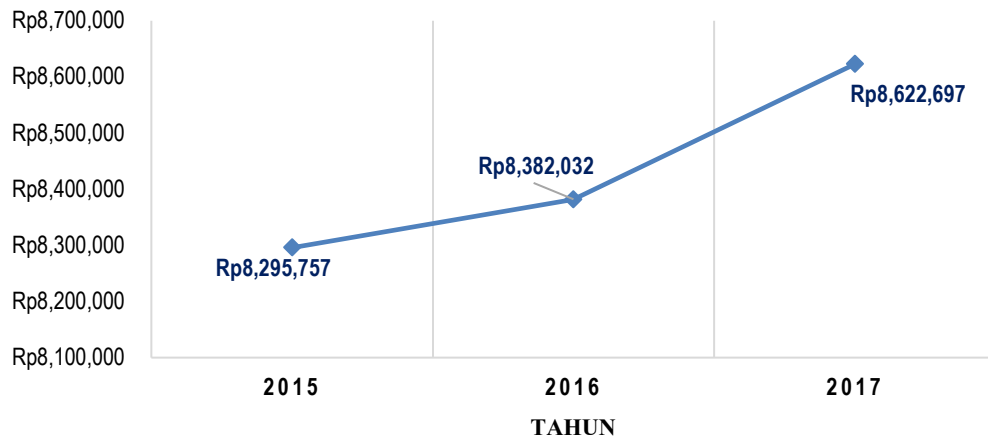
- a. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli;
- b. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100;
- c. Menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan, dan sisanya merupakan komoditas non-makanan. Metode perhitungannya menggunakan Metode Rao.

Realisasi indikator daya beli masyarakat berdasarkan tahun 2017 adalah Rp. 8.622.597,- dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 8.285.300,-. Dengan demikian, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 104,07% atau dengan kategori sangat baik.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, daya beli masyarakat di Kabupaten Ciamis senantiasa mengalami peningkatan. Daya beli masyarakat pada tahun 2017 mencapai Rp. 8.622.697,- sedangkan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 8.382.032 dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 8.295.757,-

Peningkatan daya beli masyarakat dari tahun-tahun sebelumnya disebabkan karena daya beli masyarakat pergerakannya tidak terlepas dari dinamika kinerja ekonomi yang saling terkait dengan kondisi perekonomian regional, nasional, dan internasional yang membaik.

Grafik 3.18
Perkembangan Daya Beli Masyarakat
Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017



Upaya pencapaian indikator sasaran PRDB Perkapita AdHB dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu (1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM dan (2) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.715.004.550,- atau 100% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 715.004.550,- dengan capaian output sebesar 100% dan outcome sebesar 100%.

Sasaran 16 : Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Sasaran ini memberikan gambaran bahwa Kabupaten Ciamis sebagai daerah agraris telah memberikan kontribusi yang besar dalam produksi pertanian dan penyediaan pangan dalam rangka pembangunan pada aspek pertanian di Jawa Barat.

Peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu dari empat sukses pembangunan pertanian, salah satu metode pengukuran sejauhmana tingkat kesejahteraan petani adalah besaran Nilai Tukar Petani (NTP). Konsep Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara indeks yang diterima petani (It) dengan indeks yang dibayar petani (Ib), serta Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yang merupakan ukuran kemampuan rumah tangga pertanian dalam memenuhi kebutuhan usaha pertaniannya. Selain NTP, banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur

kesejahteraan petani, diantaranya adalah data konsumsi dan pengeluaran rumah tangga pertanian yang diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yaitu melalui proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan pada rumah tangga dengan sumber utama pendapatannya dari pertanian.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan petani yang diukur melalui indikator nilai tukar petani (NTP) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.38
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kesejahteraan Petani

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Nilai Tukar Petani	Poin	101,53	-	105,61	-	106,11	112,01	105,56

Keterangan : N/a (Not Available) indikator kinerja sasaran baru diperjanjikan pada tahun 2017, sehingga capaian kinerja untuk tahun-tahun sebelumnya tidak dapat diukur

Berdasarkan tabel pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan petani tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 105,56 %, dengan kategori sangat baik. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun yang lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena indikator kinerja sasaran Nilai Tukar Petani (NTP) baru di perjanjikan pada perjanjian kinerja tahun 2017. Apabila dibandingkan menurut capaian realisasi nyata, capaian tahun 2017 sebesar 112,01 poin lebih besar dari pada capaian tahun 2016 sebesar 105,61 poin dan tahun 2015 sebesar 101,53 poin.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2017 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD yang merupakan tahun ketiga perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 104,20 %, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.39
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tahun 2017 Dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja (%)
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	112,01	107-108 (107,5)	104,20

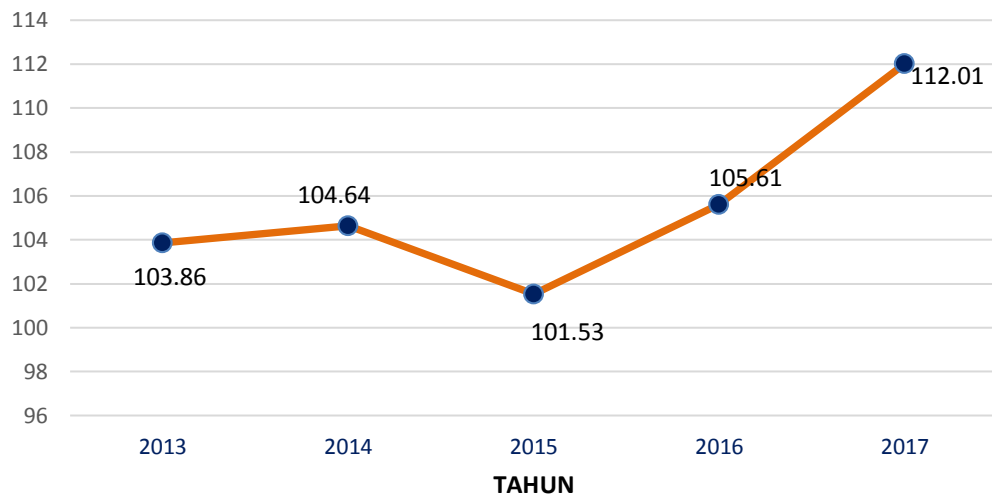
Perhitungan nilai tukar petani (NTP) berdasarkan BPS adalah :

$$NTP = \frac{\text{Indeks harga yang diterima petani } (I_t)}{\text{Indeks harga yang dibayar petani } (I_b)} \times 100$$

Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2017, indeks harga yang diterima petani (I_t) adalah sebesar 141,57 dan indeks harga yang dibayar petani (I_b) sebesar 126,40 maka berdasarkan perhitungan rumus tersebut diatas diperoleh besaran nilai tukar petani (NTP) adalah sebesar 112,01 poin.

Nilai tersebut sudah melampaui target dari yang direncanakan sebesar 106,11 poin pada perjanjian kinerja tahun 2017. Hal tersebut menggambarkan komponen pengeluaran rumah tangga tani atau yang disebut indeks yang dibayar oleh petani umumnya pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga lebih kecil dibandingkan pengeluaran untuk biaya usaha tani (biaya produksi dan penambahan barang modal). Hal ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan harga kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga yang lebih besar akan cepat mempengaruhi indeks yang dibayar petani. Pada Tahun 2017 nilai tukar petani berada pada kondisi yang cukup sejahtera.

Grafik 3.19
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2017



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/tercapainya indikator kinerja NTP diantaranya adalah :

1. Luas lahan garapan yang dikuasai oleh petani, semakin tinggi luas garapan yang dikerjakan oleh petani akan semakin tinggi biaya produksi yang dikeluarkan;
2. Besarnya hasil produksi pertanian yang dijual;
3. Harga jual produk di pasaran yang menjadi variabel penting dan berpengaruh nyata;
4. Harga pupuk dan pestisida yang terjangkau oleh petani sehingga mengurangi beban produksi.

Hambatan yang dikhawatirkan timbul dari lahan tersebut diantaranya potensi alih fungsi lahan yang cukup tinggi terutama dikaitkan dengan kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang cukup tinggi serta alih fungsi ke bidang lainnya misalnya industry dan perdagangan serta fasilitas umum lainnya yang berpotensi terhadap berkurangnya areal pertanian. Selain itu, rendahnya produktifitas pertanian dan harga dasar gabah yang tidak proporsional selalu menjadi ancaman bagi para petani dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Strategi/upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka mengantisipasi potensi masalah tersebut diantaranya yaitu adanya kebijakan

tentang penyelenggaraan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian alih fungsi lahan secara terkoordinasi, penerapan sistem insentif dan disinsentif serta optimalisasi kegiatan-kegiatan penunjang lainnya di bidang pertanian.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kesejahteraan petani dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program yaitu:

- (1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- (2) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan;
- (3) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
- (4) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan;
- (5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;
- (6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
- (7) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- (8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Peternakan dan perikanan;
- (9) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
- (10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan

Penyerapan/ realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp.6.424.057.250,- atau sebesar 95,91% dari total pagu anggaran Rp.6.698.081.250,- dengan capaian output sebesar 106,01 % dan capaian outcome sebesar 77,36%.

Sasaran 17 : Menurunnya Disparitas Pendapatan

Disparitas pendapatan adalah kondisi dimana terjadi suatu ketimpangan pendapatan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Tidak meratanya distribusi pendapatan dapat memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Distribusi pendapatan secara regional maupun nasional yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum.

Pada prinsipnya distribusi pendapatan baik secara regional maupun nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya.

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran menurunnya disparitas pendapatan dilakukan melalui indikator indeks gini, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.40
Capaian Kinerja Sasaran
Menurunnya Disparitas Pendapatan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Gini	Poin	0,332	N/a	0,333	N/a	0,333	0,364	90,69

Keterangan : N/a (Not Available), indikator kinerja sasaran indeks gini baru diperjanjikan pada perjanjian kinerja tahun 2017, sedangkan tahun-tahun sebelumnya tidak diperjanjikan.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas diketahui bahwa :

- Capaian kinerja sasaran menurunnya disparitas pendapatan tahun 2017 adalah sebesar 90,69 %, dengan kategori sangat baik walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan.
- Perbandingan capaian realisasi nyata menunjukkan indeks gini tahun 2017 atau sebesar 0,364 lebih tinggi dari pada tahun 2016 sebesar 0,333 dan tahun 2015 sebesar 0,332 yang berarti mengalami penurunan kinerja setiap tahunnya karena, semakin kecil nilai indeks gini maka semakin merata pendapatan.
- Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2017 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga perencanaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 82,58 % atau lebih rendah dari capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 karena target pada RPJMD tahun 2017 lebih tinggi dari pada yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Tabel 3.41
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Menurunnya Disparitas Pendapatan Tahun 2017 Dengan Target RPJMD

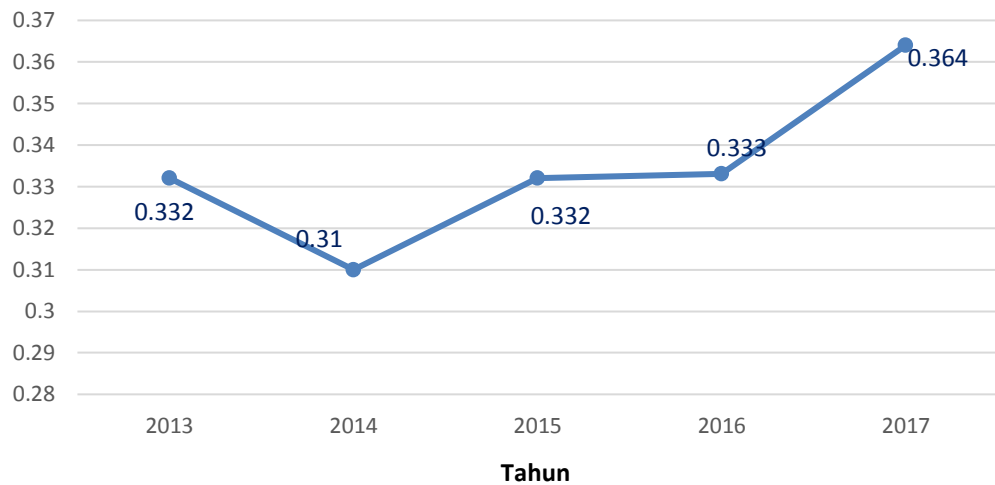
No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Gini	Poin	0,364	0,310	82,58

Indeks Gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, menjelaskan kadar pemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil (Semakin mendekati nol) koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Di lain pihak, koefisien yang kian besar (semakin mendekati satu) mengisyaratkan distribusi yang kian timpang. Angka rasio Gini dapat ditaksir secara visual langsung dari kurva Lorenz, yaitu perbandingan luas area yang terletak diantara kurva Lorenz dan diagonal terhadap luas area segitiga OBC, semakin melengkung kurva Lorenz, akan semakin luas area yang dibagi, rasio Gininya akan semakin besar, menyiratkan distribusi pendapatan yang kian timpang.

Beberapa faktor yang menghambat tidak tercapainya kinerja sasaran adalah :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita;
2. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang;
3. Ketidakmerataan pembangunan antar wilayah;
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambahan lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran;
5. Rendahnya mobilitas sosial;
6. Meredupnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

Grafik 3.20
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2017



Strategi dan upaya untuk memicu menurunnya disparitas pendapatan adalah :

- a. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan dan memprioritaskan anggaran atau belanja langsung untuk kemajuan sektor yang didasarkan pada karakteristik daerah atau sektor unggulan. Pengembangan sektor unggulan ini mempunyai peranan penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan peluang bagi berkembangnya sektor terkait lainnya.
- b. Strategi kebijakan terkait pengembangan sektor yang menjadi karakteristik Kabupaten Ciamis atau sektor unggulan yang dapat meningkatkan tenaga kerja, pada sektor pertanian dibarengi dengan pengembangan industri pengolahannya. Begitupun sektor unggulan lainnya sehingga dapat melibatkan masyarakat lokal dalam menyerap tenaga kerja
- c. Terdapat hubungan yang positif antara pendapatan per kapita terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Maka penyediaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya merupakan kebijakan untuk mengurangi tingkat pengangguran yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Upaya pencapaian sasaran menurunnya disparitas pendapatan dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja; dan (2) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan penyerapan/realisasi anggaran program secara keseluruhan sebesar Rp.8.206.915.000,- atau sebesar 98,22 % dari total pagu anggaran Rp.8.355.966.000,- dengan capaian output sebesar 100% dan capaian outcome sebesar 100%.

Sasaran 18 : Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi, Sistem Informasi dan Kelembagaan Pangan

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan dilakukan melalui 3 (tiga) indikator, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.42

**Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi, Sistem Informasi dan Kelembagaan Pangan**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Cadangan pangan daerah dan masyarakat;	Ton	68,6	98	83	103,8	97,8	97,8	100
2	Stabilisasi harga dan pasokan pangan	%	100	111,11	100	100	90	90	100
3	Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	95,3	95,3	104,5	104,5	100	102,9	102,9
Rata-rata Capaian Kinerja				102,47		102,77			100,97

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas, diketahui beberapa hal sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan tahun 2017 adalah sebesar 100,97%,

dalam kategori sangat baik. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 (102,77%) maka capaian kinerja tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,8 %. Selanjutnya dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 (102,47 %) maka capaian kinerja tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,5 %.

- b. Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari masing-masing indikator menunjukkan dari 3 (tiga) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 1 (satu) indikator melampaui target dan 2 (dua) indikator tercapai sesuai target.
- c. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 dengan beberapa tahun yang lalu menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja, secara umum menunjukkan rata-rata capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya kecuali untuk indikator Cadangan Pangan Daerah dan Masyarakat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Sedangkan perbandingan realisasi pencapaian sasaran sampai dengan Tahun 2017 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.43

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi, Sistem Informasi dan
Kelembagaan Pangan Tahun 2017 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja (%)
1	Ketersediaan Cadangan pangan daerah dan masyarakat :	Ton	97,8	135	72,44
2	Stabilisasi harga dan pasokan pangan	%	90	90	100
3	Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	102,9	100	102,9
Capaian Rata-rata Kinerja					91,78

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2017, yang merupakan tahun ketiga perencanaan, menunjukkan capaian kinerja sebesar 91,78 %. Capaian kinerja pada RPJMD Tahun

2017 ini lebih rendah dibandingkan capaian dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dikarenakan ada beberapa indikator dalam RPJMD yang memiliki target lebih tinggi daripada target yang ada dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan; (2) Program Peningkatan Produksi Pertanian; dan (3) Program Peningkatan Produksi Perkebunan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.576.552.300,- atau sebesar 99,11 % dari total pagu anggaran Rp. 8.653.637.100,- dengan capaian output sebesar 100% dan capaian outcome sebesar 100%.

Penjelasan/analisa capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan : Cadangan Pangan Daerah dan Masyarakat

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu (1) produk dalam negeri, (2) pemasokan pangan, dan (3) pengelolaan cadangan pangan.

Cadangan pangan daerah dan masyarakat merupakan penjumlahan antara cadangan pangan daerah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan daerah adalah cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota melalui kegiatan pengadaan beras berdasarkan harga penjualan beras di luar penugasan pemerintah yang telah ditetapkan dari perusahaan umum (Perum) BULOG. Sedangkan Cadangan Pangan Masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola oleh Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Dengan demikian, secara matematis ketersediaan cadangan pangan daerah dan masyarakat dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Cadangan pangan daerah dan masyarakat} &= \text{Cadangan pangan daerah} &+ \text{Cadangan pangan masyarakat} \\ &= 22 \text{ Ton} &+ 75,8 \text{ Ton} \\ &= 97,8 \text{ Ton} \end{aligned}$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas diketahui bahwa cadangan pangan daerah dan masyarakat di Kabupaten Ciamis tahun 2017 adalah sebesar 97,8 ton beras dari target yang ditetapkan sebesar 97,8 ton beras, dengan capaian kinerja sebesar 100 % atau kategori sangat baik. Bila dibandingkan dengan tahun 2016 (80 ton), jumlah cadangan pangan daerah dan masyarakat di Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 17,8 ton beras atau sebesar 22,25%.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka mencapai atau meningkatkan cadangan pangan daerah dan masyarakat di Kabupaten Ciamis adalah melalui :

- a. Pengembangan sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan;
- b. Pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan);
- c. Penguatan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya;
- d. Pengembangan sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan mengoptimalkan peran Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

Dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut, terdapat kendala atau hambatan yang ditemui antara lain :

- a. Terbatasnya cadangan pangan daerah untuk mengatasi kondisi darurat bencana alam (terdapat 22 ton beras dari target SPM 60 ton beras);
- b. Terbatasnya SDM pengelola lumbung dalam menguatkan kelembagaan lumbung pangan .

Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan beras mengacu kepada target SPM serta mengadakan pelatihan dan pembinaan pengelolaan lumbung pangan masyarakat.

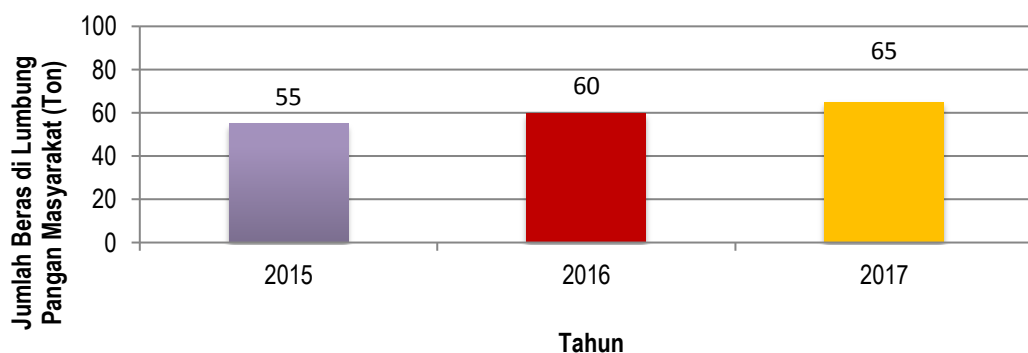
Besarnya Cadangan Pangan Masyarakat

Cadangan padi/beras di lumbung adalah jumlah padi/beras yang ada di lumbung pangan masyarakat (LPM) berdasarkan data laporan kecamatan setiap bulannya selama satu tahun berjalan. Cadangan padi/beras di lumbung merupakan bagian dari Cadangan Pangan Masyarakat.

Pada tahun 2017, jumlah Cadangan padi/beras di lumbung pangan masyarakat (LPM) se-Kabupaten Ciamis sebesar 65 Ton beras (setara dengan 103,6 ton gabah). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 jumlah Cadangan padi/ beras di lumbung pangan masyarakat (LPM) di Kabupaten Ciamis adalah sebesar 95,6 ton gabah atau setara dengan 60 ton beras, tahun 2015 sebesar 87,7 ton gabah atau setara dengan 55 ton beras. Dengan demikian jumlah Cadangan padi/ beras di lumbung pangan masyarakat (LPM) di Kabupaten Ciamis setiap tahun senantiasa menunjukkan peningkatan.

Grafik perkembangan Cadangan padi/ beras di lumbung pangan masyarakat (LPM) di Kabupaten Ciamis selama lima tahun terakhir dari tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.21
Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat di Kab. Ciamis Tahun 2015-2017



Dalam rangka mencapai atau meningkatkan Cadangan gabah/beras di lumbung pangan masyarakat (LPM), upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lumbung pangan serta optimalisasi sumberdaya yang tersedia dan penguatan kapasitas kelembagaannya sehingga Cadangan gabah/beras di lumbung pangan masyarakat (LPM) dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Beberapa kendala atau hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut antara lain :

- (1) Aturan LPM/AD ART yang belum jelas dan tegas
- (2) Belum teratur melaksanakan RAT sebagai forum pertanggungjawaban.
- (3) Pembukuan dan administrasi dan Neraca LPM belum lengkap.
- (4) Porsi untuk pinjaman, stok opname dan penjualan belum diatur.
- (5) Kualifikasi dan kewibawaan pengurus.
- (6) Pelaporan ke kabupaten tidak teratur dan tidak lengkap.
- (7) Kesadaran Pengurus dan Anggota Kurang Optimal

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut antara lain :

- (1) Kesadaran LPM laporan ke kabupaten tepat waktu dan dilakukan secara kontinyu.
- (2) Pertanggungjawaban dan keterbukaan diantara pengurus dan anggota kelompok secara kekeluargaan.
- (3) Pengurus di harapkan lebih selektif dalam memberikan pinjaman kepada anggota kelompok.
- (4) Pinjaman kepada anggota harus berdasarkan kepada AD/ART Kelompok.
- (5) Adanya rasa tanggungjawab dari peminjam untuk mengembalikan pinjamannya.

- (6) Diharapkan adanya usaha lain selain dari simpan pinjam gabah yang dananya bersumber dari keuntungan hasil simpan pinjam
- (7) Diharapkan kelompok mempunyai simpanan wajib gabah bagi anggotanya.

Besarnya Cadangan Pangan Daerah

Cadangan gabah daerah atau cadangan pangan daerah adalah cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota melalui kegiatan pengadaan beras berdasarkan harga penjualan beras di luar penugasan pemerintah yang telah ditetapkan dari perusahaan umum (Perum) BULOG. Besar kecilnya cadangan ini sangat tergantung kepada jumlah anggaran tersedia untuk CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Daerah) dan harga jual beras di luar penugasan pemerintah yang telah ditetapkan dari perusahaan umum (Perum) BULOG.

Pada tahun 2017, jumlah pengadaan CPPD sebesar 5 ton beras atau setara dengan 7,96 ton gabah. Pengadaan pada tahun 2016, jumlah CPPD sebesar 9 ton beras atau setara dengan 14,34 ton gabah. Pengadaan pada tahun 2015 sebesar 8 ton beras atau setara dengan 12,75 ton gabah. Dengan demikian total pengadaan CPPD pada tahun 2015-2017 di Kabupaten Ciamis sebesar 22 ton beras atau setara dengan 35,06 ton gabah.

Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2017, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menyalurkan bantuan berupa Beras CPPD tersebut kepada Korban Bencana gempa di Kecamatan Pamarican, Banjaranyar, Purwadadi, Banjarsari, Cijeungjing, Ciamis, Baregbeg dan Tambaksari sebanyak 7.5 ton. Bantuan disalurkan kepada 500 KK yang tersebar di 18 Desa. Dengan adanya penyaluran tersebut, maka jumlah CPPD di Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 sebesar 14,5 ton beras atau setara dengan 23,11 ton gabah.

Berdasarkan kondisi tersebut, capaian kinerja besarnya cadangan gabah daerah sudah mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 22 ton beras atau setara dengan 35,06 ton gabah.

Dalam rangka mencapai atau meningkatkan cadangan pangan daerah di Kabupaten Ciamis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan cadangan pangan daerah setiap tahun, sehingga cadangan pangan daerah dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain terbatasnya anggaran dalam penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah, sehingga target SPM sebesar 60 ton beras pada tahun 2017 belum dapat dicapai (baru terealisasi sebesar 36,67 ton). Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan beras mengacu kepada target SPM.

2. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Stabilisasi harga dan pasokan pangan menggambarkan fluktuasi (kenaikan atau penurunan) harga dan pasokan selama kurun waktu tertentu. Semakin kecil fluktuasi harga pada kurun waktu tersebut, maka kondisi harga dikatakan stabil dan sebaliknya. Fluktuasi harga/pasokan dapat diukur dengan nilai koefisien variasi (CV). Semakin kecil CV maka harga/pasokan semakin stabil. Indikator stabilitas harga dan pasokan pangan digunakan untuk memantau dan melakukan intervensi secara cepat jika harga dan pasokan pangan di suatu wilayah tidak stabil.

- 1) Stabilitas Harga (SH) dan Stabilitas Pasokan Pangan (SP) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$SK = \frac{\sum_{i=1}^n SK_i}{n}$$

Keterangan :

K = $\begin{cases} \text{H untuk Harga} \\ \text{P untuk Pasokan} \end{cases}$

SH_i = Stabilitas Harga komoditas ke i

SP_i = Stabilitas Pasokan komoditas ke i

i = 1,2,3...n

n = jumlah komoditas

dimana :

Stabilitas Harga (SH) digambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

Stabilitas Pasokan (SP) digambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

- 2) Stabilitas harga dan pasokan komoditas ke i dihitung dengan menggunakan rumus :

$$SKi = \left[2 - \frac{CVKRi}{CVKTi} \times 100\% \right]$$

Keterangan :

K = { H untuk Harga
P untuk Pasokan

CVKRi = Koefisien keragaman Realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

CVKTi = Koefisien keragaman Target untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

- 3) CVKRi dihitung dari rumus sebagai berikut :

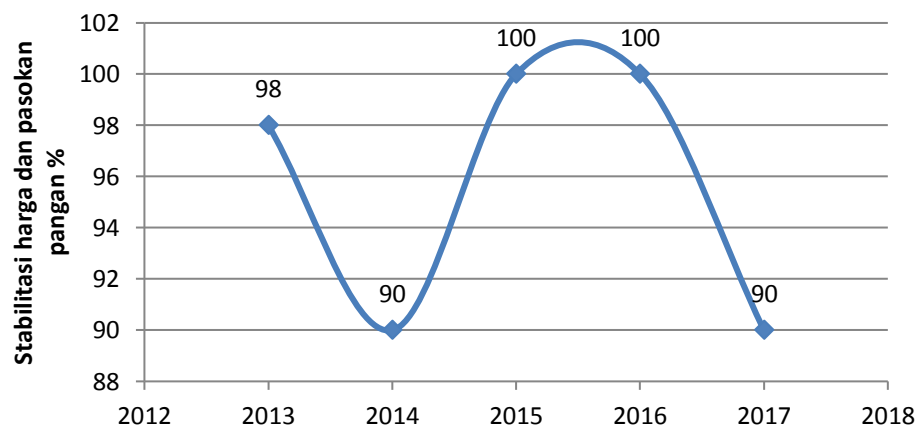
$$CVKRi = \frac{SDKRi}{HKRi} \times 100\%$$

Pada tahun 2017, Stabilisasi harga dan pasokan pangan di Kabupaten Ciamis menunjukkan angka 90%, dari target yang ditetapkan sebesar 90% dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 Stabilisasi harga dan pasokan pangan di Kabupaten Ciamis adalah sebesar 100% dan tahun 2015 sebesar 100%. Dengan demikian kondisi harga dan pasokan pangan di Kabupaten Ciamis setiap tahun senantiasa stabil.

Grafik perkembangan Stabilisasi harga dan pasokan pangan di Kabupaten Ciamis selama lima tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.22

Perkembangan Harga dan Pasokan Pangan Di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2017



Dalam rangka mencapai atau meningkatkan Stabilisasi harga dan pasokan pangan, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah melakukan pemantauan terhadap pasokan dan harga pangan guna mengantisipasi terjadinya gejolak harga sehingga Stabilisasi harga dan pasokan pangan dapat tercapai setiap tahunnya.

Beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut antara lain belum terdapat cara pengumpulan data dan pemantauan pasokan bahan pangan antar wilayah yang memenuhi kriteria tepat, cepat dan akurat. Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui koordinasi dan kerjasama antar berbagai instansi terkait karena secara umum masalah distribusi dan stabilitas harga pangan adalah merupakan masalah yang memerlukan penanganan bersama.

3. Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)

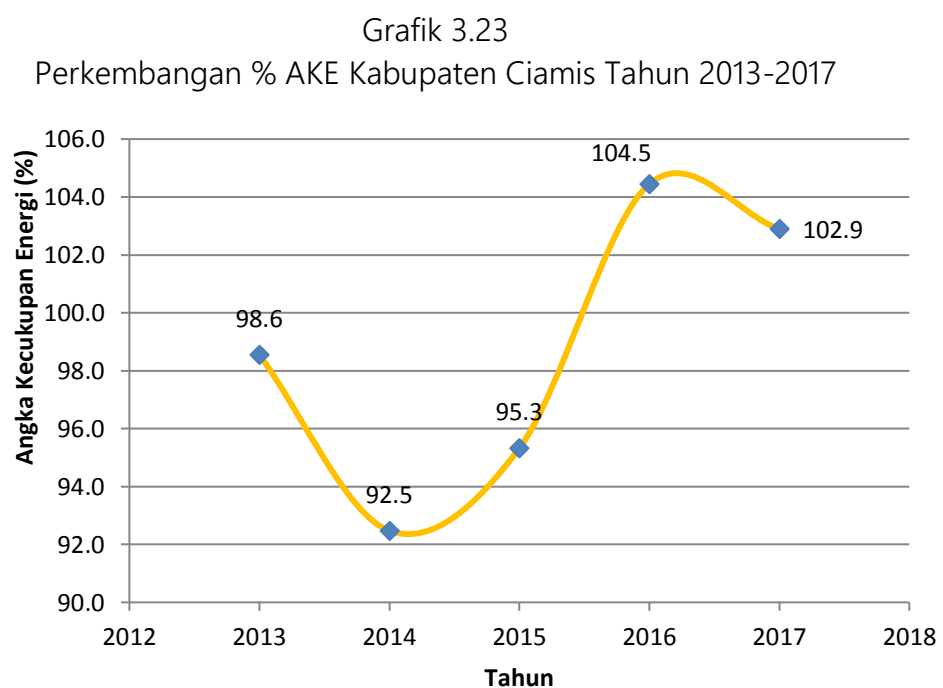
Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah banyaknya asupan makanan dari seseorang yang seimbang dengan pengeluarannya sesuai dengan susunan dan ukuran tubuh, tingkat kegiatan jasmani dalam keadaan sehat dan mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan secara ekonomis dalam jangka waktu lama. Angka kecukupan energi dinyatakan dalam satuan kalori dengan rumus perhitungan

$$\% \text{ AKE} = \frac{\text{Total Capaian Konsumsi Energi per Hari (Kal/kap/hari)}}{\text{Standar Konsumsi Energi per Hari (Kal/kap/hari)}} \times 100$$

Pada tahun 2017, nilai capaian Persentase AKE sebesar 102,9% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 102,9% dan menunjukkan predikat/kategori sangat baik. Persentase AKE sebesar 102,9% menunjukkan kondisi konsumsi energi penduduk di Kabupaten Ciamis termasuk kategori tahan pangan. Berdasarkan Permentan No 65 tahun 2010 tentang

kriteria jumlah konsumsi pangan, persentase AKE dengan nilai 90-119% dikategorikan normal (tahan pangan). Apabila dilihat dari aspek kuantitas konsumsi pangan penduduk sudah memenuhi standar yang ditetapkan artinya volume pangan yang dikonsumsi cukup untuk memenuhi kebutuhan layak untuk hidup sehat.

Grafik perkembangan nilai capaian persentase AKE Kabupaten Ciamis selama lima tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut :



Pencapaian % AKE pada tahun 2017 sebesar 102,9% menunjukkan bahwa capaian konsumsi energi penduduk Kabupaten Ciamis sudah memenuhi bahkan melebihi angka kecukupan energi ideal yaitu 100%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, yakni sebesar 104,5%. Hal ini terjadi karena adanya penurunan konsumsi energi yang berasal dari adanya penurunan konsumsi energi kelompok padi-padian sedangkan konsumsi energi yang berasal dari kelompok pangan hewani mengalami peningkatan dan sedikit peningkatan pada kelompok umbi-umbian.

Dalam rangka meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah melalui kegiatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Ciamis, yang sudah dimulai sejak tahun 2010. Sejalan dengan perkembangan informasi, teknologi dan kondisi sosial masyarakat, kegiatan tersebut dipadukan dengan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, yang terdiri dari sosialisasi kegiatan pemanfaatan pekarangan dilanjutkan dengan pemberian bantuan kepada kelompok wanita tani.

Dalam perkembangannya, kegiatan optimalisasi lahan pekarangan tersebut semakin diperbaiki dengan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari. Sampai tahun 2017 kelompok wanita yang sudah difasilitasi kegiatan KRPL sebanyak 32 KWT. Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain sulitnya mengubah pola pikir masyarakat mengenai pengembangan pola konsumsi pangan yang lebih beragam dengan memanfaatkan hasil pekarangan untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu dengan pangan lokal.

Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu dengan sosialisasi secara berkesinambungan mengenai pola konsumsi pangan B2SA kepada anak sekolah, kelompok wanita tani ataupun kepada masyarakat luas lainnya melalui media promosi seperti leaflet, banner, dan pameran produk pangan lokal pada momen peringatan Hari Pangan Sedunia.

Sasaran 19 : Meningkatnya Jumlah Desa Swasembada

Secara umum Desa Swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional.

Desa swasembada merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek social dan ekonomi, oleh karena itu meningkatnya jumlah desa swasembada menjadi target sasaran yang ingin di wujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Pengukuran terhadap capaian sasaran meningkatnya jumlah desa swasembada dilakukan melalui indikator jumlah desa swasembada, dengan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.43
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Jumlah Desa Swasembada

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	10	-	44	110	50	59	118

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas, diketahui beberapa hal sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah desa swasembada tahun 2017 menunjukkan capaian sebesar 118 %, dengan kategori sangat baik.
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja (capaian nyata) dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu menunjukkan :

- Capaian nyata jumlah Desa tertinggal di Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 dan tahun 2015. Sebanyak 44 Desa pada tahun 2016 dan sebanyak 10 desa pada tahun 2015.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2017 dengan rencana/target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga perencanaan juga menunjukkan capaian kinerja sebesar 118 %, sebagaimana tabel di bawah ini :

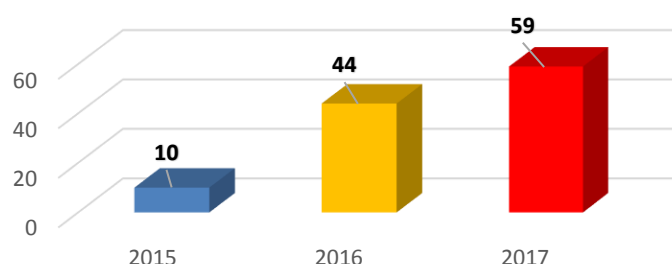
Tabel 3.44
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Jumlah Desa Swasembada Tahun 2017 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2017	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Desa Swasembada	Desa	59	50	118

Meningkatnya jumlah desa swasembada dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah faktor interaksi (hubungan) dan lokasi desa. Desa yang berdekatan dengan kota akan mengalami perkembangan yang lebih cepat dibandingkan desa lainnya akibat pengaruh kota yang dianggap positif.

Desa swasembada itu sendiri didukung oleh beberapa aspek yang salah satunya adalah Sosial dan Ekonomi. Di desa swasembada akan kita dapatkan berbagai keperluan hidup pokok telah tersedia, lembaga ekonomi dan sosial budaya sudah lebih modern, mata pencaharian penduduk sudah beraneka ragam, alat-alat teknis sudah modern dan hubungan dengan kota/wilayah sekitarnya berjalan lancar.

Grafik 3.24
Perkembangan Jumlah Desa Swasembada di Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017



Keberpihakan pada pembangunan perdesaan pada masa reformasi ditingkatkan menjadi bagian dari program pembangunan nasional. Keberpihakan ini dirumuskan secara sektoral, sebagai pengembangan sektor pertanian, baik pertanian lahan basah dan lahan kering, dan perikanan yang umumnya berlokasi di perdesaan. Sedangkan agenda pembangunan pada tingkat propinsi dan kota/kabupaten, sebagian besar berkenaan dengan peningkatan akses pada pelayanan umum sebagai pendukung kesejahteraan rakyat, pengurangan kesenjangan antardesa, desa-kota dan antar kota. Oleh karena itu, semakin banyaknya desa swasembada maka kemandirian pedesaan akan semakin tinggi.

Tabel 3.45
Klasifikasi Desa Swasembada di Kabupaten Ciamis Tahun 2017

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI	KATEGORI	TIPOLOGI
1	BANJARSARI	CIBADAK	SWASEMBADA	MULA	Perindustrian/Jasa
2	BANJARSARI	SINDANGSARI	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
3	LAKBOK	SUKANAGARA	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
4	PURWADADI	KUTAWARINGIN	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
5	PURWADADI	PURWADADI	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
6	PURWADADI	PURWAJAYA	SWASEMBADA	LANJUT	Persawahan
7	PURWADADI	SUKAMULYA	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
8	PAMARICAN	SIDAMULIH	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
9	PAMARICAN	PAMARICAN	SWASEMBADA	LANJUT	Persawahan
10	PAMARICAN	SUKAHURIP	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
11	CIDOLOG	CIPARAY	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
12	CIDOLOG	JANGGALA	SWASEMBADA	LANJUT	Persawahan
13	CIDOLOG	HEGARMANAH	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
14	CIMARAGAS	BOJONGMALANG	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
15	CIMARAGAS	JAYARAKSA	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
16	CIJEUNGJING	KARANGKAMULYAN	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
17	CISAGA	SIDAMULYA	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
18	CISAGA	CISAGA	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
19	CISAGA	WANGUNJAYA	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
20	CISAGA	BANGUNHARJA	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
21	TAMBAKSARI	KASO	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
22	RANCAH	CILEUNGSIR	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
23	RANCAH	DADIHARJA	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
24	RAJADESA	RAJADESA	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
25	RAJADESA	SIRNABAYA	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
26	RAJADESA	TIGAHERANG	SWASEMBADA	MULA	Perladangan
27	SUKADANA	BUNTER	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
28	SUKADANA	MARGAHARJA	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
29	CIAMIS	IMBANAGARA	SWASEMBADA	MULA	Perindustrian/Jasa

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI	KATEGORI	TIPOLOGI
30	BAREGBEG	MEKARJAYA	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
31	BAREGBEG	KARANGAMPEL	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
32	CIKONENG	MARGALUYU	SWASEMBADA	MULA	Perindustrian/Jasa
33	CIKONENG	NASOL	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
34	CIKONENG	SINDANGSARI	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
35	SINDANGKASIH	SUKARAJA	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
36	SINDANGKASIH	SUKASENANG	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
37	CIHAURBEUTI	SUKAHURIP	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
38	CIHAURBEUTI	SUKAMAJU	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
39	CIHAURBEUTI	PAMOKOLAN	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
40	SADANANYA	WERASARI	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
41	CIPAKU	MEKARSARI	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
42	CIPAKU	PUSAKASARI	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
43	CIPAKU	SELAMANIK	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
44	CIPAKU	CIAKAR	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
45	JATINAGARA	CINTANAGARA	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
46	PANAWANGAN	KERTAYASA	SWASEMBADA	MADYA	Persawahan
47	PANAWANGAN	PANAWANGAN	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
48	PANAWANGAN	SAGALAHERANG	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
49	PANAWANGAN	NAGARAPAGEUH	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
50	PANAWANGAN	BANGUNJAYA	SWASEMBADA	LANJUT	Persawahan
51	PANAWANGAN	KERTAJAYA	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
52	KAWALI	CITEUREUP	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
53	LUMBUNG	SUKARAHARJA	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
54	LUMBUNG	RAWA	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
55	LUMBUNG	SADEWATA	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
56	PANJALU	CIOMAS	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
57	PANJALU	PANJALU	SWASEMBADA	MULA	Perindustrian/Jasa
58	SUKAMANTRI	SINDANGLAYA	SWASEMBADA	MULA	Persawahan
59	PANUMBANGAN	PAYUNGAGUNG	SWASEMBADA	MULA	Persawahan

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya Jumlah Desa Swasembada dilaksanakan melalui 6 (enam) program, yaitu :

- (1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
- (2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- (3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
- (5) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- (6) Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintah Desa

Penyerapan realisasi anggaran program secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 3,893,384,800,- atau sebesar 84,27 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 4,620,298,300,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Ciamis dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis dengan total belanja langsung urusan wajib dan non urusan sebesar Rp. 962.765.507.516,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.913.141.077.434,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,85%.

Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017, komposisi belanja APBD Kabupaten Ciamis, sebagai berikut :

Tabel 3.46
Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.671.207.552.059	1.612.830.209.580	96,51
2.	Belanja Langsung	962.765.507.516	913.141.077.434	94,85
	JUMLAH	2.633.973.059.575	2.525.971.287.014	95,90

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 63,85 % dari realisasi belanja Kabupaten Ciamis di tahun 2017 dan sisanya sebesar 36,15 % disumbangkan oleh belanja langsung. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Kabupaten Ciamis yang diperjanjikan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.962.765.507.516,- dengan realisasi sebesar Rp.913.141.077.434,- atau 94,85% dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.47
Pagu Anggaran dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tahun Anggaran 2017

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatkan Kualias Sumber Daya Manusia	461.860.794.516	432.639.002.729	93,67
	01. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	159.876.634.375	143.738.911.148	89,91
	02. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	289.388.600.441	276.767.539.407	95,64
	03. Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk	4.876.523.100	4.639.121.765	95,13
	04. Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/ kemasyarakatan	5.664.231.100	5.509.905.759	97,28
	05. Menurunnya tingkat kemiskinan	2.054.805.500	1.983.524.650	96,53
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efisien Dan Efektif Serta Penguatan Kemitraan Pemerintah Dengan Dunia Usaha Dan Masyarakat	210.352.068.434	201.528.041.504	95,81
	06. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	134.322.362.728	128.475.291.453	95,65
	07. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	68.228.169.606	65.289.727.142	95,69
	08. Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha	2.283.154.450	2.262.323.759	99,09
	09. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	5.518.381.650	5.500.699.150	99,68
3	Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	253.995.136.816	243.977.107.759	96,06
	10. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	228.862.379.853	219.198.874.575	95,78
	11. Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi	4.707.124.300	4.660.971.204	99,02
	12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	18.681.988.950	18.376.044.545	98,36
	13. Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat	1.743.643.713	1.741.217.435	99,86
4	Membangun Perekonomian Daerah Yang Tangguh	31.617.603.450	30.783.934.642	97,36
	14. Meningkatnya kinerja perekonomian	6.898.084.950	6.565.613.442	98,47
	15. Meningkatnya pendapatan masyarakat	1.011.804.150	1.010.796.650	99,90
	16. Meningkatnya kesejahteraan petani	6.698.081.250	6.424.057.250	95,91
	17. Menurunnya disparitas pendapatan	8.355.996.000	8.206.915.000	98,22
	18. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan	8.653.637.100	8.576.552.300	99,11

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
5	Meningkatkan Percepatan Pembangunan Perdesaan	4.939.904.300	4.212.990.800	85,28
	19. Meningkatnya jumlah desa swasembada.	4.939.904.300	4.212.990.800	85,28
Jumlah Keseluruhan		962.765.507.516	913.141.077.434	94,85

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektifitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kabupaten Ciamis pada tahun 2017.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Ciamis, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran pada urusan wajib yang digunakan pada tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.48
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatkan Kualias Sumber Daya Manusia	6	98,95	432.639.002.729	93,67
	01. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	2	101,03	159.876.634.375	89,91
	02. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	100,72	289.388.600.441	95,64
	03. Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk	1	100	4.876.523.100	95,13
	04. Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan	1	100	5.664.231.100	97,28
	05. Menurunnya tingkat kemiskinan	1	92,98	2.054.805.500	96,53
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efisien Dan Efektif Serta Penguatan Kemitraan Pemerintah Dengan Dunia Usaha Dan Masyarakat	6	106,37	201.528.041.504	95,81
	06. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	3	101,23	128.475.291.453	95,65
	07. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	100	65.289.727.142	95,69
	08. Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha	1	100	2.262.323.759	99,09

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Anggaran	%
09.	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	1	124,24	5.500.699.150	99,68
3	Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	5	102,23	243.977.107.759	96,06
10.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	2	100,21	219.198.874.575	95,78
11.	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi	1	105,29	4.660.971.204	99,02
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	100,64	18.376.044.545	98,36
13.	Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat	1	102,77	1.741.217.435	99,86
4	Membangun Perekonomian Daerah Yang Tangguh	10	99,94	30.783.934.642	97,36
14.	Meningkatnya kinerja perekonomian	3	100,83	6.565.613.442	98,47
15.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	2	101,64	1.010.796.650	99,90
16.	Meningkatnya kesejahteraan petani	1	105,56	6.424.057.250	95,91
17.	Menurunnya disparitas pendapatan	1	90,69	8.206.915.000	98,22
18.	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan	3	100,97	8.576.552.300	99,11
5	Meningkatkan Percepatan Pembangunan Perdesaan	1	118	4.212.990.800	85,28
19.	Meningkatnya Jumlah Desa Swasembada	1	118	4.212.990.800	85,28

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2017 dapat dikategorikan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Ciamis karena sebagian besar capaian kinerja sasaran tercapai melampaui target (>100%), hanya 4 (empat) sasaran yang memiliki capaian kinerja dibawah 100% itupun masih tergolong sangat baik karena walaupun dibawah target tetapi angka capaian kinerja masih diatas 90%.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai dan lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 18 sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 16 sasaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya

yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.49
Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
01.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	101,03	159.876.634.375	143.738.911.148	10,09
02.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	100,72	289.388.600.441	276.767.539.407	4,36
03.	Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk	100	4.876.523.100	4.639.121.765	4,87
04.	Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan	100	5.664.231.100	5.509.905.759	2,72
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efisien Dan Efektif Serta Penguatan Kemitraan Pemerintah Dengan Dunia Usaha Dan Masyarakat				
05.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	101,23	134.322.362.728	128.475.291.453	4,35
06.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100	68.228.169.606	65.289.727.142	4,31
07.	Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha	100	2.283.154.450	2.262.323.759	0,91
08.	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	124,24	5.518.381.650	5.500.699.150	0,32
3	Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan				
09.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	100,21	228.862.379.853	219.198.874.575	4,22
10.	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi	105,29	4.707.124.300	4.660.971.204	0,08
11.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	100,64	18.681.988.950	18.376.044.545	1,64
12.	Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat	102,77	1.743.643.713	1.741.217.435	0,14
4	Membangun Perekonomian Daerah Yang Tangguh				
13.	Meningkatnya kinerja perekonomian	100,83	6.898.084.950	6.565.613.442	1,53

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)
14.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	101,64	1.011.804.150	1.010.796.650	0,10
15.	Meningkatnya kesejahteraan petani	105,56	6.698.081.250	6.424.057.250	4,09
16.	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan	100,97	8.653.637.100	8.576.552.300	0,89
5 Meningkatkan Percepatan Pembangunan Perdesaan					
17.	Meningkatnya Jumlah Desa Swasembada.	118	4.939.904.300	4.212.990.800	14,72

3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2017 Kabupaten Ciamis terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam berbagai aspek. Berbanding lurus dengan upaya dan kinerja pemerintah Kabupaten Ciamis, maka berbagai prestasi di berbagai bidang dapat diraih, baik di tingkat Provinsi, maupun Nasional. Prestasi sebagaimana dimaksud dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel 3.50
Prestasi Yang Diraih Kabupaten Ciamis Tahun 2017

NO	NAMA PRESTASI YANG DIPEROLEH	PERINGKAT KE	BIDANG	DIPEROLEH/ DIANUGRAHKAN DARI	ATAS NAMA
1	2	3	4	5	6
A. TINGKAT PROVINSI					
1	Penghargaan WTN	-	Perhubungan	Gubernur Jawa Barat	Pemerintah Kabupaten Ciamis
2	Penghargaan Anugerah pangripta Nusantara (APN)	Harapan Terbaik	Perencanaan Pembangunan	Gubernur Jawa Barat	Pemerintah Kabupaten Ciamis
3	Cabang Olah Raga Sepak Takraw	I	Keolahragaan	Program Provinsi Jawa Barat	Tim Kabupaten Ciamis
4	Cabang Olah Raga Tenis Meja	I	Keolahragaan	Program Provinsi Jawa Barat	Tim Kabupaten Ciamis
5	Pembina Terbaik P2WKSS	I	PPPA	Gubernur Jawa Barat	Ketua TP PKK Kabupaten Ciamis
6	Lomba MQK (Musabaqoh Qiroatul Kutub)	Juara Umum	Keagamaan	Gubernur Jabar	Erni Nuraeni, Muna Faridatul U, Wildan Ibadurrohman, Ulfa Zakiyyah, Iin Nurfaizah, Risa Salsabila, Aris Rohmat
7	Kabupaten Layak Anak	I	PPPA	Gubernur	KLA
8	Forum Anak Daerah	I	PPPA	Gubernur Jawa Barat	FAD
9	P2WKSS Kategori Peran Masyarakat	I	PPPA	Gubernur Jawa Barat	Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri
10	Pramuka	I	Kepemudaan	Kwartir Daerah Jawa Barat	Rajawali

NO	NAMA PRESTASI YANG DIPEROLEH	PERINGKAT KE	BIDANG	DIPEROLEH/ DIANUGRAHKAN DARI	ATAS NAMA
11	Teater Wastu	I	Kebudayaan	Gubernur Jawa Barat	Teater Wastu
12	Helaran Seni Buta Batok	I	Kebudayaan	Sukabumi	Saung Hieum
13	Lomba kelompok agribisnis komoditi ayam buras tahun 2017	I	Agribisnis Peternakan	Gubernur Jawa Barat	Kelompok Tani Taruna Guna Bhakti
14	Keluarga Harmonis	I	KBKKK	Gubernur Jawa Barat	Ikah /H. Jenal Kec.Rancah
15	Kelompok BKB	II	KBKKK	Gubernur Jawa Barat	BKB Permata Kec. Rancah
16	Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2017	II	SDK	Gubernur Jawa Barat	Bidan Fitria Anggraeni, AM.Keb.
17	Cabang Olah Raga Pencak Silat	II	Keolahragaan	Program Prov. Jawa Barat	Rian Apriana
18	Lomba PORSADIN (Pekan Olahraga Seni Madrasah Diniyah)	II (Putri)	Cabang Olah Raga Atletik/Lari Sprint	Gubernur Jabar	Nurul Hidayah
19	Lomba Story Telling	III	Harapan I	Bapusipda	Azmy Feby Nurwulandari
20	Lomba Perpustakaan Desa	III	Harapan II	Perpusnas	Desa Cisontrol Kec. Rancah
21	Lomba PORSADIN (Pekan Olahraga Seni Madrasah Diniyah)	Harapan I (Putra)	Seni Keagamaan Kaligrafi	Gubernur Jabar	Reval Akbar Fauzian
22	Lomba PORSADIN (Pekan Olahraga Seni Madrasah Diniyah)	Harapan II (Putra)	Seni Keagamaan Murotal Wal Imla	Gubernur Jabar	Syafa Firdaus Husni
B.TINGKAT NASIONAL					
1	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2016	-	Pengelolaan Keuangan PEMDA	BPK-RI	Pemerintah Kabupaten Ciamis

NO	NAMA PRESTASI YANG DIPEROLEH	PERINGKAT KE	BIDANG	DIPEROLEH/ DIANUGRAHKAN DARI	ATAS NAMA
2	Penghargaan atas prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 dengan Predikat Nilai "B"	B	Pemerintahan (SAKIP)	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Pemerintah Kabupaten Ciamis
3	Program Kampung Iklim	-	Tata Lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kabupaten Ciamis
4	Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama	I	PPPA	Kementerian PPPA RI	Bupati Ciamis
5	Cabang Olah Raga Catur (disabilitas)	I	Keolahragaan	KONI Pusat	Carsidi
6	Cabang Olah Raga Tenis Meja (disabilitas)	I	Keolahragaan	KONI Pusat	Supriatna Gumilar
7	Cabang Olah Raga Volly Duduk (disabilitas)	I	Keolahragaan	KONI Pusat	Iis Susilawati
8	Cabang Olah Raga Sepeda	I	Keolahragaan	KONI Pusat	Kusmawati Yazid
9	Cabang Olah Raga Sepeda	I	Keolahragaan	KONI Pusat	Bandi Sugito
10	Cabang Olah Raga Sepeda	I	Keolahragaan	KONI Pusat	Candra Rafsanjani
11	Cabang Olah Raga Sepeda (BMX)	I	Keolahragaan	KONI Pusat	Cupi Novianti
12	Cabang Olah Raga Sepeda	I	Keolahragaan	KONI Pusat	Tonton
13	Kemilau Nusantara BatuKaras	I	Kebudayaan	Kementerian Pariwisata	Saung Hieum
				Porsenitas Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah	

NO	NAMA PRESTASI YANG DIPEROLEH	PERINGKAT KE	BIDANG	DIPEROLEH/ DIANUGRAHKAN DARI	ATAS NAMA
14	Lomba Porsadin	II	Cabang Olah Raga	Kementerian Agama	
15	Lomba MQK	II	Keagamaan	Kementerian Agama	Erni Nuraeni, Muna, Faridatul U, wildan, Ibadurrohman, Ulfa Zakiyyah, Iin Nurfaizah, Risa Salsabila, Aris Rohmat
16	Helaran Seni Buta Batok	II	Kebudayaan	Jawa Tengah Dinas Pariwisata dan Budaya	Saung Hieum
17	Lomba Perpustakaan Desa	Harapan II	Perpustakaan	Perpusnas	Desa Cisontrol Kec. Rancah
18	Pramuka	IV	Kepemudaan	Kwartir Nasional	Rajawali

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2017 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan pelaporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan yang seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan kinerja ke depannya.

Penyusunan LKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2017 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 25 Juli 2014. Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Ciamis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Ciamis Tahun 2017.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan 19 sasaran dengan 28 indikator sasaran, dengan hasil pengukuran pencapaian sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Hasil pengukuran pencapaian sasaran (19 sasaran) menunjukkan sebanyak 13 sasaran tercapai melampaui target, 4 sasaran tercapai sesuai target dan 2 sasaran tidak mencapai target yang direncanakan. Akan tetapi seluruh capaian sasaran termasuk dalam kategori sangat baik karena capaian kinerja seluruh sasaran lebih dari 90%.
- b. Rincian tingkat pencapaian indikator kinerja dan kategori pencapaian dari 28 indikator kinerja adalah sebagai berikut :
 - 16 indikator sasaran tercapai melebihi target dengan kategori sangat baik;
 - 8 indikator sasaran tercapai sesuai target dengan kategori sangat baik;
 - 4 indikator sasaran tidak mencapai target dengan kategori sangat baik;

Jika dilihat dari hasil capaian kinerja secara keseluruhan, dari perencanaan yang telah ditetapkan seluruhnya tercapai dengan kategori sangat baik. Untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di Kabupaten Ciamis, dialokasikan anggaran sebesar Rp.962.765.507.516,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.913.141.077.434,- atau 94,85 % dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun 2017.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan indikator sasaran, secara umum telah dapat terpenuhi sesuai harapan dan menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 hasil penyelarasan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Namun demikian masih terlihat adanya sebagian kecil sasaran dan indikator sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan karena adanya beberapa permasalahan dan hambatan. Hal tersebut menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam upaya memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kinerja di masa mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Ciamis ke arah yang lebih baik.